

**LAPORAN KEMAJUAN (PROGRES 100%)
HIBAH PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2018**



JUDUL PENELITIAN:

**PENGEMBANGAN MODEL DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN
SENTRA UMKM PADA KAWASAN WISATA RELIGI
DI JAWA TIMUR**

Tahun ke kedua dari rencana tiga tahun

Tim Peneliti

Ketua Tim Peneliti : Wahyudiono (0718126002)
Anggota : Maria Widyastuti (0718125901)
: Aminatituzzuhro (0720047204)

Dibiayai oleh:
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Nomor: 007/SP2H/K7/KM/2018

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS NARETAMA SURABAYA
OKTOBER 2018**



UNIVERSITAS

Narotama

Badan Hukum Penyelenggara : **YAYASAN PAWIYATAN GITA PATRIA**
Jl. Arief Rachman Hakim No. 51 Surabaya - 60117
Telp. : 031 - 5946404, 5995578 Fax. : 031 - 5931213
Website : www.narotama.ac.id Email : rektor@narotama.ac.id



Registration Number : 36Q14129

AKREDITASI INSTITUSI B

KONTRAK PENELITIAN
PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
Tahun Anggaran 2018
Nomor : 230/NR-LPPM/03/V/2018

Pada hari ini Kamis tanggal 04 bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Dr. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, S.T.,M.T.** : Kepala LPPM, Universitas Narotama Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Narotama Surabaya yang berkedudukan di Jl. Arief Rachman Hakim No.51 Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
- 2. Dr. Wahyudiono, S.E., M.M.** : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Narotama Surabaya, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak **PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI** Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI Tahun Anggaran 2018 dengan judul “ **PENGEMBANGAN MODEL DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN SENTRA UMKM PADA KAWASAN WISATA RELIGI DI JAWA** ”.

Pasal 2
Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp. 140.000.000 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018, tanggal 5 Desember 2017.



UNIVERSITAS

Narotama

Badan Hukum Penyelenggara : **YAYASAN PAWIYATAN GITA PATRIA**
Jl. Arief Rachman Hakim No. 51 Surabaya - 60117
Telp. : 031 - 5946404, 5995578 Fax. : 031 - 5931213
Website : www.narotama.ac.id Email : rektor@narotama.ac.id



Registration Number : 36Q14129

AKREDITASI INSTITUSI B

Pasal 3

Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp } 140.000.000 = \text{Rp. } 98.000.000$ (*Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah*), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PARA PIHAK** membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai dan progress luaran diserahkan ke LPPM sebelum dilanjutkan pembayaran tahap kedua.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp } 140.000.000 = \text{Rp. } 42.000.000$ (*Empat Puluh Dua Juta Rupiah*), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke SIMLITABMAS yaitu Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Catatan Harian.
 - c. Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan Daftar luaran penelitian yang sudah di validasi oleh **PIHAK PERTAMA**
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama : **Dr. Wahyudiono, S.E., M.M.**
Nomor Rekening : **0161593176**
Nama Bank : **BNI Graha Pangeran Surabaya**

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 04 Mei 2018** dan berakhir pada **Tanggal 16 November 2018**

Pasal 5

Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa Model Perencanaan Sosial atau Hak Kekayaan Intelektual Bangsa Hak Cipta
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian berupa Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional ; Pemakalah dalam pertemuan ilmiah Nasional ; Buku (ISBN).
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.



UNIVERSITAS

Narotama

Badan Hukum Penyelenggara : **YAYASAN PAWIYATAN GITA PATRIA**
Jl. Arief Rachman Hakim No. 51 Surabaya - 60117
Telp. : 031 - 5946404, 5995578 Fax. : 031 - 5931213
Website : www.narotama.ac.id Email : rektor@narotama.ac.id



Registration Number : 36Q14129

AKREDITASI INSTITUSI B

- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
- PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Penelitian Skema Terapan Unggulan Perguruan Tinggi dengan judul **PENGEMBANGAN MODEL DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN SENTRA UMKM PADA KAWASAN WISATA RELIGI DI JAWA** dan catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 7

Laporan Pelaksanaan Penelitian

- PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Kemajuan dan Catatan harian penelitian yang telah dilaksanakan ke SIMLITABMAS paling lambat **14 September 2018**.
- PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70% kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **14 September 2018**.
- PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profil pada SIMLITABMAS paling lambat **16 November 2018** (bagi penelitian tahun terakhir).
- Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Bentuk/ukuran kertas A4;
 - Di bawah bagian cover ditulis:



UNIVERSITAS

Narotama

Badan Hukum Penyelenggara : **YAYASAN PAWIYATAN GITA PATRIA**
Jl. Arief Rachman Hakim No. 51 Surabaya - 60117
Telp. : 031 - 5946404, 5995578 Fax. : 031 - 5931213
Website : www.narotama.ac.id Email : rektor@narotama.ac.id



Registration Number : 36Q14129

AKREDITASI INSTITUSI B

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian
Nomor:(007/SP2H/LT/K7/KM/2018)

Pasal 8 Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2018 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 9 Penilaian Luaran

1. Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 10 Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apa bila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 11 Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.



UNIVERSITAS

Narotama

Badan Hukum Penyelenggara : **YAYASAN PAWIYATAN GITA PATRIA**
Jl. Arief Rachman Hakim No. 51 Surabaya - 60117
Telp. : 031 - 5946404, 5995578 Fax. : 031 - 5931213
Website : www.narotama.ac.id Email : rektor@narotama.ac.id



Registration Number : 36Q14129

AKREDITASI INSTITUSI B

Pasal 12 Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13 Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14 Pajak-Pajak

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyeter pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

- 1 Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%
- 2 Pajak - pajak lain sesuai ketentuan

Pasal 15 Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatandan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat,



UNIVERSITAS

Nardama

Badan Hukum Penyelenggara : **YAYASAN PAWIYATAN GITA PATRIA**

Jl. Arief Rachman Hakim No. 51 Surabaya - 60117

Telp. : 031 - 5946404, 5995578 Fax. : 031 - 5931213

Website : www.narotama.ac.id Email : rektor@narotama.ac.id



Registration Number : 36Q14129

AKREDITASI INSTITUSI B

dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 17

Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



(Dr. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, ST.MT)

NIDN: 0724066602

(Dr. Wahyudiono, S.E., M.M.)

NIDN: 0718126002

Mengetahui
(DEKAN)



(Prof. Dr. Soebandi, S.E., Ak., CPA., CA.)

NIDN: 07221056601



UNIVERSITAS

Narotama

Badan Hukum Penyelenggara : **YAYASAN PAWIYATAN GITA PATRIA**

Jl. Arief Rachman Hakim No. 51 Surabaya - 60117

Telp. : 031 - 5946404, 5995578 Fax. : 031 - 5931213

Website : www.narotama.ac.id Email : rektor@narotama.ac.id



Registration Number : 36Q14129

AKREDITASI INSTITUSI B

dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 17

Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(Dr. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, ST.MT)

NIDN: 0724066602



(Dr. Wahyudiono, S.E., M.M.)

NIDN: 0718126002

Mengetahui

(DEKAN)



(Prof. Dr. Soebandi, S.E., Ak., CPA., CA.)

NIDN: 07221056601

RINGKASAN

PENGEMBANGAN MODEL DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN SENTRA UMKM PADA KAWASAN WISATA RELIGI DI JAWA TIMUR

Sebagai kelanjutan dari penelitian tahun pertama, maka penelitian pada tahun kedua bertujuan untuk merumuskan model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM. Dalam model ini telah diidentifikasi satuan kajian yang terkait erat untuk mengungkap peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM yang terdiri dari: a) peran dinas koperasi, b) peran dinas pariwisata, c) lembaga perbankan, d) lembaga perguruan tinggi. Empat elemen *stakeholder* ini harus mampu melakukan sinkronisasi program secara *integrated* dalam pengembangan dan pengelolaan UMKM kawasan wisata religi di Jawa Timur yaitu: pengembangan program kurikulum kewirausahaan, program klinik, pelatihan, pendampingan, bina mitra, riset dan publikasi UMKM, agar optimalisasi peran ini dapat mendorong kemandirian UMKM sebagai kekuatan ekonomi alternatif dimasa mendatang dan berkontribusi riil bagi kesejahteraan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui metode triangulasi agar diperoleh informasi yang akurat, lengkap dan komprehensif, oleh karena itu sumberdata yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode *purposive sampling* yaitu atas dasar pertimbangan tertentu agar layak memberi informasi yang diperlukan untuk dapat mengungkap peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM di kawasan wisata religi di Jawa Timur.

Tahapan perumusan model meliputi: a) mengidentifikasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM pada kawasan wisata religi di Jawa Timur, (b) memetakan model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM pada kawasan wisata religi, (c) merumuskan model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM yang efektif pada kawasan wisata religi (d) menguji efektivitas model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM pada kawasan wisata religi, (e) mengevaluasi model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM melalui *focus group discussion* guna melakukan penyempurnaan model yang aplikatif (f) memperbaiki rumusan model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM yang lebih layak untuk diimplementasikan pada kawasan wisata religi di Jawa Timur. Oleh karena itu perekayasa sosial berupa model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM sangatlah penting dan diharapkan menjadi alternatif model dalam meningkatkan nilai tambah keekonomian usaha sentra UMKM sebagai mesin penggerak perekonomian kawasan wisata religi di Jawa Timur, sehingga terciptalah *multiplier effect* yang positif bagi perekonomian regional maupun nasional.

Kata Kunci: Pengembangan, klinik, pelatihan, pendampingan, bina mitra.

PRAKATA

Puji syukur atas segala rahmat dan nikmat yang telah ALLAH limpahkan, khususnya nikmat iman dan Islam, atas izin dan ridhoNYA kami tim peneliti hibah Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) Universitas Narotama Surabaya telah menyelesaikan tahapan penelitian sesuai dengan rencana. Penelitian ini menargetkan luaran wajib berupa perekayasaan sosial: “Model Optimalisasi Peran *Stakeholder* Dalam Pengelolaan UMKM Kawasan Wisata Religi Di Jawa Timur atau paten sederhana (hak cipta)”, sedangkan luaran tambahan yang di targetkan berupa publikasi karya ilmiah, proseding dan buku ajar. Luaran ini disusun seiring dengan tahapan proses penelitian yang telah selesai, sehingga tim peneliti dapat menyelesaikan luaran wajib yang telah dijanjikan sesuai dengan kontrak Penelitian No. 007/SP2H/K7/KM/2018 pada tanggal, 26 Pebruari 2018.

Perekayasaan Sosial berupa “Model Optimalisasi Peran *Stakeholder* Dalam Pengelolaan UMKM Kawasan Wisata Religi di Jawa Timur” akan didaftarkan HAKI-nya melalui paten sederhana agar memberi legalitas bagi pemanfaatan model ini khususnya bagi pelaku UMKM dalam pengembangan usahanya. Perekayasaan sosial ini telah merekonstruksi satu model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM yang melibatkan empat elemen utama *stakeholder* yaitu dinas koperasi, dinas pariwisata, lembaga perbankan dan lembaga perguruan tinggi, sehingga nantinya dapat memberi kontribusi riil bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pada kesempatan ini tim peneliti hibah PTUPT ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui DIPA Nomor: 042.06.1 .401516 /2018 pada tanggal 5 Desember 2017 telah berkenan mengalokasikan dana penelitian, sehingga luaran penelitian berupa perekayasaan sosial ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga model pengelolaan sentra UMKM ini dapat bermanfaat bagi lembaga pendidikan tinggi dan masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM dan pengelolaan sentra UMKM kawasan wisata religi di Jawa Timur.

Surabaya, 31 Oktober 2018

Tim Peneliti PTUPT,
Universita Narotama Surabaya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ii
	ix
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	1
1.3 Urgensi Penelitian.....	8
1.4 Luaran.....	8
1.5 Capaian Luaran.....	10
	11
BAB 2. TUNJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Peran Stakeholder UMKM.....	12
2.2 Manajemen.....	12
2.3 Kesejahteraan Masyarakat.....	12
2.4 Usaha Mikro Kecil Menengah.....	14
2.5 Sentra UMKM.....	15
2.6 Penelitian Terdahulu.....	16
2.7 Roadmap Penelitian Tahun 2012-2017.....	16
2.7.1 Roadmap Penelitian Perguruan Tinggi.....	17
2.7.2 Road Penelitian Institusi dan Unggulan Fakultas.....	17
2.7.3 Pentingnya Riset yang Diusulkan.....	18
2.7.4 Roadmap Penelitian Tahun 2010-2020.....	19
	19
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	21
3.1 Tujuan Khusus.....	21
3.2 Manfaat Penelitian.....	21
	22
BAB 4. METODE PENELITIAN.....	24
4.1 Jenis Penelitian.....	24
4.2 Obyek dan Nara Sumber.....	24
4.3 Instrumen Penelitian.....	25
4.4 Sampel Sumber Data.....	25
4.5 Teknik Pengumpulan Data.....	26
4.6 Teknik Pengujian Keabsahan Data.....	27
4.7 Satuan Kajian (fokus amatan).....	28
4.7.1 Peran Dinas Koperasi.....	30
4.7.2 Peran Dinas Pariwisata.....	30
4.7.3 Peran Lembaga Perbankan.....	30
4.7.4 Peran Lembaga Perguruan Tinggi.....	31

4.8	Teknik Analisa Data.....	33
4.8.1	Rancangan dan Metode Penelitian.....	34
4.8.2	Langkah Langkah Perumusan Model.....	35
BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....		37
5.1	Gambaran Umum Obyek.....	37
5.1.1	Dinas Koperasi dan UMKM.....	38
5.1.2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.....	38
5.1.3	Lembaga Perbankan.....	39
5.1.4	Lembaga Perguruan Tinggi.....	39
5.2	Karakteristik Sentra UMKM.....	39
5.2.1	Pelaku UMKM.....	40
5.2.2	Lokasi Sentra UMKM.....	40
5.2.3	Komoditi Barang Dagangan.....	43
5.2.4	Siklus Kunjungan Wisatawan.....	44
5.2.5	Infrastruktur Kawasan Wisata.....	46
5.3	Perumusan Model Pengelolaan Sentra UMKM.....	47
5.3.1	Identifikasi Peran <i>Stakeholder</i> dalam Pengelolaan.....	48
5.3.1.1	Peran Dinas Koperasi dan UMKM.....	50
5.3.1.2	Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.....	53
5.3.1.3	Peran Lembaga Perbankan.....	56
5.3.1.4	Peran Lembaga Perguruan Tinggi.....	59
5.3.2	<i>Mapping</i> Peran Stakeholder dalam Pengelolaan UMKM.....	65
5.3.2.1	Peran Dinas Koperasi dan UMKM.....	66
5.3.2.2	Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.....	69
5.3.2.3	Peran Lembaga Perbankan.....	72
5.3.2.4	Peran Lembaga Perguruan Tinggi.....	75
5.3.3	Merumuskan Model Optimalisasi Peran <i>Stakeholder</i>	81
5.3.3.1	Penentuan Titik Krusial.....	81
5.3.3.2	Rumusan Model.....	85
5.3.4	Pengujian Efektivitas Model.....	86
5.3.5	Mengevaluasi Efektivitas Model.....	91
5.4	Pembahasan Model Pengelolaan Sentra UMKM.....	92
5.4.1	Redesain Model Optimalisasi Peran <i>Stakeholder</i>	92
5.4.1.1	Kalangan Biriokrasi.....	94
5.4.1.2	Kalangan Bisnis.....	95
5.4.1.3	Kalangan akaemik.....	97
5.4.2	Sinkronisasi Peran Stakeholder Dalam Pengelolaan.....	98
5.4.3	Model Optimalisasi Peran Stakeholder dalam.....	100
5.4.3.1	Peran Dinas Koperasi dan UMKM.....	101
5.4.3.2	Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.....	103
5.4.3.3	Peran Lembaga Perbankan.....	105
5.4.3.4	Peran Lembaga Perguruan Tinggi.....	107
5.4.3.5	Kebutuhan Pengembangan Model Usaha UMKM.....	109
5.5	Luaran yang Dicapai.....	113
5.5.1	Laporan Penelitian.....	115
5.5.2	Perekayasaan Sosial.....	115
5.5.3	Paten Sederhana.....	118

5.5.4 Proseding Nasional.....	118
5.5.5 Publikasi Karya Ilmiah.....	118
5.5.6 Buku Ajar.....	119
BAB 6. RENCANA TAHUN BERIKUT.....	121
6.1 Aspek Penelitian Tahun Berikut.....	121
6.2 Rancangan dan Metode Penelitian Tahun Ketiga.....	121
6.3 Detail Kegiatan Penelitian Tahun Ketiga.....	122
BAB 7. PENUTUP.....	124
7.1 Kesimpulan.....	124
7.2 Rekomendasi.....	125
DAFTAR PUSTAKA.....	127

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Penyerapan Tenaga Kerja Per Sektor.....	6
Tabel 1.2 : Rencana Target Capaian.....	11
Tabel 2.1 : <i>Roadmap</i> Riset Tema Unggulan.....	18
Tabel 2.2 : <i>Roadmap</i> Penelitian (tahun 2010-2020).....	20
Tabel 4.1 : Rancangan dan Metode Penelitian Tahun Kedua.....	34
Tabel 5.1 : Karakteristik Peran Dinas Koperasi.....	50
Tabel 5.2 : Karakteristik Peran Dinas Pariwisata.....	53
Tabel 5.3 : Karakteristik Peran Lembaga Perbankan.....	56
Tabel 5.4 : Karakteristik Peran Lembaga Perguruan Tinggi.....	59
Tabel 5.5 : <i>Mapping</i> Peran Dinas Koperasi.....	65
Tabel 5.6 : <i>Mapping</i> Peran Dinas Pariwisata.....	68
Tabel 5.7 : <i>Mapping</i> Peran Lembaga Perbankan.....	72
Tabel 5.8 : <i>Mapping</i> Peran Lembaga Perguruan Tinggi.....	75
Tabel 5.9 : Persepsi atas Model Optimalisasi.....	88
Tabel 5.10 : Capaian Luaran Pada Tahun kedua.....	114
Tabel 6.1 : Rincian Metode Penelitian Tahun Ketiga.....	122

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 5.1 : <i>Mapping</i> Peran Dinas Koperasi.....	68
Gambar 5.2 : <i>Mapping</i> Peran Dinas Pariwisata.....	71
Gambar 5.3 : <i>Mapping</i> Peran Lembaga Perbankan.....	75
Gambar 5.4 : <i>Mapping</i> Peran Lembaga Perguruan Tinggi.....	81
Gambar 5.5 : Rumusan Model Optimalisasi Peran <i>Stakeholder</i>	85
Gambar 5.6 : Persepsi Responden Terhadap Rumusan Model.....	90
Gambar 6.1 : Diagram Sistematika Penelitian dalam Kurun satu tahun.....	121

BAB.1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jawa Timur memiliki banyak petilasan yang erat kaitannya dengan sejarah perkembangan dan penyebaran agama Islam masuk di tanah Jawa yang dibawah oleh para perantauan dari India, Gujarat, timur tengah. Beliau datang ke tanah Jawa untuk berdagang sekaligus berdawah agama Islam, namun ada juga yang datang secara khusus untuk syiar agama Islam yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Wali Songo (sembilan ulama penyebar ajaran Islam di Jawa), sebenarnya masih banyak ulama ulama besar yang menyebarkan ajaran Islam di nusantara ini baik di pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan kota lainnya, namun nama beliau tidak sepopuler para ulama ulama yang menyebarkan dakwah di tanah Jawa.

Para ulama yang menyebarkan ajaran Islam di Jawa Timur adalah para wali yang dikenal dengan sebutan wali Limo yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang dan Sunan Drajad. Kebetulan lima wali ini memiliki garis keturunan dan kekerabatan yang sangat kental antara yang satu dengan lainnya, namun dakwah beliau tersebar pada wilayah yang berbeda beda, walaupun tetap terkoordinasi dengan garis komando yang jelas yaitu oleh tokoh wali yang dituakan dan sangat dihormati kearifannya yaitu Sunan Ampel. Lima Wali yang menyebarkan ajaran agama Islam di Jawa Timur ini kebetulan terdiri dari ayah, anak dan menantu, tetapi cara dakwahnya memiliki karakteristik yang berbeda beda karena para wali telah memasukkan unsur kearifan lokal yang masih dianut dan hidup ditengah masyarakat, ini yang menjadi kata kunci keberhasilan dakwah para wali di nusantara yaitu menghormati nilai nilai keraifan lokal yang hidup ditengah masyarakat, sehingga pelan tapi pasti ajaran Islam telah melalui satu proses transformasi dengan budaya lokal, penuh toleran dengan budaya yang dianut oleh masyarakat akhirnya agama Islam diterima dengan penuh keyakinan dan bukan pemaksaan.

Lima wali di Jawa Timur meninggalkan situs sejarah sebagai bukti outentik bahwa pada jamannya beliau telah melakukan dakwah ajaran Islam dengan cara yang khas yaitu membangun padepokan atau pesantren yang digunakan oleh para

santri atau pengikutnya untuk belajar dan ingin mendalami ajaran agama Islam secara baik dan benar. Strategi dan metode yang dipergunakan oleh para wali di Jawa Timur rupanya merupakan suatu konsep yang dibakukan oleh para wali yang menyebarkan ajaran agama Islam di nusantara, ini terbukti adanya situs sejarah berupa masjid dan pondok pesantren yang berada di lokasi pusat dakwah para wali, bahkan makam para walipun berada pada tempat yang sama.

Model dakwah yang dilakukan oleh para wali songo telah diadopsi oleh para tokoh agama dan masyarakat di Indonesia untuk meneruskan jejak pengembangan syiar agama Islam yang ditandai dengan munculnya berbagai pondok pesantren yang tersebar luas di berbagai wilayah nusantara. Berbagai situs peninggalan wali limo di Jawa Timur sangat menginspirasi masyarakat untuk meneruskan syiar perjuangan beliau dengan cara mempertahankan pola dakwahnya serta menjaga nilai nilai budaya yang sudah menyatu dengan ajaran agama Islam seperti ziarah wali yang sudah dikemas menjadi wisata religi, maleman terkait dengan sepuluh hari terakhir di bulan ramadhan, tadarus Al Quran, talilan dan lainnya. Upaya ini ternyata mampu mengedukasi masyarakat sekitar kawasan wisata religi untuk turut menjaga kelestarian peninggalannya dengan cara menjaga situs sejarah yang ditinggalkan termasuk budaya dan nilai ajarannya.

Mengacu pada kultur masyarakat Jawa, bahwa para wali dianggap memiliki karisma tersendiri yang disebut karomah (kelebihan batin), sehingga walaupun para wali telah wafat ratusan tahun yang lalu makamnya tetap dikunjungi oleh masyarakat seluruh pelosok nusantara dengan berbagai motif dan tujuan yang berbeda, namun mempunyai satu kesamaan yaitu ziarah makam wali. Berbagai motif kehadiran masyarakat ini telah membuka peluang baru bagi masyarakat di sekitar makam wali limo untuk menyediakan bebabagai keperluan para peziarah dengan cara berjualan, menyediakan fasilitas masyarakat dan keperluan lainnya. Kondisi ini terbentuk tanpa disadari oleh masyarakat sendiri, oleh karena itu telah terjadi transformasi budaya dan bisnis di kalangan masyarakat bahwa wisata religi dan bisnis di sekitar kawasan wisata religi merupakan simbiosis mutualisma yang saling mendukung satu dengan lainnya karena peziarah ditunggu kehadirannya oleh masyarakat sedang peziarah mengharapkan hadirnya layanan dan fasilitas yang memadai dari masyarakat yang tinggal dikawasan wisata religi.

Wali lima merupakan bagian syiar agama Islam yang menempati wilayah di Jawa Timur, secara kebetulan kelimanya masih dalam satu lingkungan keluarga yaitu orang tua, anak dan menantu. Wali lima juga merupakan bagian dari wali songo yang melakukan syiar agama Islam di pulau Jawa, bahkan wali songolah yang mendorong berdirinya kerajaan Islam pertama kali di pulau Jawa, dimana saat itu masih kokoh pengaruh kerajaan Hindu di Mojopahit, namun kerajaan Islam pertama ini mampu berdampingan dengan kerajaan Hindu di Jawa. Wali limo memiliki peninggalan situs di empat kota yaitu Surabaya (makam sunan Ampel), kota Gresik (makam Sunan Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Giri), kota Lamongan (makam Sunan Drajad) dan kota Tuban (makam Sunan Bonang). Makam para wali lima yang berada di empat kota Surabaya, Gresik, Lamongan dan Tuban telah di kunjungi sebanyak 7.640.747 pengunjung/tahun (24,38%) dari rata rata total pengunjung di Jawa Timur sebanyak 31.338.277/tahun sampai pada akhir tahun 2015.

Secara kebetulan makam para wali lima memiliki satu korelasi yang positif dengan kunjungan wisatawan di kota tersebut, hal ini menunjukkan bahwa ziarah kemakam wali lima memberi dukungan kepada wisatawan untuk mengarahkan kunjungannya ke daya tarik wisata lain yang ada di kota tersebut, sebaliknya daya tarik wisata yang ada di kota tersebut juga mendorong wisatawan untuk melanjutkan berkunjung dan berziarah ke makam wali lima yang ada di kota tersebut (lihat tabel 1.1). Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa kota Surabaya terdapat satu makam wali lima yaitu Sunan Ampel pada tahun 2013 telah dikunjungi peziarah sebanyak 1.768.661 pengunjung (32,7% dari total pengunjung di kota surabaya), sedangkan pada tahun 2014 telah dikunjungi sebanyak 1.950.539 orang (35,3%) dan tahun 2015 telah dikunjungi sebanyak 2.040.365 (29,2%), jumlah kunjungan peziarah ke makam Sunan Ampel mengalami kenaikan dari tahun ke tahun (2013-2015).

Kunjungan ziarah ke makam Sunan Ampel secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi wisatawan untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke arah daya tarik wisata lain yang berada di kota Surabaya. Pada tahun 2013 daya tarik wisata lain di kota Surabaya juga dikunjungi oleh wisatawan sebanyak 3.648.108 orang (67,3%), tahun 2014 sebanyak 3.580.155 orang (64,7%) sedangkan di tahun 2015 dikunjungi sebanyak 4.944.896 orang (70,8%).

Kota Lamongan terdapat satu makam wali lima yaitu makam Sunan Drajad, dimana pada tahun 2013 makam Sunan Drajad telah diziarahi sebanyak 465.267 orang (25,3% dari total wisatawan di kota Lamongan), sedangkan pada tahun 2014 dikunjungi sebanyak 477.080 orang (20,2%) dan tahun 2015 dikunjungi sebanyak 480.885 (20,4%). Jumlah kunjungan wisata religi di kota Lamongan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun (2013-2015). Kunjungan ziarah makam wali di kota Lamongan memiliki dampak yang besar terhadap wisatawan untuk melanjutkan perjalanannya menuju daya tarik wisata lainnya, hal ini memang didukung oleh kota Lamongan yang memiliki daya tarik wisata lebih bervariasi dan banyak pilihannya khususnya wisata alam seperti wisata bahari, wisata goa yang jumlahnya memadai dan sangat mempesona. Pada tahun 2013 daya tarik wisata lain di kota Lamongan dikunjungi oleh wisatawan sebanyak 1.374.635 orang (74,7%), tahun 2014 sebanyak 1.881.000 orang (79,8%) sedangkan di tahun 2015 dikunjungi sebanyak 1.879.857 orang (79,6%). Kunjungan terhadap daya tarik wisata lain di kota Lamongan memang tidak mengalami kenaikan signifikan dalam persentasenya namun secara kuantitas mengalami kenaikan cukup baik, hal ini menunjukkan juga pada kunjungan wisata religi tetap mengalami kenaikan dalam jumlah kunjungannya wisatawan.

Kota Tuban terdapat satu makam wali lima yaitu makam Sunan Bonang yang kebetulan sebagai putra dari Sunan Ampel sekaligus saudara kandung dari Sunan Drajad, dimana pada tahun 2013 makam Sunan Bonang telah dikunjungi sebanyak 1.529.706 orang (40,2% dari total wisatawan di kota Tuban), sedangkan pada tahun 2014 dikunjungi sebanyak 1.781.536 orang (42,4%) dan tahun 2015 dikunjungi sebanyak 2.078.453 (43,6%). Jumlah kunjungan wisata religi di kota Tuban mengalami kenaikan dari tahun ke tahun (2013-2015) baik dalam jumlah pengunjung maupun persentasenya. Kunjungan ziarah makam wali di kota Tuban memiliki dampak yang positif bagi wisatawan untuk melanjutkan perjalanannya menuju daya tarik wisata lainnya, hal ini memang didukung oleh kota Tuban yang memiliki daya tarik wisata lebih bervariasi dan banyak pilihannya khususnya wisata alam seperti wisata bahari dan pabrik besar yang beroperasi di kota ini yang memadai dan sangat mempesona. Pada tahun 2013 daya tarik wisata lain di kota Tuban dikunjungi oleh wisatawan sebanyak 2.277.137 orang (59,8%), tahun 2014

sebanyak 2.418.804 orang (57,6%) sedangkan di tahun 2015 dikunjungi sebanyak 2.693.803 orang (56,4%). Kunjungan terhadap daya tarik wisata lain di kota Tuban tidak mengalami kenaikan signifikan dalam prosentase namun secara kuantitas jumlah wisatawan yang berkunjung mengalami kenaikan cukup baik.

Empat kota di Jawa Timur yaitu kota Surabaya, Gresik, Lamongan dan Tuban secara geografis merupakan kota yang saling berdekatan serta memiliki sejarah syiar agama Islam yang sama karena para tokohnya wali lima yang ada di Jawa Timur bersumber pada tempat yang sama yaitu Sunan Ampel. Geografis dan karakteristik ekonomi ke empat kota santri tersebut cenderung sama yaitu maritim dan perdagangan. Empat kota yang ditempati makam para wali lima dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah dikunjungi wisatawan lokal sebanyak 11.766.159 orang ditahun 2011, secara berturut turut pengunjungnya mengalami kenaikan yaitu 13.312.727 orang (2012), 13.724.285 orang (2013), 16.213.541 orang(2014) dan 17.255.681 orang (2015). Jumlah wisatawan lokal pada empat kota tersebut merupakan 43,12% dari total wisata lokal Di Jawa Timur sebanyak 27.297.828 orang pada tahun 2011, secara berturut turut jumlah wisatawan lokal adalah sebesar 40,07% (2012), 34,59% (2013), 35,52% (2013) dan 33,53% (2015). Jika dilihat angka prosentasenya rata rata hanya berkisar 37,37% dari total wisatawan lokal yang berkunjung pada berbagai daya tarik wisata yang ada di Jawa Timur.

Kota Surabaya sebagai ibu kota propinsi Jawa Timur karakteristik UMKM-nya lebih didominasi sektor perdagangan/hotel, industri pengolahan dan sektor jasa/transportasi. Karakteristik UMKM ini juga memberi pengaruh pada sektor pengembangan pariwisata yang ada di kotanya. Wisatawan yang datang di kota Surabaya tentu memiliki pilihan pada daya tarik wisata yang lebih bervariasi di banding ke tiga kota lainnya. Sedangkan kota Gresik, Lamongan dan Tuban lebih kental nuansa keagamaannya dibanding dengan kota Surabaya karena ikon yang disandang dengan sebutan kota santri. Karakteristik UMKM yang ada di tiga kota santri ini lebih didominasi oleh sektor pertanian, nelayan dan perdagangan, hal ini tentu selaras dengan kondisi geografinya.

Pelaku UMKM di empat kota ini memiliki aktivitas usaha yang tersebar pada berbagai sektor kegiatan yang relevan dan mendukung karakteristik geografi, budaya dan kondisi wilayahnya. Kota Gresik dan Tuban wisatawan yang datang

lebih banyak berkunjung pada wisata religi dibanding kota Surabaya yang lebih di dominasi pada daya tarik wisata budaya, alam dan buatan. Pilihan masyarakat terhadap daya tarik wisata suatu daerah tentu akan mempengaruhi perilaku pada masyarakatnya dalam mengembangkan sektor ekonomi yang selaras dan sesuai dengan potensi yang dimilikinya, oleh karena itu struktur ekonomi yang ada pada suatu daerah akan mempengaruhi jumlah penyerapan tenaga kerja yang berbeda, jenis lapangan kerja yang berbeda, tingkat pendidikan dan keterampilan yang beda tentu juga mempengaruhi terhadap distribusi pendapatan pada masyarakat dan kontribusinya pada pendapatan domestik regional bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi daerah (lihat tabel 1.1).

Tabel 1.1: Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Sektor dan Kota Di Jawa Timur

No	Sub Sektor Usaha	Surabaya	Gresik	Lamongan	Tuban	Total Jatim
1	Industri Pengolahan	38.325	33.866	33.025	23.580	944.599
2	Perdagangan/hotel	290.483	82.496	95.939	80.189	2.791.426
3	Transportasi	23.892	5.144	5.527	7.621	231.825
4	Jasa	102.132	25.097	19.227	15.828	739.448
5	Sektor Lainnya	11.947	92.579	268.107	243.319	6.410.141
Total Penyerapan TK		466.779	239.182	421.825	370.537	11.117.439
Prosentase total Jatim		4,20%	2,15%	3,79%	3,33%	-

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur (2015: 37)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM ternyata mengikuti pola struktur ekonomi yang ada pada suatu daerah. UMKM kota Surabaya yang didominasi oleh sektor perdagangan/hotel, jasa/transportasi dan industri pengolahan telah mampu menyerap tenaga kerja hampir 97,4% dari total penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM, sedangkan pada sektor yang sama di kota Gresik hanya menyerap tenaga kerja sekitar 61,3% dari total penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM, kota Lamongan sekitar 36,4% dan kota Tuban sekitar 34,3% dari total penyerapan tenaga kerja sektor UMKM. Tabel 1.5 juga menggambarkan bahwa struktur sektor UMKM turut menentukan pola struktur tenaga kerja yang diperlukan oleh suatu daerah, oleh karena itu rencana pengembangan struktur sektor UMKM memerlukan konsep strategis dan selaras dengan karakteristik masing masing daerah, sehingga seluruh potensi daerah dapat dioptimalkan dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Masyarakat kawasan wisata religi di Jawa Timur yang menjadi pelaku dan penggiat di Sentra UMKM memiliki karakteristik yang unik karena usaha yang di

jalani masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup bagi keluarganya dan bisnis yang ditekuni ini juga sudah berjalan secara turun temurun dari lingkungan keluarganya tanpa ada upaya untuk berinovasi dan melakukan kreativitas usaha yang lebih berorientasi pada kepuasan konsumen. Hal ini tentunya tidak mampu memberi nilai tambah yang optimal pada usahanya, oleh karena itu dibutuhkan upaya konkrit dan riil dari para *stakeholder* dan penggiat sektor UMKM untuk membantu merumuskan model pengelolaan sentra UMKM yang lebih memadai dan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pasar tanpa harus meniadakan nilai nilai budaya dan kearifan lokal setempat. Saat ini pengelolaan sentra UMKM di kawasan wisata religi masih belum memadai, terkesan kumuh dan tidak nyaman bagi pengunjung, oleh karena itu perlu pembenahan secara menyeluruh dan terpadu agar sentra UMKM di kawasan wisata religi ini mampu memberi kontribusi riil bagi peningkatan pendapatan masyarakat.

Kendala yang dihadapi pelaku sektor UMKM pada kawasan wisata religi pada umumnya masalah klasik yang sering dihadapi oleh kelompok usaha sektor informal lainnya antara lain : (a) aspek pengadaan bahan baku produksi, (b) aspek teknologi produksi, (c) aspek pemasaran produk, (d) aspek ketenagakerjaan, (e) aspek permodalan, (f) aspek sarana dan prasarana dan (g) aspek manajerial. Ketujuh aspek tersebut sampai saat ini belum memperoleh solusi secara holistik baik dari kalangan birokrasi/pemerintah, perguruan tinggi dan penggiat UMKM, sedangkan yang dilakukan saat sekarang adalah solusi yang bersifat parsial dan tidak dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan sehingga permasalahan yang terjadi tidak dapat tuntas.

Mengacu pada uraian latar belakang tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dan struktur ekonomi di Jawa Timur lebih dipengaruhi dan ditentukan oleh karakteristik masyarakatnya baik menyakut wilayah, budaya dan alamnya, oleh karena itu pengembangan ekonomi suatu daerah harus menyelaraskan dengan karakteristik masing masing daerahnya. Setiap daerah di Jawa Timur dianugerahi keindahan alam dan pesonanya yang eksotis, sehingga berbagai daya tarik wisata yang di miliki oleh daerah harus dikelola secara memadai dan mampu memberi nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakatnya. Secara umum daya tarik wisata di kelompokkan menjadi tiga yaitu: a) wisata buatan, b) wisata budaya dan c) wisata

alam. Wisata alam dan budaya di Jawa Timur memiliki daya guna tak ternilai harganya karena semua ini sudah ada sejak bumi nusantara ini tercipta dan tinggal bagaimana para *stakeholder* ini mengoptimalkan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Salah satu daya tarik wisata budaya di Jawa Timur adalah situs makam para wali lima yang berada di kota Surabaya, Gresik, Lamongan dan kota Tuban. Keberadaan makam para wali lima ini memberi berkah tersendiri bagi warga yang berada pada kawasan tersebut, karena ziarah makam para wali, auliyah dan ulama sudah menjadi budaya bagi masyarakat. Wisata religi mampu mendorong aktivitas bisnis bagi masyarakat yang bermukim pada kawasan tersebut, namun keberadaan UMKM tersebut belum memberi nilai tambah secara optimal karena pengelolaan sentra UMKM pada kawasan wisata religi di Jawa Timur belum berjalan secara efektif, oleh karena itu *stakeholder* yang memainkan peran strategis dalam rangka pengembangan usaha UMKM harus dilakukan perekayasa sosial dalam bentuk rumusan: **“Model Optimalisasi Peran *Stakeholder* Dalam Pengelolaan UMKM yang Efektif Pada Kawasan Wisata Religi Di Jawa Timur”**, sehingga sentra UMKM pada kawasan wisata religi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang mandiri serta meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

1.2 Perumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat peneliti kemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah karakteristik peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM Kawasan Wisata Religi di Jawa Timur ?
2. Bagaimanakah model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM yang efektif pada Kawasan Wisata Religi di Jawa timur ?

1.3 Urgensi Penelitian

Stakeholder UMKM memainkan peran strategis dan berkontribusi terhadap keberhasilan usaha pelaku UMKM kawasan wisata religi di Jawa Timur, namun sampai saat ini kontribusinya belum optimal, sedangkan disisi lain wisata religi menjadi ikon ziarah bagi masyarakat Indonesia, khusus warga muslim yang tersebar

diseluruh pelosok nusantara, namun keberadaan wisata religi ini belum mampu memfasilitasi usaha UMKM yang memadai untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengunjung yang bersifat unik dan terus mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang ada. Hal ini disebabkan oleh peran *stakeholder* yang belum optimal dan pengelolaan sentra UMKM yang belum memadai, oleh karena itu perlu dirumuskan pengembangan pengelolaan sentra UMKM yang holistik agar UMKM mampu menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkontribusi riil terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah: tahun pertama mengidentifikasi pengelolaan sentra UMKM, tahun kedua mengidentifikasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan sentra UMKM dan tahun ketiga mengidentifikasi peluang usaha yang relevan dengan aktivitas masyarakat di kawasan wisata religi. Hasil identifikasi di atas dapat dirumuskan model pengelolaan sentra UMKM, model optimalisasi peran *stakeholder* serta model pengembangan usaha yang relevan dengan karakteristik sentra UMKM pada kawasan wisata religi di Jawa Timur, sehingga sentra UMKM di kawasan ini dapat menjadi kekuatan ekonomi yang produktif dan mandiri bagi masyarakat. Pada tahun pertama telah berhasil dirumuskan model pengelolaan sentra UMKM yang efektif sebagai solusi atas permasalahan lemahnya manajerial pengelolaan UMKM. Sebagai kelanjutannya maka pada tahun kedua akan dirumuskan model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM yang efektif, hal ini sebagai solusi atas permasalahan tidak optimalnya *stakeholder* dalam memainkan perannya yang strategis dalam pengelolaan UMKM, oleh karena itu kedua model yang telah dirumuskan tersebut diharapkan mampu mendukung rumusan model pada tahun ketiga yaitu model pengembangan usaha UMKM pada kawasan wisata religi di Jawa Timur. Melalui tiga rumusan model ini maka konsep pengelolaan UMKM yang dilakukan secara *ter-integrated* melalui kajian dan proses penelitian yang panjang akan memberi solusi yang terintegrasi pula, sehingga keberadaan UMKM pada kawasan wisata religi di Jawa Timur mampu memberi kontribusi riil bagi perekonomian masyarakat serta memperkuat perekonomian regional yang tercermin pada Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM merupakan salah satu sektor usaha yang turut menentukan keberlanjutan masa depan perekonomian regional maupun nasional,

oleh karena itu perlunya UMKM didorong untuk tumbuh berkembang dengan berdasarkan pada prinsip manajemen dan tata kelola yang modern serta perlunya dukungan dari peran *stakeholder* yang ter-*integrated* dan konsisten.

1.4 Luaran

Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi merupakan upaya strategis dari perguruan tinggi dalam mengembangkan penelitian yang dapat memberi solusi terhadap berbagai isu nasional terkait dengan pengembangan UMKM di Indonesia, oleh karena itu sentra UMKM pada kawasan wisata religi seharusnya dikembangkan secara terintegrasi dan berkesinambungan agar mampu memberi kontribusi riil bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini akan memberi luaran penelitian diantaranya:

1. Luaran wajib, yang meliputi: a) Model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM yang efektif atau Paten sederhana (hak cipta)
2. Luaran tambahan, yang meliputi: a) Publikasi ilmiah internasional, b) Buku manajemen UMKM (ISBN), c) Pemakalah dalam pertemuan ilmiah nasional/proseding

1.5 Capaian Luaran

Sesuai dengan *grand desain* penelitian unggulan Universitas tentang: “Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan UMKM dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi” serta topik riset unggulan Fakultas Ekonomi & Bisnis tentang: “Pengembangan sistem manajemen koperasi dan UMKM” maka target capaian penelitian ini harus searah dengan Rencana Strategis Penelitian (RSP), oleh karena itu rencana target capaian tahunan dalam penelitian ini dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Rencana Target Capaian Tahun Kedua (2)

1. Luaran wajib, yang meliputi: a) Model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM yang efektif atau Paten sederhana (hak cipta)
2. Luaran tambahan, yang meliputi: a) Publikasi ilmiah internasional, b) Buku manajemen UMKM (ISBN), c) Pemakalah dalam pertemuan ilmiah nasional/proseding

Rencana target capaian tahun kedua harus di rancang dengan mengikuti *timeline* yang jelas agar dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat capaian yang dijanjikan dalam usulan penelitian dan pengukuran kinerja bagi peneliti, baik yang dicapai pada tahun yang sama (tahun pertama) dan akan berlanjut pada tahun yang berikutnya. Untuk memberi gambaran yang rinci dapat ditampilkan dalam tabel 1.2 sebagai berikut.

Tabel 1.2: Rencana Target Capaian

No	Jenis Luaran				Indikator Capaian		
	Kategori	Sub Kategori	Wajib	Tambahan	TS ¹⁾	TS+1	TS+2
1	Artikel ilmiah dimuat di jurnal ²⁾	Internasional bereputasi	-	v	<i>Draft</i>	<i>reviewed</i>	<i>published</i>
		Nasional Terakreditasi	-	-	-	-	-
2	Artikel ilmiah dimuat di proseding ³⁾	Internasional terindeks	-	-	-	-	-
		Nasional	-	v	<i>Submit</i>	terlaksana	-
3	<i>Invited speaker</i> dalam temu ilmiah ⁴⁾	Internasional	-	-	Tidak ada	-	-
		Nasional	-	-	Tidak ada	-	-
4	<i>Visiting lecturer</i> ⁵⁾	Internasional	-	-	Tidak ada	-	-
5	Hak kekayaan intelektual (HKI) ⁶⁾	Paten	-	-	Tidak ada	-	-
		Paten sederhana	v	-	<i>Terdaftar</i>	-	-
		Hak cipta	-	-	Tidak ada	-	-
		Merek dagang	-	-	Tidak ada	-	-
		Desain produk industri	-	-	Tidak ada	-	-
		Indikasi Geografis	-	-	Tidak ada	-	-
		Perlindungan Varietas Tanaman	-	-	Tidak ada	-	-
		Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu	-	-	Tidak ada	-	-
6	Teknologi Tepat Guna ⁷⁾	-	-	Tidak ada	-	-	
7	Model/Purwarupa/Desain/Karya Seni/Rekayasa sosial ⁸⁾	v	-	<i>Produk</i>	-	-	
8	Buku ajar (ISBN) ⁹⁾	-	v	<i>draf</i>	<i>Publish</i>	-	
9	Tingkat Kesiapan Teknologi ¹⁰⁾	-	-	5	-	-	

Sumber: Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi (2018)

BAB. 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran *Stakeholder* UMKM

Manajemen UMKM merupakan seni mengelola bisnis yang dilakukan oleh pelaku UMKM dengan mengacu pada prinsip implementasi pada berbagai fungsi manajemen dalam aktivitas bisnisnya. Penerapan model dalam pengelolaan bisnis tergantung pada pilihan manajemen yang diterapkan, oleh karena itu pengelolaan UMKM akan menjadi lebih baik manakala memperoleh dukungan dari berbagai elemen *stakeholder* baik langsung maupun tidak langsung yang terlibat dengan keberlanjutan UMKM. Peran birokrasi, pelaku bisnis serta kalangan akademisi akan turut memperkuat daya saing UMKM jika hal ini dilakukan secara terpadu dan sesuai dengan keunikan bisnis UMKM, karena UMKM memiliki karakteristik yang khas baik manajemennya, sifat bisnisnya maupun pembelinya.

Keberadaan dan peran *stakeholder* telah turut memberi adil bagi kemajuan bisnis UMKM, tetapi selama ini dukungan yang diberikan masih bersifat parsial, tidak konsisten dan ter-*integrated* dengan seluruh elemen yang ada, oleh karena itu perlunya optimalisasi peran stakeholder dalam pengelolaan UMKM agar peran yang diberikan memberi arah yang lebih jelas, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik UMKM pada satu kelompok atau kawasan sentra bisnis yang tertentu, sehingga kedepannya UMKM mampu menjadi pelaku bisnis yang kuat dan mandiri, berkontribusi riil bagi kesejahteraan masyarakat di kawasan tertentu.

2.2 Manajemen

Manajemen adalah suatu proses bagaimana cara menangani masalah waktu dan hubungan antara manusia ketika hal tersebut muncul dalam organisasi. Bagaimana suatu organisasi mempengaruhi masa lalu, masa kini dan masa depan. Manajemen waktu dalam organisasi memiliki beberapa elemen yaitu: a) Manajemen adalah usaha menciptakan masa depan yang lebih baik dengan mengingat masa lalu dan masa kini, b) Manajemen di praktekkan di dalam dan merefleksikan diri dari era sejarah tertentu, c) Manajemen adalah kegiatan yang menghasilkan konsekuensi dan pengaruh yang muncul dengan berlalunya waktu.

Manajemen memiliki empat fungsi spesifik dari manajer yang meliputi: merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan. Untuk dapat menjalankan fungsi manajerial diperlukan sumberdaya organisasi yang memadai agar dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan. Proses adalah cara sistematis yang sudah ditetapkan dalam melakukan kegiatan. Merujuk manajemen sebagai suatu proses, maka dalam aktivitasnya mencapai sasaran diperlukan keterlibatan yang saling terkait satu dengan lain, oleh karena itu diperlukan seni manajemen sesuai dengan karakteristik yang ada didalam organisasi, sehingga diperlukan seni merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengawasi aktivitasnya dengan cara yang tepat dan efisien.

Merencanakan mengandung makna bahwa manajer harus memikirkan dengan cara yang matang sebelum menentukan sasaran dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran tersebut. Segala sesuatu yang akan dilakukan harus dilakukan melalui rencana, metode dan logika bukan dengan cara perasaan. Rencana merupakan pedoman untuk: a) organisasi memperoleh dan menggunakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan, b) anggota organisasi melaksanakan aktivitas yang konsisten dengan tujuan dan prosedur yang sudah ditetapkan, c) memonitor dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan, sehingga tindakan korektif dapat dilakukan bila kemajuan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Mengorganisasikan adalah proses untuk mengatur dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya diantara anggota organisasi, sehingga masing masing anggota dapat mencapai sasaran organisasi. Sasaran yang berbeda tentu memerlukan struktur yang berbeda pula, oleh karena itu diperlukan desain organisasi yang tepat agar sasaran berjalan efektif dan efisien. Pengorganisasian menghasilkan struktur hubungan dalam organisasi dalam sebuah organisasi dan lewat hubungan terstruktur rencana masa depan akan tercapai. Aspek lain dari hubungan organisasi adalah bagaimana menempatkan orang-orang baru untuk menggabungkan struktur hubungan.

Memimpin meliputi tindakan mengarahkan, mempengaruhi dan memotivasi para karyawan untuk melaksanakan tugas yang penting. Hubungan dan waktu bersifat sentral dalam kegiatan memimpin. Sebenarnya memimpin menyentuh

hubungan antara manajer dengan setiap orang yang bekerja dengan mereka. Para manajer harus memimpin untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain agar bersedia bergabung dengan mereka dalam mengejar masa depan yang telah direncanakan. Manajer harus membantu karyawannya untuk bekerja sebaik mungkin dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi organisasi dan mencapai tujuan organisasi secara bersama sama, sehingga dapat mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien.

Mengendalikan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pimpinan agar semua bentuk tugas yang telah dibebankan kepada karyawan dapat berjalan sesuai dengan yang di inginkan. Pengendalian manajemen meliputi beberapa elemen yakni: a) menetapkan suatu standar prestasi kerja, b) mengukur prestasi saat ini, c) membandingkan prestasi saat ini dengan standar yang telah ditetapkan, d) melakukan tindakan korektif manakala terjadi penyimpangan yang dapat dideteksi. Lewat fungsi pengendalian manajer mempertahankan organisasi tetap berada pada jalurnya. Dalam perkembangan saat ini fungsi pengendalian telah dintegrasikan dengan semua aspek, jadi bukan sekedar menjaga organisasi tetap ada pada jalurnya tetapi sudah mengarah pada terciptanya kualitas manajemen secara total yang sering disebut *Total Quality Management* (TQM). Melalui TQM diharapkan semua komponen organisasi terlibat secara langsung dan masing masing memiliki kontribusi yang terkait dengan kapasitas dan kompetensinya (Stoner *et al*, 2006: 12), sehingga organisasi dapat mencapai kinerja yang lebih baik dengan cara yang efektif dan efisien.

2.3 Kesejahteraan Masyarakat

Manusia adalah makhluk sosial dimana aktivitas yang dilakukan tidak dapat lepas dari orang lain dan setiap manusia ingin hidup dengan sejahtera. Kondisi Sejahtera yang dimaksud menunjuk pada kesejahteraan sosial, yaitu tercukupinya kebutuhan material dan non-material. Dalam masyarakat Indonesia, kondisi sejahtera itu diartikan hidup aman dan bahagia karena semua kebutuhan dasar dapat terpenuhi, seperti makanan yang cukup, gizi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, pendapatan yang layak dan perlindungan. Kesejahteraan bukan diukur dari fisik saja tetapi juga non fisik secara seimbang dan terpadu.

Friedlander dalam Suud (2006: 8) menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dalam bentuk pelayanan-pelayanan oleh lembaga-lembaga sosial yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan seluruh kemampuan serta untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Kesejahteraan sosial sebagai sebuah pelayanan adalah suatu sistem, suatu peraturan, program-program, kebaikan-kebaikan, pelayanan-pelayanan yang dapat memperkuat atau menjamin penyediaan pertolongan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial yang diakui sebagai dasar bagi penduduk dan keteraturan sosial. Sukirno (2004: 201) menyatakan bahwa modal adalah segala barang-barang yang akan diciptakan oleh manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang akan digunakan kembali oleh masyarakat. Barang-barang dan jasa yang dihasilkan berguna untuk meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat tersebut. Kunci pengentasan kemiskinan adalah memberdayakan masyarakat miskin bukan hanya sekedar memberikan bantuan (Sajogyo, 2002:16). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya optimalisasi atas sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat sendiri baik yang menyangkut para aktor dari tokoh masyarakatnya, pemuka agamanya dan potensi sumberdaya masyarakat yang berupa nilai kearifan lokal, integritas dan bakat keterampilan. Sumberdaya yang dimiliki masyarakat harus dikelola secara bijak agar keberadaannya memberi nilai tambah bagi aktivitas ekonomi masyarakat serta berkontribusi pada keekonomian sumberdaya itu sendiri menjadi “*superior value*”

2.4 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Program untuk mengatasi rendahnya investasi, tingkat pengangguran dan kemiskinan yang masih cukup tinggi maka pemerintah melakukan kebijakan melalui program pemihakan ekonomi yang bersifat pemberdayaan golongan ekonomi lemah dan pengadaan infrastruktur yang mendukung. Pemihakan pada golongan ini adalah pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Pada masa krisis di tahun 1997/1998 usaha mikro dan kecil dianggap sebagai penyelamat ekonomi Indonesia.

Krisis ekonomi tahun 1998, sektor UMKM juga menjadi penyelamat perekonomian nasional, karena perusahaan-perusahaan besar banyak yang tumbang, justru sektor UMKM tetap eksis di tengah perekonomian yang serba tidak pasti. Mengapa sektor UMKM tetap eksis dan justru tumbuh berkembang, karena sektor ini memiliki karakteristik yang bersifat unik, justru keunikan inilah yang tidak dipahami oleh para penyusun kebijakan dengan benar mengingat keunikan ini bersifat holistik. UMKM seharusnya dikembangkan menjadi suatu model ekonomi alternatif karena memiliki basis ekonomi kerakyatan dan langsung bersentuhan dengan masyarakat.

2.5 Sentra UMKM

Sentra UMKM merupakan komunitas kelompok usaha UMKM yang bernaung dan berada dalam kelompok usaha, dimana beliau merasa senasib dan memiliki kepentingan yang sama bahkan memiliki karakteristik yang cenderung sama. Sentra UMKM terbentuk tanpa sengaja atau mungkin juga disengaja karena beliau dipersatukan oleh rasa kebersamaan, ingin berkembang dan membentuk suatu komunitas dalam satu tempat atau wilayah tertentu. Komunitas ini cenderung memiliki budaya yang sama sehingga sentra UMKM dapat menjadi wadah untuk memudahkan dalam memberi pelatihan, pendampingan, pembinaan dan kepentingan lainnya. Sentra UMKM sebenarnya dapat menjadi kekuatan ekonomi baru melalui pemberdayaan kelompok usaha masyarakat yang telah diuji ketangguhan sekaligus dapat menarik masyarakat komunitas warganya untuk bergabung dalam wadah yang lebih besar lagi sehingga sentra UMKM ini dapat dijadikan model pemberdayaan ekonomi rakyat yang tangguh dan berkontribusi riil bagi kesejahteraan masyarakat.

2.6 Penelitian Terdahulu

Li and Matlay, 2006 dalam judulnya "*Chinese entrepreneurship and small business development*" menjelaskan tentang iklim kewirausahaan di negara China bahwa kebijakan pemerintahan daerah dalam mengembangkan aktivitas kewirausahaan di kota dan desa, lingkungan pemerintah dalam merespon kebutuhan perusahaan swasta serta budaya berpengaruh terhadap kewirausahaan.

Penelitian Hisrich and Drnovsek 2002 dalam judulnya “*Entrepreneurship and small business research a European perspective*”. Penelitian ini menjelaskan tentang perspektif minat kewirawusahaan membawa dampak terhadap banyak aspek antara lain pendidikan, bisnis, pemerintahan and beberapa komunitas tentang kehidupan. Peningkatan daya kreasi dan pengembangan perusahaan kecil membawa perubahan secara signifikan terhadap dunia pendidikan.

Penelitian Gibb, 2000 dalam judulnya “*Small and medium enterprise development: Borrowing from elsewhere*” Penelitian ini menjelaskan isu-isu tentang transfer ide antara negara dan budaya pengembangan usaha perusahaan kecil dan menengah. Hasil Penelitian ini menanyakan tentang apa arti peran negara dalam mengembangkan sektor usaha kecil dan menengah ?, Dimana posisi akademisi dalam proses perubahan ? Dimana letak relevansi tantangan perubahan di masa depan ?. Bagaimana dan dimana kita harus memulai menangani isu-isu tersebut ?. Beberapa pertanyaan ini sebenarnya memberi sinyal kepada para pengambil keputusan bawah pemerintah, kalangan akademis dan pihak terkait harus memiliki sikap yang jelas bagaimana mengembangkan usaha sektor UMKM.

2.7 Roamap Penelitian Tahun 2018-2023

Grand desain penelitian unggulan Universitas: “Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan UMKM dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi” dan topik riset unggulan Fakultas Ekonomi dan Bisnis tentang: “Pengembangan sistem Manajemen Koperasi dan UMKM”, merupakan *grand desain* penelitian yang saling terkait, namun dalam implementasinya masih diperlukan topik/tema kajian yang lebih selaras dengan kondisi dan isu-isu yang sedang berkembang di tengah masyarakat serta ketertarikan minat peneliti sesuai dengan bidang keilmuannya.

2.7.1 Renstra Penelitian Perguruan Tinggi

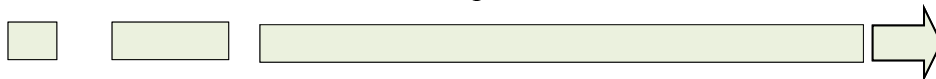
Rencana strategis penelitian perguruan tinggi (RSP-PT) disusun dalam rangka mewujudkan tercapainya pelaksanaan tridarma bidang penelitian yang terarah dan berkesinambungan serta mampu berkontribusi riil dalam pemecahan berbagai permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Rencana strategis

penelitian disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis pada tingkat lokal maupun nasional sehingga membantu para peneliti/dosen di lingkungan perguruan tinggi. Orientasi penelitian di lembaga ini diarahkan pada kajian interdisiplin melalui riset unggulan: “Peningkatan pelayanan masyarakat yang berwawasan lingkungan dengan mengedepankan penggunaan teknologi informasi” Renstra penelitian perguruan tinggi dirumuskan kedalam empat riset unggulan institusi yang meliputi: 1) Tingkat efektivitas dan tata kelola manajerial lembaga dan korporasi, 2) Kebijakan hukum, 3) Rekayasa teknik dalam transportasi, struktur, manajemen konstruksi dan pengelolaan lingkungan, 4) Pemanfaatan teknologi informasi dan komputer untuk lembaga pendidikan, bisnis dan sektor pemerintah.

2.7.2 Roadmap Penelitian Institusi dan Unggulan Fakultas Ekonomi

Mengacu pada riset unggulan perguruan tinggi selanjutnya dikembangkan riset unggulan pada tingkat fakultas agar dapat menampung para peneliti sesuai dengan minatnya. Tema penelitian unggulan lembaga dirumuskan melalui tema: “Peningkatan kapasitas manajerial dan bisnis, tata kelola koperasi dan UMKM”. Relevansi tema riset unggulan institusi dan fakultas ekonomi dan bisnis tercermin melalui topik: “Penguatan kelembagaan dan korporasi melalui pengembangan manajerial”. Tema penguatan kelembagaan dan korporasi dapat disinergikan dengan tema lainnya yaitu “Penguatan Kelembagaan UMKM”, hal ini memiliki relevansi dalam membangun riset inovatif sebagaimana periset usulkan dalam judul Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT).

Tabel 2.1: Roadmap riset tema unggulan: Peningkatan kapasitas manajerial dan bisnis, tata kelola, inovasi koperasi & UMKM berbasis kearifan.....



Thn	Tema Penelitian Unggulan & Topik Penelitian Program Studi Manajemen		
	Kewirausahaan, tata kelola koperasi UMKM & Pemanfaatan TIK	Industri kreatif & pariwisata berbasis kearifan lokal	Pengentasan kemiskinan & pengembangan Ekonomi
2018	Peningkatan kewirausahaan & tata kelola koperasi, UMKM dan TIK	Model pengelolaan potensi ekonomi wilayah berbasis kearifan lokal	Pemetakan potensi kewirausahaan & pemberdayaan masyarakat miskin desa
2019	Penguatan manajerial & tata kelola kelembagaan koperasi/UMKM	Penguatan manajerial & kelembagaan industri kreatif dan pariwisata berbasis kearifan lokal	Model penguatan kewirausahaan masyarakat miskin pedesaan/perkotaan

2020	Daya saing berkelanjutan koperasi/UMKM & pemanfaatan TIK	Strategi penguatan bisnis industri kreatif & pariwisata dan pemanfaatan TIK	Model peningkatan produktivitas usaha masyarakat miskin pedesaan/perkotaan
2021	Model kemitraan strategis koperasi UMKM berkelanjutan	Model kemitraan industri kreatif & pariwisata dan pemanfaatan TIK	Kolaborasi civil society, akademisi, pemerintah dlm pengembangan ekonomi
2022	Inovasi keunggulan kompetitif dan kinerja koperasi/UMKM	Inovasi keunggulan kompetitif & kinerja industri kreatif/pariwisata dengan pemanfaatan TIK	Inovasi pengembangan kewirausahaan & peningkatan kesejahteraan masyarakat

Merujuk *roadmap* riset tersebut diatas menunjukkan bahwa judul penelitian: “Pengembangan model dan Optimalisasi Pengelolaan Sentra UMKM Pada Kawasan Wisata Religi Di Jawa Timur”. Judul ini mendukung terwujudnya riset unggulan tentang penguatan kelembagaan dan korporasi, sehingga judul penelitian ini turun mempercepat capaian rencana strategis penelitian perguruan tinggi agar menjadi pusat keunggulan dalam menghasilkan sebuah inovasi dalam penelitian.

2.7.3 Pentingnya Riset yang Diusulkan

Penelitian Model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan sentra UMKM merupakan langkah strategis dalam rangka mendorong pengembangan perekonomian masyarakat, sehingga kegiatan sentra UMKM mampu menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkontribusi riil bagi kesejahteraan di Jawa Timur. Peran *stakeholder* dalam pengelolaan sentra UMKM saat ini masih belum optimal, hal ini menjadi penyebab mengapa *stakeholder* UMKM belum mampu memainkan perannya dalam pengelolaan sentra UMKM, oleh karena itu perlunya diteliti tentang: Model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan sentra UMKM, Model pengembangan usaha yang selaras dengan karakteristik UMKM.

2.7.4 Roamap Penelitian Tahun 2010-2020

Grand desain penelitian unggulan Universitas tentang: “Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan UMKM dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi” dan topik riset unggulan Fakultas Ekonomi dan Bisnis tentang: “Pengembangan sistem Manajemen Koperasi dan UMKM”, maka penelitian ini sudah relevan dengan rencana strategis penelitian universitas dengan judul: “Pengembangan model dan optimalisasi pengelolaan sentra UMKM

pada kawasan wisata religi di Jawa Timur” adapun roadmap penelitian dapat di tampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2: Roadmap Penelitian (tahun 2010-2020)

Tahun	Kegiatan	Luaran	Indikator
2010	Penelitian Fundamental: Tentang orientasi pelanggan dan orientasi pesaing produk makanan (pemasaran)	Laporan penelitian, seminar dan jurnal terakreditasi nasional (Ekuitas Vol. 14 No. 3, September 2010)	Memberi landasan dasar dalam menentukan tema dan permasalahan penelitian lanjutan
2011	Penelitian Fundamental: Tentang inovasi dan kualitas produk perusahaan <i>consumer goods</i>	Laporan penelitian, seminar dan jurnal terakreditasi nasional (Ekuitas Vol. 15 No. 4, September 2011)	Memberi landasan dasar dalam menentukan tema dan permasalahan penelitian lanjutan
2012	Penelitian Hibah Bersaing: Tentang iklim investasi di era otonomi daerah berorientasi kemakmuran masyarakat	Laporan penelitian, seminar hasil penelitian	Memberi landasan dasar dalam menentukan tema dan permasalahan penelitian lanjutan
2015	Penelitian Fundamental: Tentang inovasi teknologi dan kualitas produk perusahaan makanan	Jurnal <i>Growth</i> , Vol 1, No.2 hal 1-14, Desember 2015 ISSN. 2460-5204	Memberi landasan dasar dalam menentukan tema dan permasalahan penelitian lanjutan
2016	Penelitian Unggulan PT: Pengembangan model usaha sektor UMKM	Jurnal internasional, seminar hasil penelitian	Memperkuat landasan tema dan permasalahan penelitian lanjutan sektor UMKM
2017	Penelitian Unggulan PT: Pengembangan model pengelolaan sentra UMKM	Jurnal internasional, seminar hasil penelitian, bahan ajar	Memperkuat landasan tema dan permasalahan penelitian lanjutan sektor UMKM
2018	Penelitian Unggulan PT: Pengembangan model peran <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan sentra UMKM	Jurnal internasional, seminar hasil penelitian, bahan ajar	Memperkuat landasan tema dan permasalahan penelitian lanjutan sektor UMKM
2019	Penelitian Unggulan PT: Pengembangan usaha sentra UMKM pada kawasan religi	Jurnal internasional, seminar hasil penelitian, bahan ajar	Memperkuat landasan tema dan permasalahan penelitian lanjutan sektor UMKM
2020	Penelitian Unggulan PT: Pengembangan model pendanaan sektor UMKM	Jurnal internasional, seminar hasil penelitian, bahan ajar	Memperkuat landasan tema dan permasalahan penelitian lanjutan sektor UMKM

Sumber: Penulis

Roadmap Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 2017-2019

Tahun pertama 1-2017	Tahun kedua 2-2018	Tahun ketiga 3-2019
(a) identifikasi pengelolaan sentra UMKM (b) memetakan model pengelolaan sentra UMKM (c) merumuskan model pengelolaan sentra UMKM (d) menguji efektivitas model pengelolaan sentra UMKM (e) evaluasi model pengelolaan sentra UMKM (f) menyempurnakan model pengelolaan sentra UMKM	(a) identifikasi peran <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan sentra UMKM (b) merumuskan model optimalisasi peran <i>stakeholder</i> (c) menguji efektivitas model (d) evaluasi dan perbaikan model, (e) menyempurnakan model optimalisasi peran <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan sentra UMKM pada kawasan wisata religi di Jawa Timur.	(a) identifikasi pengembangan usaha sentra UMKM (b) merumuskan peluang usaha sentra UMKM yang relevan (c) menyusun profil sentra UMKM di kawasan wisata religi (d) membangun pusat informasi terpadu sentra UMKM pada kawasan wisata religi di Jawa Timur
Jurnal ilmiah internasional, pemakalah, paten sederhana, perekayasa sosial dan buku ajar	Jurnal ilmiah internasional, pemakalah, paten sederhana, perekayasa sosial dan buku ajar	Jurnal ilmiah internasional, pemakalah, paten sederhana, perekayasa sosial dan buku ajar

BAB. 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah merumuskan suatu model tentang “Optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan Sentra UMKM pada kawasan wisata religi di Jawa Timur”. Sedangkan target akhir dari penelitian ini adalah meningkatkan peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM pada kawasan wisata religi agar UMKM menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan mampu memberikan kontribusi riil bagi kesejahteraan masyarakat dan warga sekitarnya. Tujuan penelitian tahun kedua merupakan rangkaian tujuan yang tidak terpisahkan dengan tujuan tahun sebelumnya dan tujuan penelitian pada tahun ketiga, jika hal ini terlaksana, maka dalam kurun waktu tiga hasil akhir yang dicapai adalah terciptanya model pengelolaan UMKM yang efektif dan model optimalisasi peran *stakeholder* yang dalam pengelolaan UMKM yang layak, sehingga pengembangan usaha sektor UMKM akan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri serta berkontribusi riil bagi kesejahteraan masyarakat dan menguatnya ekonomi regional tentu akan memberi dampak langsung maupun tidak langsung bagi perekonomian nasional. Adapun langkah langkah untuk mencapai tujuan khusus tersebut harus dilakukan melalui tahapan tujuan penelitian sebagai berikut:

Tujuan tahun kedua (2)

1. Mengidentifikasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan sentra UMKM pada kawasan wisata religi di Jawa Timur
2. Merumuskan Model Optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan sentra UMKM pada kawasan wisata religi di Jawa Timur

Tujuan tahun ketiga (3)

1. Mengidentifikasi karakteristik usaha sentra UMKM pada kawasan wisata religi di Jawa Timur
2. Merumuskan model pengembangan usaha yang relevan dengan sentra UMKM pada kawasan wisata religi di Jawa Timur
3. Merumuskan model pusat informasi terpadu sentra UMKM pada kawasan wisata religi di Jawa Timur

3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan tersebut diatas, maka penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi *stakeholder*, memberi alternatif pengembangan model optimalisasi dalam pengelolaan sentra UMKM pada kawasan wisata religi yang lebih efektif, sehingga dapat digunakan sebagai panduan dalam pengelolaan usaha UMKM yang lebih baik, dalam rangka mendorong peningkatan usahanya menjadi lebih efektif dan tumbuh berkembang serta meningkatkan daya saing usahanya menjadi lebih unggul.
- b. Bagi Pelaku UMKM, memperoleh dukungan moral dan motivasi baru dalam bentuk partisipasi dalam suatu model pengelolaan sentra UMKM kawasan wisata religi yang lebih efektif, sehingga dapat digunakan sebagai panduan, bermitra dalam perbaikan manajemen pengelolaan sentra UMKM yang lebih baik dalam rangka mendorong peningkatan usahanya menjadi lebih efektif dan tumbuh berkembang usaha sentra UMKM.
- c. Bagi Penulis, memberi alternatif pemikiran dan solusi atas berbagai problem dan isu isu yang sedang berkembang ditengah masyarakat kita, khususnya yang terkait dengan pengelolaan sentra UMKM pada kawasan wisata religi di Jawa Timur, mengingat kawasan ini menjadi rujukan daya tarik wisata bagi masyarakat yang memiliki budaya ziarah ke makam para wali, auliyah dan ulama besar yang dipercaya memiliki karomah dimasa hidupnya ataupun nilai spiritual yang tinggi pada jamannya, sehingga budaya masyarakat ini dapat mendorong wisatawan pada kawasan wisata religi terus meningkat, sehingga mendorong perlunya pengelolaan sentra UMKM yang efektif pada kawasan wisata religi tersebut.
- d. Bagi Masyarakat, memberikan model partisipasi dari berbagai elemen baik birokrasi, lembaga pembiayaan, lembaga perguruan tinggi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sentra UMKM yang efektif sehingga dapat mendorong tumbuh dan berkembang sentra UMKM kawasan lainnya. Model ini memiliki kecenderungan model yang sama dengan karakteristik sentra UMKM yang berada di tengah masyarakat kita. Dengan memanfaatkan model ini diharapkan mengurangi ketidak pastian pengelolaan yang tidak memiliki

suatu model, sehingga dapat meningkatkan pengelolaan aktivitas usahanya yang lebih efektif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan usaha yang lebih baik serta berkontribusi riil bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB. 4 METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan alasan bahwa penelitian ini ingin menyelesaikan satu permasalahan yang terkait dengan pengelolaan UMKM yang bersifat holistik melalui pola optimalisasi peran *stakeholder*, oleh karena itu fokus terhadap permasalahan menjadi sangat penting. Penelitian ini memerlukan pendalaman kajian/fokus dengan nara sumber secara langsung sehingga tidak memungkinkan dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. *Stakeholder* dalam pengelolaan UMKM pada kawasan wisata religi memerlukan keterlibatan secara langsung sebagai aktor utama, bertemu langsung ditempatnya dan dapat mengungkap peranan yang dilakukan dalam pengelolaan UMKM, agar mampu memaknai hal tersebut secara lengkap dengan sang pelaku/*stakeholder* tentang sejauhmana peran yang telah dilakukan saat amatan terjadi, khususnya dalam rangka memberi satu andil terhadap pengelolaan UMKM.

Penentuan fokus menjadi sangat penting, agar penelitian dapat mengarah target yang diinginkan yaitu merumuskan model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM yang efektif pada kawasan wisata religi di Jawa Timur. *Stakeholder* memiliki peran strategis dalam pengembangan pengelolaan UMKM yang terdiri dari dinas Koperasi dan UMKM, dinas pariwisata, lembaga perbankan, lembaga perguruan tinggi dan masyarakat. Secara umum empat fokus kajian tersebut meliputi aspek: a) kebijakan pengembangan UMKM, b) layanan sentra UMKM, c) pelatihan UMKM, d) pendampingan bisnis UMKM, e) bina mitra untuk pengembangan UMKM, f) program penyaluran dan pengelolaan kredit, g) riset dan pengembangan UMKM h) kebijakan kurikulum kewirausahaan/magang mahasiswa dan i) publikasi ilmiah terkait UMKM, sehingga optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM dapat di pergunakan sebagai acuan bagi pelaku UMKM untuk mengelola usahanya menjadi lebih efektif, sehingga dapat mendorong kemandirian UMKM sebagai kekuatan ekonomi alternatif masyarakat dan memberi kontribusi riil bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi warga kawasan wisata religi di Jawa Timur.

4.2 Obyek dan Nara Sumber

Obyek dalam penelitian ini adalah situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat, pelaku dan aktivitas (Spradley dalam Sugiyono, 2016: 215), dengan demikian yang menjadi obyek penelitian ini adalah model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengembangan pengelolaan sentra UMKM yang berada pada kawasan wisata religi di Jawa Timur. Peran *stakeholder* yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri dari Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas pariwisata, lembaga keuangan bank, lembaga pendidikan tinggi serta peran masyarakat, dengan lokasi pengelolaan UMKM kawasan wisata makam Sunan Ampel, Syeh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri, sunan Drajad dan Sunan Bonang.

Nara sumber atau informan merupakan pihak yang terkait dengan obyek penelitian, oleh karena itu penentuan nara sumber menjadi sangat penting untuk menjamin validitas data yang diperlukan. Kualitas nara sumber ditentukan oleh sampel sumber datanya yaitu bagaimana memilih nara sumber yang mumpuni dan layak memberikan data yang diperlukan untuk mengungkap model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM yang berada pada kawasan wisata religi di Jawa Timur. Untuk memenuhi syarat kualitas nara sumber, maka dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai sampel sumber data terdiri dari kepala dinas/ kepala sub bagian dinas koperasi dan UMKM, kepala dinas/kepala sub bagian dinas pariwisata, pimpinan cabang/anak cabang bank serta dekan/ketua program studi dari lembaga perguruan tinggi yang kesemuanya berkedudukan di Surabaya, Gresik, Lamongan dan Tuban, dimana keempat kota tersebut merupakan lokasi UMKM kawasan wisata Religi makam sunan Ampel, sunan Giri, Syeh Maulana Malik Ibrahim, sunan Drajad dan sunan Bonang.

4.3 Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, oleh karena itu peneliti harus memenuhi kriteria validasi yaitu sejauhmana peneliti siap untuk melakukan penelitian lapangan, memahami metode penelitian, memahami obyek penelitian baik secara akademik maupun logika. Instrumen penelitian ini terbagi menjadi dua kelompok peneliti yaitu instrumen peneliti dari kalangan *stakeholder* yang berkedudukan sama dengan keberadaan kawasan wisata religi yang terdiri

pimpinan dinas koperasi, dinas pariwisata, pimpinan bank serta ketua program studi. Sedangkan instrumen peneliti kedua dari kalangan akademisi dalam hal ini diwakili oleh Universitas Narotama yang lebih banyak berperan dalam mendesain konsep penelitian, menyiapkan kerangka berpikir, menentukan obyek dan nara sumber serta melakukan pengumpulan data dan analisis data.

Instrumen penelitian harus tertuang dalam organisasi yang jelas, agar penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan mekanisme kerja dan jadwal yang telah ditentukan. Peneliti dari kalangan akademisi harus bermitra dan berkolaborasi untuk menghasilkan suatu penelitian kerjasama, agar permasalahan yang bersifat holistik dapat dipecahkan secara komprehensif, oleh karena itu kedua pihak harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan sosial tersebut. Kedua pihak peneliti akan melakukan fungsi penelitian sesuai dengan domain yang dikuasainya, sehingga dapat dihasilkan penelitian yang sangat besar manfaatnya yaitu berupa perumusan model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengembangan pengelolaan UMKM yang efektif pada kawasan wisata religi di Jawa Timur yaitu kawasan makam Sunan Ampel, Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri, sunan Drajad dan Sunan Bonang.

4.4 Sampel Sumber Data

Sampel sumber data merupakan proses pemilihan sumber data/informan yaitu bagaimana cara menentukan orang-orang yang akan menjadi sumber data. Sumber data adalah pihak-pihak yang akan diamati dan digali informasinya, beliau dipandang layak mengetahui tentang situasi sosial yang diamati. Sampel sumber data dilakukan secara *purposive* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel sumber data dalam penelitian ini adalah kepala dinas/ kepala sub bagian dinas koperasi dan UMKM, kepala dinas/kepala sub bagian dinas pariwisata, pimpinan cabang/ anak cabang bank serta dekan/ketua program studi dari lembaga perguruan tinggi yang dipandang mengetahui dengan benar tentang pihak *stakeholder* yang berperan dalam pengembangan pengelolaan sentra UMKM pada kawasan wisata religi. Dalam sampel ini tidak ditentukan jumlah orang tetapi sejauhmana data dianggap valid untuk menjelaskan berbagai aspek yang terkait dengan model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengembangan pengelolaan

UMKM kawasan wisata religi. Sampel sumber data diperlukan untuk memperoleh data yang valid, oleh karena itu sumber data harus berasal dari *stakeholder* yang terkait peranannya dalam pengembangan pengelolaan UMKM kawasan wisata religi. Kompilasi kedua sumber data tentu akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana merumuskan model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengembangan pengelolaan UMKM yang efektif pada kawasan wisata religi di Jawa Timur.

4.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam penelitian karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan setting alamiah (*natural setting*) yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara langsung dari nara sumber yang relevan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data diperoleh melalui empat metode yaitu:

1. Observasi yaitu memperoleh data dengan cara mengamati langsung terhadap hal-hal yang terkait dengan penelitian yakni mengamati peranan *stakeholder* dalam pengembangan pengelolaan UMKM pada kawasan wisata religi di Jawa Timur, sehingga dapat diperoleh gambaran secara riil dan alami tanpa adanya intervensi dari sisi manapun.
2. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data tertulis yang berasal dari berbagai sumber dokumen yang terkait dengan peran *stakeholder* dalam pengembangan pengelolaan UMKM atau dokumen lainnya yang relevan dengan keperluan data. Metode dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan mempelajari dan menganalisa sejumlah bahan-bahan tertulis, baik yang berasal dari pendapat para ahli, peraturan yang berlaku serta literatur literatur yang dianggap memiliki relevansi dengan penelitian dan dokumen yang terkait dengan masalah yang dikaji yang mana dokumen tersebut dapat berupa catatan, gambar/photo dan sumber lainnya.
3. Wawancara, yaitu pengumpulan data melalui wawancara terstruktur yaitu dengan menggunakan panduan kuesioner yang telah disediakan guna untuk memperoleh data kuantitatif serta dilakukan pendalaman melalui wawancara

agar dapat menggali informasi lebih dalam dengan kuesioner terbuka untuk memperoleh data kualitatif.

4. Triangulasi, yaitu cara pengumpulan data melalui penggabungan tiga metode tersebut di atas dengan harapan akan terjadi crosscek data dan dihasilkan data yang berkualitas dan valid.

Nara sumber dalam penelitian adalah pimpinan atau pihak lain yang memiliki kualifikasi untuk memberikan informasi yang valid terkait dengan peran para *stakeholder* dalam pengembangan pengelolaan UMKM terutama pihak yang di pandang sangat mumpuni dan layak memberikan data yang diperlukan untuk merumuskan solusi atas permasalahan yang sedang diteliti.

4.6 Teknik Pengujian keabsahan Data.

Untuk menjamin tingkat kepercayaan data yang telah dikumpulkan dengan teknik teknik tertentu, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengecekan terhadap keabsahan data. Tohirin (2012: 71) menyatakan bahwa kebenaran data penelitian kualitatif dapat ditentukan dengan cara: 1) *credibility* 2) *transferability*, 3) *dependability* dan 4) *confirmability*.

1. *Credibility* (derajat kepercayaan)

Kredibilitas adalah suatu kriteria yang harus dipenuhi agar data yang diperoleh peneliti benar benar mengandung kebenaran, kredibilitas dapat di peroleh melalui kegiatan memeriksa keabsahan data sampai seberapa jauh tingkat kepercayaannya dengan cara melakukan *member check* (pengecekan anggota), *triangulation* (trianggulasi), dan diskusi teman sejawat. Kegiatan pengecekan anggota adalah kegiatan memeriksa kembali catatan lapangan yang peneliti berikan, baik berupa hasil observasi maupun wawancara agar data yang di berikan menjadi lebih sesuai dengan apa yang dimaksud kemudian diperiksa, diperbaiki, ditambah dan dikurangi setelah itu responden menandatangani hasil wawancara. Untuk menjamin validitas data di uji dengan “*triangulasi data*“. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan : a) triangulasi metode, yaitu data yang sama dicari dengan metode yang berbeda, b) triangulasi sumber yaitu data yang sama dicari dengan sumber yang berbeda. Diskusi dengan teman sejawat

dilakukan dengan membicarakan data dari temuan-temuan yang didapat dengan rekan sejawat.

2. *Transferability* (keteralihan)

Transferabilitas, yaitu sejauh mana hasil penelitian dapat dialihkan pada situasi lain atau suatu hasil penelitian berpeluang untuk dialihkan pada konteks lain. Peneliti akan mencari dan mengumpulkan kejadian empiris sehingga tersedia data deskriptif tentang situasi penelitian yang dilakukan secara utuh, menyeluruh, lengkap, mendalam dan terinci.

3. *Dependability* (ketertanggung)

Dependability, dalam penelitian kualitatif konsep *dependability* menjadi bahan pertimbangan dalam menilai keilmiahannya suatu penelitian kualitatif, yaitu sejauh mana temuan kualitatif memperlihatkan konsistensi hasil temuan ketika hal yang sama dilakukan oleh peneliti lain dengan waktu yang berbeda tetapi dilakukan dengan metode yang sama. Agar penelitian ini dapat dipertahankan, dipercaya serta dipertanggung jawabkan hasilnya secara ilmiah, maka dalam pelaksanaannya memerlukan uji keakuratan capaian hasil penelitian yang akan memberikan pertimbangan khusus. Dependabilitas akan dipergunakan untuk menilai proses yang telah ditempuh dan dilakukan oleh *dependent auditor*.

4. *Confirmability* (kepastian)

Confirmability, dalam penelitian kualitatif lebih dimaknai sebagai suatu konsep inter-subjektivitas atau konsep transparansi, yaitu kesediaan peneliti untuk mengungkap secara terbuka tentang proses dan elemen-elemen penelitiannya sehingga memungkinkan pihak lain atau peneliti lain melakukan penilaian tentang hasil-hasil temuannya. Beberapa peneliti kualitatif lebih mengarahkan kriteria konfirmabilitas dalam rangka menemukan kesamaan pandangan dan pendapat terhadap topik yang diteliti atau menitik beratkan pada pertanyaan sejauh mana dapat diperoleh persetujuan diantara beberapa peneliti mengenai aspek yang sedang dipelajari (Long & Jhonson, 2000).

Keabsahan data merupakan upaya peneliti untuk menemukan data yang valid (terpercaya akurasi), agar data yang dikumpulkan dapat dipergunakan untuk mendeskripsikan kondisi riil yang diamati oleh peneliti dan menjadi satu dasar untuk merumuskan suatu model yang baik.

4.7 Satuan Kajian (fokus amatan)

Penelitian kualitatif lebih bersifat holistik, oleh karena itu perlunya dibatasi masalah penelitiannya dengan cara menentukan fokus amatannya dengan langkah berikut: a) identifikasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM kawasan wisata religi serta b) merumuskan model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM yang Efektif pada kawasan wisata religi, oleh karena itu fokus dalam penelitian ini meliputi empat kajian yang terkait dengan model optimalisasi pengelolaan UMKM yaitu: a) peran dinas koperasi, b) peran dinas pariwisata, c) peran lembaga perbankan dan d) lembaga pendidikan tinggi.

4.7.1 Peran Dinas Koperasi dan UMKM

Peran dinas koperasi dan UMKM, merupakan serangkaian kebijakan atau upaya riil yang dilakukan oleh dinas koperasi dan UMKM dalam rangka untuk mendorong tercapainya praktek pengelolaan UMKM pada kawasan wisata religi di Jawa Timur yang optimum, oleh karena itu optimalisasi peran dinas koperasi dan UMKM dalam mendukung pengembangan pengelolaan UMKM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan implementasi pengelolaan UMKM yang berada di kawasan wisata religi, sehingga diperlukan optimalisasi peran riil dan konstruktif dari dinas koperasi dan UMKM agar pengelolaan UMKM kawasan wisata religi menjadi berdayaguna dan nilai ekonominya menjadi lebih tinggi sehingga memberi kontribusi riil bagi kesejahteraan masyarakatnya. Peran dinas koperasi UMKM meliputi lima aspek yaitu: a) kebijakan pengembangan UMKM, b) program klinik/sentra layanan UMKM, c) program pelatihan pelaku UMKM, d) program pendampingan pelaku UMKM dan e) program bina mitra dalam pengembangan UMKM.

4.7.2 Peran Dinas Pariwisata

Peran dinas Pariwisata, merupakan serangkaian kebijakan atau upaya riil yang dilakukan oleh dinas pariwisata dalam rangka untuk mendorong tercapainya praktek pengelolaan UMKM pada kawasan wisata religi di Jawa Timur yang optimum, oleh karena itu optimalisasi peran dinas pariwisata dalam mendukung pengembangan pengelolaan UMKM merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dengan implementasi pengelolaan UMKM yang berada di kawasan wisata religi, sehingga diperlukan optimalisasi peran riil dan konstruktif dari dinas pariwisata agar pengelolaan UMKM kawasan wisata religi menjadi berdayaguna dan nilai ekonominya menjadi lebih tinggi sehingga memberi kontribusi riil bagi kesejahteraan masyarakatnya. Aspek peran dinas pariwisata meliputi: a) kebijakan pengembangan UMKM, b) program klinik/sentra layanan UMKM, c) program pelatihan bagi pelaku UMKM, d) program pendampingan bagi pelaku UMKM dan e) program bina mitra dalam pengembangan UMKM.

4.7.3 Peran Lembaga Perbankan

Peran lembaga perbankan, merupakan serangkaian kebijakan atau upaya riil yang dilakukan oleh lembaga perbankan dalam rangka untuk memberi dorongan tercapainya praktek pengelolaan UMKM pada kawasan wisata religi di Jawa Timur yang optimum, oleh karena itu optimalisasi peran lembaga perbankan dalam mendukung pengembangan UMKM merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dengan implementasi pengelolaan UMKM yang berada di kawasan wisata religi, sehingga diperlukan optimalisasi peran riil dan konstruktif dari lembaga perbankan agar pengelolaan UMKM kawasan wisata religi menjadi berdayaguna dan nilai ekonominya menjadi lebih tinggi sehingga memberi kontribusi riil bagi kesejahteraan masyarakatnya. Peran lembaga perbankan terdiri lima aspek yaitu: a) kebijakan pengembangan UMKM, b) program penyaluran dan pengelolaan kredit, c) program klinik manajemen pelaku UMKM, d) program pendampingan/kunjungan pada pelaku UMKM dan e) program bina mitra dalam pengembangan UMKM.

4.7.4 Peran Lembaga Perguruan Tinggi

Peran lembaga perguruan, merupakan serangkaian kebijakan atau upaya riil yang dilakukan oleh kalangan perguruan tinggi dalam rangka untuk mendorong dan mewujudkan tercapainya praktek pengelolaan UMKM pada kawasan wisata religi di Jawa Timur yang optimum, oleh karena itu optimalisasi peran perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan pengelolaan UMKM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan implementasi pengelolaan UMKM yang berada di

kawasan wisata religi, sehingga diperlukan optimalisasi peran riil dan konstruktif dari lembaga perguruan tinggi agar pengelolaan UMKM kawasan wisata religi menjadi berdayaguna dan nilai ekonominya menjadi lebih tinggi sehingga dapat memberikan kontribusi riil bagi kesejahteraan masyarakatnya. Peran lembaga perguruan tinggi terdiri tujuh aspek yaitu: a) kebijakan kurikulum kewirausahaan dan program magang mahasiswa, b) program klinik/sentra layanan bagi UMKM, c) program pelatihan bagi pelaku UMKM, d) program pendampingan bagi pelaku UMKM e) program bina mitra dalam pengembangan UMKM, f) program riset & pengembangan UMKM dan g) program publikasi ilmiah terkait UMKM.

Peran *stakeholder* dalam pengembangan pengelolaan UMKM yang terdiri delapan aspek tersebut semuanya bersinggungan dengan aspek manajemen, oleh karena itu peran *stakeholder* dalam pengembangan UMKM lebih dititik beratkan pada permasalahan manajemen karena permasalahan yang krusial bagi UMKM adalah lemahnya praktek manajemen, khususnya aspek manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen proses, akses teknologi dan informasi serta aspek jejaring dan kemitraan. Aspek manajemen sumber daya manusia dan manajemen keuangan lebih berorientasi langsung dengan pelaku UMKM sedangkan aspek manajemen pemasaran lebih berorientasi pada konsumennya, sehingga aspek ini harus segera memperoleh perhatian yang lebih serius dari para pemangku kepentingan agar UMKM kawasan wisata religi ini dapat tumbuh berkembang dengan layak.

Aspek manajemen pemasaran merupakan bagian utama dan paling penting dalam pengelolaan UMKM karena menyangkut aspek individu dan setiap pelaku UMKM memiliki karakteristik yang berbeda beda, namun karakteristik ini dapat dimodelkan menjadi sebuah kebijakan yang bersifat universal, oleh karena itu aspek ini harus *ter-integrated* dengan aspek lainnya agar seluruh aspek yang ada dapat memberi dukungan yang lebih optimal terhadap pengembangan UMKM di kawasan wisata religi tersebut. Aspek pemasaran harus menyentuh pada perilaku dan sikap dari pelaku UMKM sendiri, karena hal ini akan turut menentukan sikap dan perilaku masyarakat yang datang di kawasan wisata untuk berbelanja dan membeli produk produk yang ditawarkan oleh mereka, oleh karena itu perlunya program pelatihan, pendampingan dan pengembangan aspek pemasaran secara

berkelanjutan agar memberikan manfaat jangka panjang serta mendorong kemandirian ekonomi bagi pelaku sentra UMKM di kawasan wisata religi di Jawa Timur, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan usaha serta kesejahteraan bagi masyarakat.

4.8 Teknik Analisis Data

Perumusan suatu model harus dilakukan melalui tahapan analisis data agar model dapat dirumuskan secara sistematis, logis dan empiris, oleh karena itu diperlukan tahapan yang jelas dan terstruktur. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis atas data yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara di lapangan, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam suatu pola, menseleksi data yang perlu dipelajari dan membuat suatu simpulan. Analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi suatu hipotesis. Jika hal ini dapat diuji dengan berulang ulang dan hasil yang diuji tetap konsisten, maka hipotesis akan berkembang menjadi teori (Nasution dalam Sugiyono, 2009: 244)

Analisis data dalam perumusan model ini dilakukan dengan menggunakan model analisis domain yaitu memberikan gambaran yang umum dan menyeluruh tentang peran *stakeholder* dalam pengembangan pengelolaan UMKM yang telah diterapkan oleh pelaku UMKM di kawasan wisata religi. Analisis data bertujuan untuk mendeskripsikan obyek yang diteliti secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga diperoleh gambaran obyek secara holistik. Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap tahapan analisis data, maka dapat penulis sajikan tahapan analisis ini secara detail dan rinci agar memudahkan dalam pengumpulan data, mendiskripsikan hasil penelitian, menganalisis data, membuat kesimpulan/saran serta membuat rekomendasi bagi pengambilan kebijakan maupun bagi kelanjutan penelitian dimasa mendatang dan pengembangan model baru yang lebih aplikatif dan efektif untuk pengembangan UMKM dimasa mendatang.

Tahapan perumusan model meliputi: a) mengidentifikasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM yang diterapkan pada kawasan wisata religi di Jawa Timur, (b) memetakan model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan

UMKM pada kawasan wisata religi, (c) merumuskan model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM yang efektif pada kawasan wisata religi (d) menguji efektivitas model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM pada kawasan wisata religi, (e) mengevaluasi model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM melalui *focus group discussssion* guna melakukan penyempurnaan model yang aplikatif (f) memperbaiki rumusan model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM yang lebih layak untuk diimplementasikan pada kawasan wisata religi di Jawa Timur.

4.8.1 Rancangan dan Metode Penelitian

Rancangan dan metode penelitian tahun kedua merupakan kelanjutan dari proses penelitian yang telah dilakukan pada tahun pertama, oleh karena tahapan rancangan dan metode penelitian ini tidak terpisahkan dengan rancangan dan metode pada tahun pertama, sehingga hasil luarannya menjadi bagian yang terus *ter-integrated* selama kurun waktu tiga tahun agar memberi manfaat yang optimal. Rumusan model tahun kedua merupakan lanjutan dalam rumusan tahun pertama sehingga secara menyeluruh menjadi bagian yang tidak terpisahkan, adapun secara rinci pelaksanaan penelitian tahun kedua dapat diuraikan dalam tabel tabel: 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1: Rancangan dan Metode Rumusan Model tahun kedua (2)

Aspek Yang Diteliti	Rancangan Penelitian	Metode Penelitian	Indikator Capaian
a. Identifikasi peran <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan sentra UMKM pada kawasan wisata religi	Desain kuesioner untuk mengidentifikasi peran <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan sentra UMKM pada kawasan wisata religi di Jawa Timur	Menentukan nara sumber/responden dgn cara tertentu pada pihak <i>stakeholder</i> yang terkait dengan pengelolaan lima lokasi sentra UMKM kawasan wisata religi	Dapat diidentifikasi keterlibatan pihak <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan sentra UMKM yang berada pada kawasan wisata religi di Jawa Timur
b. merumuskan model optimalisasi peran <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan sentra UMKM pada kawasan wisata religi	Merumuskan model optimalisasi peran pihak <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan sentra UMKM pada kawasan wisata religi	Menentukan satuan kajian untuk rumusan model optimalisasi peran <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan sentra UMKM pada kawasan wisata religi	Dapat dirumuskan suatu model optimalisasi peran <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan sentra kawasan wisata religi di Jawa Timur
c. menguji efektivitas model optimalisasi peran <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan sentra UMKM	Desain sampel untuk menguji tingkat tingkat efektivitas optimalisasi peran <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan UMKM pada kawasan wisata religi di Jawa Timur	Menentukan responden melalui cara tertentu untuk dijadikan sampel pengujian atas model optimalisasi peran <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan UMKM	Dapat diketahui tingkat model optimalisasi peran <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan sentra UMKM pada kawasan wisata religi di Jawa Timur

d. mengevaluasi dan memperbaiki model	Melakukan evaluasi atas model optimalisasi peran <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan sentra UMKM yang telah diujikan pihak <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam pengelolaan sentra UMKM	Melakukan evaluasi atas efektivitas model optimalisasi peran <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan sentra UMKM melalui FGD dari kalangan akademisi	Dapat diidentifikasi kelemahan model dan melakukan penyempurnaan model melalui <i>focus group discussion</i> dan dirumuskan model optimalisasi <i>peran stakeholder</i>
e. menyempurnakan model optimalisasi peran <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan sentra UMKM pada kawasan wisata religi di Jawa Timur	Merumuskan perbaikan model optimalisasi peran <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan sentra UMKM dan sosialisasi model pada pihak <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam pengelolaan sentra UMKM	Merumuskan dan melakukan perbaikan model optimalisasi peran <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan sentra UMKM serta melakukan sosialisasi model pada <i>stakeholder</i> di lima lokasi sentra UMKM	Dapat dilakukan penyempurnaan rumusan model optimalisasi peran <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan sentra UMKM sesuai dengan karakteristik sentra UMKM pada kawasan wisata religi di Jawa Timur

Sumber: Diolah oleh Peneliti

4.8.2 Langkah Perumusan Model

Kegiatan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi secara rinci dapat dijabarkan secara bertahap, dimana tahapan yang pertama selalu berkaitan dengan langkah pada tahapan berikutnya, sehingga kegiatan ini harus dilakukan secara berurutan sebagai berikut:

1. Identifikasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM

Tahapan ini mengidentifikasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan sentra UMKM, dengan cara mendesain kuesioner yang menekankan kontribusi para *stakeholder* yang terlibat dalam proses pengelolaan sentra UMKM. Kuesioner ini akan disebarakan kepada nara sumber yang ditentukan dengan cara tertentu sehingga dapat mengungkap tentang peran *stakeholder* secara komprehensif.

2. Merumuskan model optimalisasi peran *stakeholder*

Tahap ini diawali dengan memetakan jawaban nara sumber dan kuesioner yang memiliki peran terhadap pengelolaan sentra UMKM pada saat sekarang, sehingga dapat dirumuskan suatu model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan sentra UMKM. Selanjutnya memberi bobot dan nilai skoring setiap indikator yang terkait dengan peran *stakeholder*, sehingga dapat dirumuskan model pengelolaan sentra UMKM yang efektif.

3. Menguji efektivitas model optimalisasi peran *stakeholder*

Tahapan ini diawali dengan menentukan 10 tokoh masyarakat dengan cara dipilih sebagai sampel pengujian model optimalisasi peran *stakeholder* dalam

pengelolaan sentra UMKM, agar dapat diperoleh gambaran mengenai tingkat efektivitas optimalisasi peran *stakeholder*

4. Evaluasi dan perbaikan model partisipasi peran *stakeholder*

Tahap ini mengkaji dan mengidentifikasi kelemahan terkait efektivitas model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM dengan melakukan evaluasi secara mendalam terhadap sikap/pandangan dari 10 tokoh masyarakat melalui *focus group discussion* (FGD) dari kalangan akademisi sehingga dapat diketahui adanya kekurangan atau kelemahan yang terjadi sehingga dapat dirumuskan perbaikan model optimalisasi peran *stakeholder*

5. Menyempurnakan model optimalisasi peran *stakeholder*

Melakukan rumusan kembali atas model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan sentra UMKM yang lebih tepat sesuai dengan karakteristik usaha di kawasan wisata religi. Hasil rekomendasi *focus group discussion* menjadi rujukan dalam merumuskan model tentang optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan sentra UMKM yang lebih efektif untuk diterapkan pada sentra UMKM yang tersebar pada lima kawasan wisata religi di Jawa Timur.

BAB. 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Obyek amatan dalam penelitian ini adalah peran *stakeholder* yang terkait dengan pengelolaan UMKM kawasan wisata religi di Jawa Timur yang berlokasi di kawasan makam sunan Ampel, syeh Maulana Malik Ibrahim, sunan Giri, sunan Drajad dan sunan Bonang. Keberadaan wisata religi telah menginspirasi berbagai elemen masyarakat untuk mengoptimalkan peluang yang ada melalui kegiatan riil yang memberi kontribusi bagi nilai ekonomi setempat. Keanekaragaman aktivitas bisnis masyarakat turut mewarnai karakteristik usaha UMKM di kawasan wisata di Jawa Timur, sehingga membangun *brand image* yang berbeda dibandingkan dengan kawasan wisata di tempat lain.

Keaneka ragaman bisnis kawasan wisata religi umumnya terdiri dari aneka ragam jasa souvenir, jasa kuliner, perlengkapan ibadah dan kebutuhan lain, namun disisi lain pengelolaan UMKM di kawasan wisata religi masih jauh dari layak karena keterbatasan pada aspek manajemennya, oleh karena itu peran masyarakat sangat diharapkan kontribusinya dalam rangka mendorong pengembangan dan pengelolaan UMKM yang lebih baik dan efektif, sehingga mempercepat proses kemandirian UMKM sebagai pelaku ekonomi alternatif yang handal, terstruktur dan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Peran masyarakat dapat memberi dukungan dan mempercepat transformasi pengetahuan dalam proses bisnis UMKM, oleh karena itu upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat secara optimal, tentu akan turut mempercepat proses tata kelola bisnis UMKM yang efektif dan mandiri. Secara umum ada empat elemen masyarakat yang ditunggu kiprahnya dalam mendukung proses percepatan bisnis dan pengelolaan UMKM yaitu: a) peran dinas koperasi, b) peran dinas pariwisata, c) lembaga perbankan, d) lembaga perguruan tinggi. Secara umum *stakeholder* ini memainkan peran yang berbeda, tetapi perannya akan menjadi optimal manakala seluruh *stakeholder* memiliki visi dan misi yang sama dan mengikatkan diri guna memberikan dukungan dalam pengelolaan UMKM yang efektif, oleh karena itu optimalisasi peran *stakeholder* harus dirumuskan dalam suatu model.

1. Dinas Koperasi dan UMKM

Didalam nomenklatur struktur organisasi pemerintah daerah dinas koperasi dan UMKM merupakan salah satu Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang tugas utamanya mengorganisir serta mendorong pengembangan koperasi dan UMKM di wilayah kerjanya menjadi pelaku ekonomi yang kuat dan mandiri, oleh karena itu dinas koperasi memiliki peran strategis dalam membangun sistem dan model ekonomi yang tepat bagi masyarakat. Jumlah usaha mikro di Jawa Timur hampir 6.533.694 (95,58%), usaha kecil 161.827 (3,85%) dan usaha menengah 30.410 (0,57%). Hal ini menunjukkan bahwa dinas koperasi mengemban tugas yang tidak kecil, oleh karena itu dinas koperasi harus memainkan peran strategis ini untuk merumuskan suatu sistem dan model ekonomi yang tepat bagi UMKM dan memberi kontribusi riil bagi perekonomian warga yang tinggal dikawasan wisata religi Jawa Timur.

2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dalam nomenklatur struktur organisasi pemerintah daerah dinas pariwisata dan kebudayaab merupakan salah satu Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang tugas utamanya mengorganisir serta mendorong pengembangan pariwisata di wilayah kerjanya agar dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakatnya sekaligus membangun sistem ekonomi yang kuat dan mandiri di sektor pariwisata, oleh karena itu dinas pariwisata juga memiliki peran strategis dalam membangun sistem dan model ekonomi bagi masyarakat. Jumlah wisatawan nusantara di Jawa Timur telah mencapai angka 45,64 juta pengunjung (2014), 51,47 juta pengunjung (2015) diprediksi angka wisatawan menjadi 59,42 juta pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan nusantara seharusnya menjadi daya ungkit bagi ekonomi dan perkembangan bisnis UMKM, oleh karena itu dinas pariwisata layak memainkan peran strategisnya untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Melalui optimalisasi peran dinas pariwisata dan bersinergi nyata dengan lembaga lain, tentu mampu merumuskan suatu model pengelolaan UMKM yang layak dan mandiri, oleh karena itu peran *stakeholder* yang memiliki keterkaitan dengan keberlanjutan UMKM kawasan wisata religi Jawa Timur harus bersinergi dalam menyusun kebijakan yang strategis dan ter-*integrated* untuk UMKM.

3. Lembaga Perbankan

Lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang bereperan sebagai penunjang dalam sistem perekonomian terbuka, oleh karena itu keberadaan bank yang tersebar di seluruh pelosok daerah harus mampu menjadi mediaasi/perantara antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana. UMKM sebagai salah satu pelaku ekonomi belum mampu memperoleh akses dana yang memadai sesuai dengan kebutuhannya, namun selama ini akses permodalan UMKM masih belum mampu mengakses permodalan yang memadai, hal ini disebabkan keterbatasan UMKM yang berupa keterbatasan yang meliputi: aspek pengadaan bahan baku, aspek teknologi, aspek pemasaran, aspek ketenaga kerjaan, aspek permodalan, aspek prasarana dan aspek manajeral. Ketujuh aspek yang menjadi kendala klasik bagi UMKM selama ini, masih dipergunakan oleh perbankan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan dalam pemberian kredit atau akses permodalan.

Peran strategis lembaga perbankan seharusnya lebih didorong untuk tumbuh berkembangnya kemajuan UMKM, namun kendala klasik yang dialami UMKM masih belum menemukan solusi yang tepat, bahkan kebijakan perbankan sendiri masih belum dapat diterapkan saat dihadapkan pada kebijakan penyaluran kredit untuk UMKM seperti kredit kelayakan usaha, kredit tanpa anggunan dan jenis kredit lainnya, oleh karena itu penyaluran kredit untuk sektor UMKM tak akan pernah optimal selama masih menggunakan parameter *bankable*, dimana hal ini tentu akan sulit dipenuhi oleh pelaku UMKM sebagai persyaratan untuk akses permodalan, sehingga perlu ada upaya konkrit untuk memberi akses permodalan bagi UMKM dengan model yang sesuai dengan karakteristik usahanya.

4. Lembaga perguruan tinggi

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan tentu harus melakukan kegiatan tridarma secara terpadu baik bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat lebih bersentuhan secara langsung dengan berbagai aktivitas masyarakat khususnya memberi berbagai solusi atas permasalahan masyarakat. Bidang penelitian lebih diarahkan pada penemuan solusi atas berbagai problem masyarakat, oleh karena itu perguruan tinggi memiliki peran yang strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bersumber pada

nilai nilai kearifan lokal, nilai budaya masyarakat dan sumber lainnya. Sedangkan pengabdian masyarakat lebih diarahkan pada penerapan hasil penelitian yang dapat memberi kemanfaatan bagi masyarakat sesuai dengan situasi dan karakteristik yang berkembang di tengah masyarakat.

Perguruan tinggi merupakan salah satu *stakeholder* yang dapat memainkan peran yang strategis dalam pengembangan UMKM, oleh karena itu program sinergi dengan lembaga lain akan memberikan manfaat yang lebih baik dalam rangka untuk mendorong pengelolaan UMKM yang efektif dan mandiri. Program klinik layanan manajemen, program pelatihan, program pendampingan hasil pelatihan, bina mitra pengembangan UMKM dan riset serta publikasi ilmiah merupakan kompetensi dari perguruan tinggi yang dapat disumbangkan kemanfaatannya untuk pengembangan manajemen dan pengelolaan UMKM yang lebih efektif dan berkelanjutan.

5.2 Karakteristik Sentra UMKM

Sentra UMKM kawasan wisata religi di Jawa Timur memiliki karakteristik dan keunikan sendiri dibanding sentra UMKM lain, terutama yang terkait dengan pelaku UMKM, lokasi usaha, komoditi barang dagangannya, siklus pembelinya. Karakteristik dan keunikan sentra UMKM kawasan wisata religi tercermin pada nuansa agamis dan kultur Jawa kunonya, oleh karena itu nilai kearifan lokal dan karakteristik budaya turut mewarnai keunikan sentra UMKM di kawasan wisata religi ini. Beberapa karakteristik sentra UMKM kawasan wisata religi ini dapat diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

5.2.1 Pelaku UMKM

Pelaku usaha pada sentra UMKM kawasan wisata religi umumnya berasal dari masyarakat sekitar kawasan. Sejak lama mereka bertempat tinggal bahkan usaha yang dilakukan sudah turun temurun sejak dari nenek moyangnya, hal ini yang menjadi opsesi mereka berbisnis (melanjutkan usaha keluarga) sehingga sulit mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi. Peran birokrasi dan tokoh dari masyarakat seharusnya mampu memperdayakan potensi kawasan wisata religi ini menjadi kekuatan riil dibidang ekonomi, meningkatkan kontribusi dalam memacu perkembangan pariwisata religi ditempatnya, sehingga keberadaan situs makam

para wali songo yang ada di Jawa Timur dapat dioptimalkan manfaatnya secara riil bagi kesejahteraan masyarakat.

Pelaku usaha sentra UMKM kawasan wisata religi umumnya dilakukan oleh kelompok usaha non formal artinya dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tidak memiliki status usaha badan hukum. Pelaku usaha dikawasan ini menjadikan aktivitas usahanya hanya sumber mata pencaharian saja, belum berorientasi bisnis sehingga karakteristik pengelolaannya juga dilakukan secara sederhana, belum memanfaatkan pengetahuan manajemen sebagai alat untuk pengembangan bisnis, oleh karena itu masih membutuhkan pelatihan, pendampingan dan pengembangan usahanya dari kalangan birokrasi, kalangan bisnis serta penggiat UMKM sehingga kedepannya pelaku UMKM kawasan wisata ini dapat berkembang secara mandiri dan menjadikan UMKM sebagai alternatif mesin penggerak perekonomian.

5.2.2 Lokasi Sentra UMKM

Lokasi sentra UMKM umumnya berada di sekeliling kawasan wisata religi, lokasi ini sulit dikelola dan ditata secara memadai karena berada di pemukiman warga yang padat, status tanah yang sulit dibebaskan, seandainya dikembangkan menjadi kawasan modern membutuhkan keberanian dari birokrasi, menghadapi tantangan dari masyarakat serta membutuhkan alokasi dana yang besar. Namun jika tidak ditata dan dikelola secara memadai tentu keberadaan sentra UMKM di kawasan wisata religi tidak mampu menjadi kekuatan ekonomi yang besar dan tidak berkontribusi secara riil bagi perkembangan pariwisata setempat, khususnya dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat sekitar kawasan wisata religi.

Lokasi sentra UMKM kawasan wisata religi seharusnya tidak menghalangi atau mengganggu jalannya para ziarah makam wali, karena memang tujuan utama mereka ke lokasi wisata hanya untuk berziarah ke makam para wali, bukan untuk tujuan yang lain. Oleh karena itu lokasi sentra UMKM pada kawasan wisata religi harus didesain secara indah dan nyaman, agar para peziarah yang datang dapat leluasa melakukan ziarah dengan aman dan nyaman. Dampak kenyamanan para peziarah tentu akan memberi manfaat bagi pelaku UMKM pada kawasan tersebut, minimal lokasi sentra UMKM harus ikut menciptakan suasana indah, nyaman dan tertib lingkungan, sehingga keberadaan situs makam para wali dan lokasi sentra

UMKM menjadi kesatuan yang *ter-integrated* yang dapat meningkatkan layanan yang lebih layak bagi wisatawan yang datang serta menjadikan kawasan wisata religi ini sebagai kawasan terpadu yaitu menyatukan kawasan wisata religi dengan kawasan bisnis secara *ter-integrated* baik menghadirkan suasana kearifan lokal dari masyarakat setempat maupun menghadirkan suasana baru yang ramah lingkungan, sehingga memberi suasana bertambah nyaman dan bersifat alami.

1. Lokasi Sentra UMKM makam Sunan Bonang Tuban, berada di tengah kota tepatnya sebelah barat alun alun kabupaten Tuban. Sentra UMKM berada di gang jalan menuju area makam Sunan Bonang, tepatnya dipinggiran makam membentuk semacam lorang, sehingga kalau masuk dan keluar dari makam pengunjung sepertinya berada di tengah kawasan sentra UMKM.



Lokasi Sentra UMKM berada didalam, untuk memasuki harus melewati pintu gapura di ujung sebelah timur, sebelum memasuki area didalam kita dapat menemukan lokasi sentra UMKM lain yang berada di luar area. Karakteristik dua area sangat beda, yang didalam lokasinya tertutup sedangkan yang diluar terbuka.

- 2 Sentra UMKM dimakam Sunan Drajad Lamongan, lokasi berada di pinggiran kota tepatnya jalan raya menuju ke arah Bojonegoro. Sentra UMKM yang berada di pinggiran jalan berdekatan dengan area parkir, tepatnya disebelah timur makam Sunan Giri. Kawasanya lebih terbuka, tetapi ada sebagian dari UMKM yang berada didalam area makam tepat dipintu makam sunan Drajad.



Lokasi Sentra UMKM sebagian berlokasi di dalam area makam, tepatnya berada di sebelah timur makam Sunan Drajad, namun yang berada di luar justru lebih banyak jumlahnya. Lokasi dan tempat untuk usaha masih kurang tertata baik, bahkan untuk pengelolaannya masih belum layak, sehingga terasa kurang nyaman bagi pengunjung.

- 3 Sentra UMKM dimakam Sunan Giri Gresik, lokasi sentra UMKM ada di dalam area makam tepatnya berada dibawah namun masih dalam satu area, persisnya ada disebelah selatan dan timur makam. Selain yang berada didalam kawasan makam tampak disepanjang jalan yang menuju arah makam juga banyak lokasi sentra UMKM namun keberadaan sudah diluar kawasan.



Lokasi Sentra UMKM ini berada dibawah pintu keluar makam, terus menuju kearah timur ada dua lorong yang banyak ditempati pelaku UMKM, kemudian dibawahnya juga terdapat lokasi yang berjualan produk UMKM. Lokasi usaha dan tempat usaha di kawasan wisata religi Sunan Giri sangat terbatas sekali, lokasi ini persis berada di bawah makam Sunan Giri.

- 4 Sentra UMKM dimakam Sunan Maulana Malik Ibrahim Gresik, lokasi sentra UMKM berada di disebelah timur makam. Hanya satu lokasi yang terbentang dari ujung selatan jalan dan menembus ujung jalan sebelah utara, sepanjang lorong ini pelaku UMKM melakukan aktivitas usahanya. Sebenarnya makam Sunan Maulana Malik Ibrahim berada ditengah kota, karena sebelah utaranya makam terdapat alun alun kota dan pendopo kabupaten Gresik.



Lokasi Sentra UMKM berada sebelah timur makam Sunan, kebetulan hanya satu lorong dan tidak ada tempat lain, memanjang dari arah ujung selatan sampai tembus ujung jalan sebelah utara. Sebagian besar pelaku UMKM di lokasi ini adalah warga setempat yang kebetulan sudah lama tinggal di lokasi.

- 5 Sentra UMKM dimakam Sunan Ampel Surabaya, lokasi sentra UMKM ada di sekitar kawasan makam Sunan, kebetulan lokasinya berada disebelah selatan dan timur area masjid Sunan Ampel. Area yang berada disebelah selatan tempatnya tertutup sedangkan sebelah timur masjid areanya lebih terbuka.



Gambar sebelah menunjukkan lokasi sentra UMKM yang berada di sebelah timurnya masjid, jika masuk dari arah timur, tentunya pengunjung akan memasuki lokasi sentra UMKM yang ada di sepanjang lorong jalan, tetapi sepanjang jalan ini juga terdapat toko yang memanjang dari arah timur sampai di depan pintu masjid, sehingga kawasan Ampel memiliki lebih banyak jumlah pedagang di banding di tempat yang lain.

Lima lokasi sentra UMKM diatas merupakan observasi dilapangan yang didalanya terdapat lokasi usaha, tempat usaha dan infrastruktur. Berbagai aktivitas warga ada didalam sentra UMKM, secara keseluruhan sentra UMKM di kawasan wisata religi memiliki karakteristik yang hampir sama, karena kelima wisata religi ini memiliki satu garis keturunan yang sama yaitu dari Sunan Ampel, bahkan dari tiga makam Sunan Bonang, Sunan Drajad serta Sunan Giri memiliki kesamaan

bangunan didalam, demikian juga kawasan disekitar makam juga hampir memiliki karakteristik yang sama.

5.2.3 Komoditi Barang Dagangan

Wisata religi umumnya memiliki karakteristik yang bersifat unik, mengingat tujuan orang berkunjung ke situs makam wali lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan spritualnya, bukan sekedar berwisata saja bahkan keyakinan di tengah masyarakat kita bahwa berziarah ke makam para wali merupakan bagian dari amaliyah yang dianjurkan oleh agama, tentu hal ini membuat antusias masyarakat muslim di Jawa Timur bahkan masyarakat muslim di Indonesia untuk berziarah ke makam wali yang dikemas sebagai wisata religi. Ciri khas wisatawan ini tentunya memiliki kebutuhan pemenuhan barang yang bernuansa spritual muslim, sehingga jenis komoditi yang diperdagangkan ini juga lebih bernuansa islami.

Umumnya sentra UMKM kawasan wisata religi ini lebih banyak dipenuhi dengan barang dagangan yang terkait dengan keperluan atau sarana ibadah umat Islam, barang bernuansi agama Islam, makanan yang memiliki historis dengan pusat pengembangan agama Islam (timur tengah & arab) bahkan pusat kuliner dan souvenir yang bercirikan kearifan lokal (sejarah para wali) dan nuansa islami. Hal ini yang seharusnya dimunculkan dalam pengembangan kawasan wisata religi terpadu, jadi situs makam para wali seharusnya menginspirasi pelaku UMKM dan industri kreatif untuk menggali dan mengembangkan nilai kearifan lokal yang ada serta menuangkannya menjadi komoditi yang nilai keekonomiannya tinggi, agar masyarakat pelaku UMKM dan masyarakat sebagai wisatawan dapat memperoleh manfaat yang diinginkannya.

5.2.4 Siklus Kunjungan Wisatawan

Wisatawan nusantara yang melakukan wisata religi pada situs makam para wali umumnya berasal dari kalangan masyarakat yang mayoritas dari pedesaan yang memiliki unsur kental dengan kultur Jawa dan etnis muslim. Kondisi ini tidak lepas dari sejarah perkembangan agama Islam yang dirintis oleh para wali di tanah Jawa yang dikenal dengan sebutan “**Wali Songo**” atau sembilan ulama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Kultur masyarakat Jawa memiliki suatu

keyakinan bahwa para wali songo memiliki suatu “Karomah” atau sifat linuwih yang melebihi batas kemampuan umum manusia (kelebihan spritual), oleh karena itu ziarah makam wali juga sebagai upaya masyarakat untuk memperoleh berkah dari ALLAH melalui perantara para wali (tawasul) di tanah Jawa. Bagian dari wali songo lima diantaranya situs makamnya berada di Jawa Timur yang biasa disebut oleh masyarakat sebagai “Wali Limo” yaitu makam Sunan Ampel ada di kota Surabaya, makam Sunan Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Giri ada di kota Gresik, makam Sunan Drajad ada di kota Lamongan dan makam Sunan Bonang ada di kota Tuban.

Wisatawan religi secara tradisi sudah menjadi bagian dari kultur masyarakat Jawa dan etnis muslim dari berbagai pelosok pedesaan walaupun tidak menutup dari kalangan masyarakat kota modern khususnya dari kalangan nahdatul ulama. Wisata religi seringkali dikaitkan dengan bulan besar kalender umat Islam seperti bulan Rajab, bulan ramadhan dan bulan besar Islam lainnya. Namun dari kalangan masyarakat pedesaan seringkali dikaitkan dengan waktu senggang yaitu sehabis musim panen secara kelompok mereka melakukan wisata religi sesuai dengan minat dan kemampuan finansialnya, demikian juga dari komunitas pengajian yang berasal kompleks perumahan, instansi atau lembaga, kalangan pondok pesantren, dan lainnya biasanya mendapat arahan dan direkomendasikan oleh sang ustadnya. Karakteristik ini ternyata mempengaruhi siklus kunjungan wisatawan yang datang ke kawasan wisata religi, sehingga kunjungannya tidak dapat diprediksi sesuai tahun kalender, tetapi harus mengikuti kalender Islama (tahun Hijrah).

Siklus kunjungan wisata religi harus dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha sentra UMKM yang berada di kawasan wisata untuk menyediakan berbagai ragam keperluan wisatawan sesuai dengan karakteristik dari masyarakat dan kemampuan finansialnya, agar pelaku usaha di sentra UMKM dapat memanfaatkan momentum ini untuk meraih nilai keekonomian dari kunjungannya. Dari siklus kunjungan ini tentu akan mempengaruhi kegiatan usaha sentra UMKM yang berada di kawasan wisata religi, oleh karena itu momentum ini harus dapat dipahami dengan baik oleh pelaku usaha sentra UMKM karena karakteristik wisata religi tidak memiliki sifat keberulangan tetapi lebih bersifat situasional, berbeda dengan wisata kuliner atau wisata belanja yang dapat dilakukan oleh masyarakat di sepanjang waktu. Jika

pemangku kepentingan dapat menyusun program *ter-integrated* di bidang pariwisata tentu kunjungan wisata kuliner dapat memperbaiki siklusnya.

5.2.5 Infrastruktur Kawasan Wisata

Infrastruktur yang meliputi sarana dan prasarana pendukung tentu memiliki andil yang tidak kecil dalam pengembangan kawasan wisata religi, oleh karena itu para pemangku kepentingan dan masyarakat harus memikirkan infrastruktur yang layak dalam rangka mendukung pariwisata, khususnya wisata religi yang aman dan nyaman. Infrastruktur tidak mungkin dapat disediakan oleh pelaku UMKM sendiri mandiri tetapi harus dipikir secara bersama oleh seluruh penggiat industri pariwisata dan para pemangku kepentingan baik dari kalangan birokrasi, bisnis dan kalangan akademik (perguruan tinggi). Secara umum infrastruktur meliputi fasilitas umum, fasilitas kawasan wisata, fasilitas sentra UMKM, penggiat jasa hotel dan hiburan, lembaga keuangan, moda transportasi, fasilitas komunikasi dan teknologi informasi. Berbagai fasilitas sudah tersedia didalam area sentra UMKM, namun kuantitas dan kualitasnya masih kurang layak, untuk meningkatkan nilai kenyamanan bagi pengunjung perlu dilakukan pengelolaan fasilitas yang lebih baik sesuai dengan perubahan kondisi pengunjungnya.

Infrastruktur didalam kawasan wisata religi umumnya masih sangat terbatas, karena pengelolaan kawasan wisata religi kebanyakan dilakukan oleh lembaga masyarakat adat, lembaga keagamaan yang aksesnya sangat terbatas, sedangkan cakupan pengelolaan kawasan wisata religi sangat luas kaitannya dengan pihak lainnya, oleh karena itu banyak alternatif untuk mengembangkan kawasan wisata religi di Jawa Timur, tinggal bagaimana tanggungjawab dan kepedulian dari para stakeholder dalam mengelola situs makam para wali tersebut. Keterlibatan secara terintegrasi dari pihak manapun merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi, situs makam para wali bukan semata mata tinggalan dari keluarga trah para wali tetapi ini sudah menjadi aset masyarakat bahkan aset negara, oleh karena itu pemerintah daerah harus menginisiasi bagaimana memfasilitasi infrastruktur yang lebih layak, baik infrastruktur kawasan wisata religi maupun infrastruktur pendukung lainnya agar daya tarik wisata ini dapat memberi nilai keekonomian yang lebih tinggi dan memberi manfaat secara riil bagi pengembangan sentra UMKM yang berada pada

kawasan wisata religi, pendapatan masyarakat setempat, pendapatan asli daerah serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang berada pada kawasan religi tersebut.

5.3 Perumusan Model Optimalisasi Peran *Stakeholder*

Peran *stakeholder* merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terstruktur dan masif dalam rangka pengembangan pengelolaan UMKM yang lebih efektif, agar semua aktivitasnya dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, oleh karena itu *stakeholder* memainkan peran yang strategis dalam rangka meningkatkan pengelolaan UMKM di kawasan wisata religi, sehingga dapat dirumuskan model yang sesuai dengan karakteristik UMKM. Merumuskan suatu model memerlukan suatu kajian yang mendalam dan fokus agar dapat di hasilkan rumusan model yang efektif dan dapat di implementasikan sesuai dengan karakteristiknya. Perumusan model yang baik harus memperhatikan beberapa aspek penting yaitu: a) Memahami permasalahan riil di lapangan, b) mereduksi permasalahan kedalam permasalahan yang memiliki nilai manfaat, relevan dengan kondisi riil, c) merumuskan model, d) implementasi model serta e) mengevaluasi nilai kemanfaatan model.

Model yang baik harus dirumuskan melalui tahapan yang sistematis dan terencana agar dapat menghasilkan suatu model yang aplikatif dan sesuai dengan karakteristik obyek yang dimodelkan. Model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM pada kawasan wisata religi terdiri dari enam tahapan utama yaitu: (a) mengidentifikasi peran *stakeholder* dalam pengembangan pengelolaan UMKM, (b) memetakan suatu pola terkait peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM, (c) merumuskan suatu model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM yang efektif, (d) menguji efektivitas model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM, (e) mengevaluasi efektivitas model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM, (f) menyusun rumusan kembali terkait model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM yang aplikatif untuk diimplementasikan pada kawasan wisata religi di Jawa Timur. Uraian secara detail langkah langkah perumusan model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM dapat diuraikan sebagai berikut ini.

5.3.1 Identifikasi Peran *Stakeholder* Dalam Pengelolaan UMKM

Tahapan ini melakukan identifikasi terhadap peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM yang terjadi di kawasan wisata religi, untuk menggali satuan kajian/variabel dan indikator yang dapat mengungkap peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM, maka dilakukan kajian teoritis, observasi lapangan, interaksi awal dengan nara sumber, analisis dokumen baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki keterkaitan dengan peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM. Selanjutnya menyusun panduan wawancara dan merancang kuesioner yang dipergunakan untuk menggali informasi yang relevan untuk mengungkap peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM yang terjadi selama ini, dengan cara melakukan wawancara langsung dengan nara sumber data yang berkompeten, pengisian instrumen kuesioner, penggunaan dokumentasi yang diperoleh oleh peneliti.

Berdasarkan hasil amatan awal melalui proses triangulasi terkait dengan pengelolaan UMKM pada kawasan wisata religi, dapat ditemukan empat pihak yang turut memainkan peran dalam pengelolaan UMKM yaitu: a) dinas koperasi, b) dinas pariwisata, c) lembaga perbankan dan d) lembaga perguruan tinggi. Dari empat pihak yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan UMKM selanjutnya dapat ditentukan dan dipilih menjadi sampel sumber data yaitu pimpinan dinas koperasi empat nara sumber, dinas pariwisata empat nara sumber, pimpinan bank 12 nara sumber dan ketua jurusan program studi sebanyak 27 nara sumber, dengan pertimbangan tertentu (*purposive-sampling*), sehingga nara sumber tersebut dapat memenuhi syarat sebagai informan yang valid dan memiliki kualifikasi sebagai nara sumber sehubungan dengan keterangan yang terkait peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM pada kawasan wisata religi Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Syeh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Bonang dan Sunan Drajad. Tahapan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM yang terjadi pada kawasan wisata religi selama ini. Identifikasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM merupakan tahapan yang krusial didalam perumusan “Model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM” karena tahap ini harus mampu menggali dan mengungkap satuan kajian/variabel serta indikator yang relevan dengan peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM yang terjadi

selama ini sekaligus sebagai dasar merumuskan suatu Model optimalisasi peran *stakeholder*, sehingga dapat dihasilkan suatu model yang efektif dan aplikatif sesuai dengan karakteristik pengelolaan UMKM pada kawasan wisata religi serta karakteristik budaya masyarakat.

Mengacu hasil triangulasi atas amatan peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM pada kawasan wisata religi, maka dapat diidentifikasi empat fokus amatan atau satuan kajian yang meliputi: 1) peran dinas koperasi, 2) peran dinas pariwisata, 3) peran lembaga perbankan dan 4) peran lembaga perguruan tinggi. Selanjutnya fokus kajian atau amatan tersebut masih dikembangkan lebih detail lagi menjadi sub kajian yang terdiri: a) kebijakan dalam pengembangan UMKM, b) program layanan manajemen bagi UMKM, c) program pelatihan bagi UMKM, d) program pendampingan pelatihan UMKM, e) program bina mitra dalam pengembangan UMKM, f) program penyaluran dan pengelolaan kredit bagi UMKM, g) program klinik manajemen bagi UMKM, h) program kebijakan kurikulum kewirausahaan dan magang mahasiswa, i) program riset dan pengembangan UMKM, j) program publikasi ilmiah terkait dengan UMKM.

Satuan kajian tersebut selanjutnya dilakukan pendalaman yang diarahkan pada penemuan unsur indikatornya agar dapat dikembangkan menjadi kuesioner, selanjutnya kuesioner dan panduan wawancara akan dipergunakan oleh peneliti untuk menggali data yang relevan dengan peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM melalui wawancara mendalam dengan sampel sumber data/informan. Desain dalam instrumen penelitian atau kuesioner ini menggunakan pengukuran skala Guttman yaitu jenis pengukuran skala yang bertujuan untuk memperoleh respon nara sumber secara tegas dengan memberi jawaban “Ya atau Tidak” terhadap pernyataan setiap butir pertanyaan dalam kuesioner, sedangkan hasil pengukurannya menggunakan skala rasio. Adapun tujuan dari desain pengukuran ini adalah ingin memperoleh gambaran atau mengungkap secara jelas tentang bagaimana peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM secara riil yang berada pada kawasan wisata religi selama ini. Melalui proses triangulasi nara sumber data selanjutnya ditabulasikan sesuai dengan aspek yang diamati, sehingga dapat diidentifikasi secara riil mengenai indikator yang sudah atau belum diterapkan terkait peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM pada kawasan wisata religi.

Untuk menggambarkan indikator yang dikembangkan dalam satuan kajian terkait dengan peran riil *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM dapat diuraikan sebagai berikut:

5.3.1.1 Peran Dinas Koperasi dan UMKM

Peran dinas koperasi menunjukkan suatu upaya riil yang dilakukan untuk mendorong bagaimana pengelolaan UMKM dapat berjalan menjadi lebih efektif dan menuju pada praktek manajemen yang layak untuk mengelola aktivitas bisnis /usahanya menjadi lebih berkembang. Mengacu pada proses triangulasi maka dapat diidentifikasi sub kajian yang terdiri: a) kebijakan dalam pengembangan UMKM, b) program layanan bagi UMKM, c) program pelatihan bagi UMKM, d) program pendampingan UMKM, e) program bina mitra dalam pengembangan UMKM. Berdasarkan uraian tersebut dapat didesain suatu kuesioner dalam rangka menggali informasi yang relevan untuk mengungkapkan karakteristik peran dinas koperasi dalam pengelolaan UMKM dapat disajikan jawabannya dalam tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1 : Karakteristik Peran Dinas Koperasi

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			
		Ya	%	Tdk	%
1. Kebijakan Pengembangan UMKM					
1	Memiliki kebijakan untuk mendorong pengembangan UMKM	4	100	0	0%
2	Kebijakan yang menyangkut aspek manajerial (tata kelola usaha)	3	75%	1	25%
3	Kebijakan yang menyangkut aspek manajemen pemasaran	4	100	0	0%
4	Kebijakan menyangkut aspek manajemen produksi	4	100	0	0%
5	Kebijakan yang menyangkut aspek manajemen keuangan/Akuntansi	3	75%	1	25%
6	Kebijakan menyangkut aspek kompetensi/keterampilan Sumber Daya Manusia	4	100	0	0%
7	Kebijakan menyangkut aspek Perekrutan/desain usaha	4	100	0	0%
8	Kebijakan yang menyangkut aspek promosi/memfasilitasi pameran	4	100	0	0%
9	Kebijakan yang menyangkut pemanfaatan aspek teknologi informasi	4	100	0	0%
10	Kebijakan yang menyangkut aspek akses permodalan	4	100	0	0%
11	Kebijakan yang menyangkut pada aspek kemitraan/akses memitirakan pelaku UMKM	3	75%	1	25%
12	Kebijakan yang menyangkut aspek legalitas usaha atau aspek perijinan	4	100	0	0%
13	Kebijakan yang menyangkut pada perlindungan usaha (hak cipta/paten)	4	100	0	0%

2. Program Klinik Bagi Pelaku UMKM					
1	Melakukan klinik yang terkait dengan aspek manajerial (tata kelola usaha)	3	75%	1	25%
2	Melakukan klinik terkait aspek manajemen pemasaran	3	75%	1	25%
3	Melakukan klinik terkait aspek manajemen produksi	4	100	0	0%
4	Melakukan klinik terkait aspek manajemen keuangan/Akuntansi	3	75%	1	25%
5	Melakukan klinik terkait aspek kompetensi/keterampilan SDM	3	75%	1	25%
6	Melakukan klinik terkait aspek Perencanaan/desain usaha	3	75%	1	25%
7	Melakukan klinik terkait aspek promosi/memfasilitasi pameran	4	100	0	0%
8	Melakukan klinik terkait pemanfaatan aspek teknologi informasi	3	75%	1	25%
9	Melakukan klinik terkait akses permodalan	3	75%	1	25%
10	Melakukan klinik terkait akses kemitraan (memitrakan)	3	75%	1	25%
11	Melakukan klinik terkait perijinan usaha/legalitas	3	75%	1	25%
12	Melakukan klinik terkait perlindungan usaha (hak cipta/paten)	3	75%	1	25%
3. Program Pelatihan Bagi Pelaku UMKM					
1	Memberi pelatihan aspek manajerial (tata kelola usaha)	4	100	0	0%
2	Memberi pelatihan aspek manajemen pemasaran	4	100	0	0%
3	Memberi pelatihan aspek manajemen produksi	4	100	0	0%
4	Memberi pelatihan aspek manajemen keuangan/Akuntansi	3	75%	1	25%
5	Memberi pelatihan aspek kompetensi/keterampilan SDM	4	100	0	0%
6	Memberi pelatihan aspek Perencanaan/desain usaha	2	50%	2	50%
7	Memberi pelatihan aspek promosi/memfasilitasi pameran	4	100	0	0%
8	Memberi pelatihan pemanfaatan aspek IT	2	50%	2	50%
9	Memberi pelatihan akses permodalan	2	50%	2	50%
10	Memberi pelatihan akses kemitraan (memitrakan)	3	75%	1	25%
11	Memberi pelatihan perijinan usaha/legalitas	4	100	0	0%
12	Memberi pelatihan perlindungan usaha (hak cipta/paten)	4	100	0	0%
4. Program Pendampingan Bagi Pelaku UMKM					
1	Melakukan pendampingan aspek manajerial (tata kelola)	2	50%	2	50%
2	Melakukan pendampingan aspek manajemen pemasaran	2	50%	2	50%
3	Melakukan pendampingan aspek manajemen produksi	3	75%	1	25%
4	Melakukan pendampingan aspek manajemen keuangan/Akuntansi	2	50%	2	50%
5	Melakukan pendampingan aspek keterampilan SDM	2	50%	2	50%
6	Melakukan pendampingan aspek Perencanaan usaha	2	50%	2	50%
7	Melakukan pendampingan aspek promosi/pameran	3	75%	1	25%
8	Melakukan pendampingan pemanfaatan aspek IT	2	50%	2	50%
9	Melakukan pendampingan akses permodalan	2	50%	2	50%
10	Melakukan pendampingan akses kemitraan (memitrakan)	2	50%	2	50%
11	Melakukan pendampingan perijinan usaha/legalitas	2	50%	2	50%
12	Melakukan pendampingan perlindungan usaha (hak cipta)	2	50%	2	50%
5. Bina Mitra Dalam Pengembangan UMKM					
1	Melakukan koordinasi program dengan Dinas Pariwisata	2	50%	2	50%
2	Melakukan koordinasi program terpadu dengan Lembaga Perbankan	4	100	0	0%
3	Melakukan koordinasi program dengan Perguruan Tinggi	2	50%	2	50%
4	Melakukan koordinasi program dengan tokoh masyarakat/pemuka agama	2	50%	2	50%
5	Melakukan kerjasama dengan Dinas Pariwisata terkait dengan pengelolaan UMKM	3	75%	1	25%

6	Melakukan kerjasama dengan Lembaga Perbankan terkait UMKM	4	100	0	0%
7	Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi terkait UMKM	2	50%	2	50%
8	Melakukan kerjasama dengan tokoh masyarakat terkait UMKM	1	25%	3	75%
9	Melakukan kajian bersama dengan Dinas Pariwisata terkait UMKM	2	50%	2	50%
10	Melakukan kajian bersama dengan Perbankan yang terkait pengelolaan UMKM	2	50%	2	50%
11	Melakukan kajian bersama dengan Perguruan Tinggi yang terkait dengan pengelolaan UMKM	1	25%	3	75%
12	Melakukan kajian bersama dengan tokoh masyarakat terkait UMKM	2	50%	2	50%
13	Menjalankan program khusus dengan pelaku UMKM pada kawasan wisata religi	1	25%	3	75%
14	Melakukan klinik & pelatihan dengan UMKM kawasan wisata religi	1	25%	3	75%
15	Melakukan pendampingan dengan UMKM pada kawasan wisata religi	1	25%	3	75%

Sumber: Diolah oleh Penulis

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa peran riil dinas koperasi dalam pengelolaan UMKM berdasarkan pada lima aspek yang diamati memiliki respon yang bervariasi atas pernyataan dengan jawaban “ya”. Dalam rancangan kuesioner jawaban “ya” menunjukkan makna telah melakukan peran yang positif terhadap upaya pengelolaan UMKM dengan arah yang benar atau mengarah pada tindakan yang efektif, oleh karena itu semakin banyak jawaban “ya” maka memberi makna yang baik artinya telah melakukan peran yang benar dalam pengelolaan UMKM. Jawaban “ya” di dalam kuesioner akan dipergunakan sebagai dasar menyusun *mapping* yang menggambarkan tentang karakteristik peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM. Jawaban “ya” dalam tabel diatas berada pada rentang prosentase yang tidak sama antara aspek satu dengan yang lainnya, maka untuk memudahkan memahami tabel tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Kebijakan pengembangan, jawaban “ya” 75% -100% dengan rata rata 94,2%
- b. Program klinik, jawaban “ya” 75% - 100% dengan rata rata 79,1%
- c. Program pelatihan, jawaban “ya” 50% - 100% dengan rata rata 83,3%
- d. Program pendampingan, jawaban “ya” 50% - 100% dengan rata rata 54,2%
- e. Bina mitra, jawaban “ya” 25% - 100% dengan rata rata 50,0%

Dari jawaban tersebut diatas menunjukkan masih perlunya perbaikan aspek program pendampingan dan bina mitra UMKM menjadi lebih baik dimasa yang

akan datang, karena peran yang diberikan pada aspek tersebut masih berkisar pada rata rata sekitar 50%.

5.3.1.2 Peran Dinas Pariwisata

Peran dinas pariwisata menunjukkan suatu upaya riil yang dilakukan untuk mendorong bagaimana pengelolaan UMKM dapat berjalan menjadi lebih efektif dan menuju pada praktek manajemen yang layak untuk mengelola aktivitas bisnis /usahanya menjadi lebih berkembang. Mengacu pada proses triangulasi maka dapat diidentifikasi sub kajian yang terdiri: a) kebijakan dalam pengembangan UMKM, b) program layanan bagi UMKM, c) program pelatihan bagi UMKM, d) program pendampingan UMKM, e) program bina mitra dalam pengembangan UMKM. Berdasarkan uraian tersebut dapat didesain suatu kuesioner dalam rangka menggali informasi yang relevan untuk mengungkapkan karakteristik peran dinas pariwisata dalam pengelolaan UMKM sekaligus disajikan jawaban nara sumber data dalam tabel 5.2 sebagai berikut:

Tabel 5.2: Karakteristik Peran Dinas Pariwisata

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			
		Ya	%	Tdk	%
1. Kebijakan Pengembangan UMKM					
1	Memiliki kebijakan untuk mendorong pengembangan UMKM dan Pariwisata	1	25%	3	75%
2	Kebijakan yang menyangkut aspek manajerial (tata kelola usaha) UMKM	1	25%	3	75%
3	Kebijakan yang menyangkut aspek manajemen pemasaran	1	25%	3	75%
4	Kebijakan menyangkut aspek manajemen industri kreatif	2	50%	2	50%
5	Kebijakan yang menyangkut aspek manajemen keuangan/ Akuntansi	2	50%	2	50%
6	Kebijakan menyangkut aspek kompetensi/keterampilan sumber daya manusia	2	50%	2	50%
7	Kebijakan menyangkut aspek Perekrutan/desain usaha	1	25%	3	75%
8	Kebijakan yang menyangkut aspek promosi/memfasilitasi pameran	3	75%	1	25%
9	Kebijakan yang menyangkut pemanfaatan aspek teknologi informasi	1	25%	3	75%
10	Kebijakan yang menyangkut aspek permodalan	2	50%	2	50%
11	Kebijakan yang menyangkut dengan aspek kemitraan (memitran)	2	50%	2	50%
12	Kebijakan menyangkut aspek perijinan usaha/legalitas	2	50%	2	50%
13	Kebijakan yang menyangkut perlindungan pada dunia usaha (hak cipta/paten)	2	50%	2	50%
2. Program Klinik Bagi Pelaku UMKM					
1	Melakukan klinik yang terkait aspek manajerial (tata kelola usaha) UMKM dan Pariwisata	1	25%	3	75%

2	Melakukan klinik terkait aspek manajemen pemasaran	2	50%	2	50%
3	Melakukan klinik terkait aspek manajemen industri kreatif	2	50%	2	50%
4	Melakukan klinik terkait aspek manajemen keuangan/Akuntansi	2	50%	2	50%
5	Melakukan klinik terkait aspek kompetensi/keterampilan SDM	2	50%	2	50%
6	Melakukan klinik terkait aspek Perencanaan/desain usaha	1	25%	3	75%
7	Melakukan klinik yang terkait aspek promosi produk/memfasilitasi keikutsertaan dalam pameran	2	50%	2	50%
8	Melakukan klinik terkait pemanfaatan aspek teknologi informasi	2	50%	2	50%
9	Melakukan klinik terkait akses permodalan	2	50%	2	50%
10	Melakukan klinik terkait akses kemitraan (memitrakan)	2	50%	2	50%
11	Melakukan klinik terkait perijinan usaha/legalitas	2	50%	2	50%
12	Melakukan klinik terkait perlindungan usaha (hak cipta/paten)	2	50%	2	50%
3. Program Pelatihan Bagi Pelaku UMKM					
1	Memberi pelatihan aspek manajerial (tata kelola usaha) UMKM dan pariwisata	2	50%	2	50%
2	Memberi pelatihan aspek manajemen pemasaran	2	50%	2	50%
3	Memberi pelatihan aspek manajemen industri kreatif	2	50%	2	50%
4	Memberi pelatihan aspek manajemen keuangan/Akuntansi	2	50%	2	50%
5	Memberi pelatihan aspek kompetensi/keterampilan SDM	2	50%	2	50%
6	Memberi pelatihan aspek Perencanaan/desain usaha	2	50%	2	50%
7	Memberi pelatihan aspek promosi/memfasilitasi pameran	3	75%	1	25%
8	Memberi pelatihan pemanfaatan aspek IT	2	50%	2	50%
9	Memberi pelatihan akses permodalan	2	50%	2	50%
10	Memberi pelatihan akses kemitraan (memitrakan)	2	50%	2	50%
11	Memberi pelatihan perijinan usaha/legalitas	2	50%	2	50%
12	Memberi pelatihan perlindungan usaha (hak cipta/paten)	2	50%	2	50%
4. Program Pendampingan Bagi Pelaku UMKM					
1	Melakukan pendampingan aspek manajerial (tata kelola)	1	25%	3	75%
2	Melakukan pendampingan aspek manajemen pemasaran	1	25%	3	75%
3	Melakukan pendampingan aspek manajemen pada industri kreatif	3	75%	2	50%
4	Melakukan pendampingan aspek manajemen keuangan/Akuntansi	2	50%	2	50%
5	Melakukan pendampingan aspek keterampilan SDM	2	50%	2	50%
6	Melakukan pendampingan aspek Perencanaan usaha	1	25%	3	75%
7	Melakukan pendampingan aspek promosi/pameran	2	50%	2	50%
8	Melakukan pendampingan pemanfaatan aspek IT	2	50%	2	50%
9	Melakukan pendampingan akses permodalan	2	50%	2	50%
10	Melakukan pendampingan akses kemitraan (memitrakan)	2	50%	2	50%
11	Melakukan pendampingan perijinan usaha/legalitas	2	50%	2	50%
12	Melakukan pendampingan perlindungan usaha (paten)	2	50%	2	50%
5. Bina Mitra Dalam Pengembangan UMKM					
1	Melakukan koordinasi program dengan Dinas Koperasi & UMKM	2	50%	2	50%
2	Melakukan koordinasi program terpadu dengan Lembaga Perbankan	1	25%	3	75%
3	Melakukan koordinasi program dengan Perguruan Tinggi	2	50%	2	50%
4	Melakukan koordinasi program dengan tokoh masyarakat/pemuka agama	2	50%	2	50%
5	Melakukan kerjasama dengan Dinas Koperasi yang terkait pengembangan UMKM	2	50%	2	50%

6	Melakukan kerjasama dengan Lembaga Perbankan terkait UMKM	1	25%	3	75%
7	Melakukan kerjasama dengan lembaga Perguruan Tinggi yang terkait dengan pengembangan UMKM	1	25%	3	75%
8	Melakukan kerjasama dengan tokoh masyarakat/pemuka agama	1	25%	3	75%
9	Melakukan kajian bersama dengan Dinas Koperasi terkait UMKM	2	50%	2	50%
10	Melakukan kajian bersama dengan lembaga Perbankan terkait dengan pengembangan UMKM	1	25%	3	75%
11	Melakukan kajian bersama dengan lembaga Perguruan Tinggi terkait dengan pengembangan UMKM	1	25%	3	75%
12	Melakukan kajian bersama dengan tokoh masyarakat/pemuka agama	2	50%	2	50%
13	Menjalankan program khusus dengan pelaku pariwisata kawasan wisata religi	3	75%	1	25%
14	Mengadakan klinik dan pelatihan dgn pelaku pariwisata pada kawasan wisata religi	2	50%	2	50%
15	Menjalankan program pendampingan dengan pelaku pariwisata pada kawasan wisata religi	2	50%	2	50%

Sumber: Diolah oleh Penulis

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa peran riil dinas pariwisata dalam pengelolaan UMKM berdasarkan pada lima aspek yang diamati memiliki respon yang bervariasi atas pernyataan dengan jawaban “ya”. Dalam rancangan kuesioner jawaban “ya” menunjukkan makna telah melakukan peran yang positif terhadap upaya pengelolaan UMKM dengan arah yang benar atau mengarah pada tindakan yang efektif, oleh karena itu semakin banyak jawaban “ya” maka memberi makna yang baik artinya telah melakukan peran yang benar dalam pengelolaan UMKM. Jawaban “ya” di dalam kuesioner akan dipergunakan sebagai dasar menyusun *mapping* yang menggambarkan tentang karakteristik peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM. Jawaban “ya” dalam tabel diatas berada pada rentang prosentase yang tidak sama antara aspek satu dengan yang lainnya, maka untuk memudahkan memahami tabel tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Kebijakan pengembangan, jawaban “ya” 25% -75% dengan rata rata 42,3%
- b. Program klinik, jawaban “ya” 25% - 50% dengan rata rata 45,8%
- c. Program pelatihan, jawaban “ya” 50% - 75% dengan rata rata 52,1%
- d. Program pendampingan, jawaban “ya” 25% - 50% dengan rata rata 45,8%
- e. Bina mitra, jawaban “ya” 25% - 75% dengan rata rata 41,7%

Dari jawaban tersebut diatas menunjukkan masih perlunya perbaikan kelima aspek peran dari dinas pariwisata dalam pengelolaan UMKM menjadi lebih baik,

karena peran yang diberikan pada kelima aspek tersebut masih berkisar pada rata rata sekitar 45%, kecuali program pelatihan yang sudah berada pada angka 52,1%, sedangkan program kebijakan pengembangan UMKM berada pada angka rata rata 42,3%, bahkan program bina mitra pengembangan UMKM hanya berada pada angka rata rata sekitar 41,7%.

5.3.1.3 Peran Lembaga Perbankan

Peran lembaga perbankan menunjukkan suatu upaya riil yang dilakukan untuk mendorong bagaimana pengelolaan UMKM dapat berjalan menjadi lebih efektif dan menuju pada praktek manajemen yang layak untuk mengelola aktivitas bisnis/usahanya menjadi lebih baik. Mengacu pada proses triangulasi maka dapat diidentifikasi sub kajian/amatan yang meliputi: a) kebijakan dalam pengembangan UMKM, b) program penyaluran dan pengelolaan kredit bagi UMKM, c) program klinik manajemen bagi UMKM, d) program pendampingan UMKM, e) program bina mitra dalam pengembangan UMKM. Berdasarkan uraian tersebut dapat didesain suatu kuesioner dalam rangka menggali informasi yang relevan untuk mengungkapkan karakteristik atas peran lembaga perbankan dalam pengelolaan UMKM sekaligus disajikan jawaban nara sumber data dalam tabel 5.3 sebagai berikut:

Tabel 5.3 : Karakteristik Peran Lembaga Perbankan

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			
		Ya	%	Tdk	%
1. Kebijakan Pengembangan UMKM					
1	Memiliki kebijakan strategis dalam rangka mendorong pengembangan UMKM	12	100	0	0%
2	Kebijakan untuk mendorong penerapan manajerial (tata kelola usaha)	9	75%	3	25%
3	Memiliki kebijakan untuk mendorong penerapan yang terkait dengan manajemen pemasaran	10	83%	2	17%
4	Kebijakan yang mendorong penerapan manajemen industri kreatif	8	67%	4	33%
5	Memiliki kebijakan untuk mendorong penerapan terkait manajemen keuangan/Akuntansi	10	83%	2	17%
6	Memiliki kebijakan mendorong peningkatan kompetensi/keterampilan SDM	8	67%	4	17%
7	Memiliki kebijakan untuk mendorong pengembangan Perekayasaan/desain usaha	8	67%	4	17%
8	Kebijakan mendorong melakukan promosi/memfasilitasi pameran	7	58%	5	42%
9	Kebijakan mendorong penggunaan teknologi informasi	4	33%	8	67%

10	Kebijakan mendorong pemanfaatan akses permodalan	10	83%	2	17%
11	Kebijakan mendorong melakukan kemitraan (memitrakan)	7	58%	5	42%
12	Kebijakan mendorong pengurusan perijinan usaha/legalitas	8	67%	4	33%
13	Kebijakan mendorong pengurusan hak cipta/paten	6	50%	6	50%
2. Program Penyaluran dan Pengelolaan Kredit UMKM					
1	Menyediakan kredit modal kerja (jangka pendek) untuk UMKM	12	75%	0	25%
2	Menyediakan kredit investasi (jangka panjang) untuk UMKM	8	67%	4	33%
3	Menyediakan kredit UMKM, tanpa persyaratan aset tetap	8	67%	4	33%
4	Menyediakan kredit UMKM, dengan jaminan kelayakan usaha	6	50%	6	50%
5	Melakukan kunjungan ke lokasi usaha pasca pemberian kredit	8	67%	4	33%
6	Melakukan monitoring atas penggunaan kredit oleh pelaku UMKM	11	92%	1	8%
7	Evaluasi perkembangan usaha pelaku UMKM minimal setahun sekali	10	83%	2	17%
8	Evaluasi jumlah kredit UMKM minimal sekali dalam satu tahun	10	83%	2	17%
9	Menyediaan konsultasi pengajuan kredit bagi pelaku UMKM	10	83%	2	17%
10	Menyediakan konsultasi untuk pengelolaan kredit yang diterima	10	83%	2	17%
11	Menyediakan konsultasi untuk pengembangan usaha bagi pelaku UMKM	6	50%	6	50%
12	Menyediakan bimbingan saat UMKM sedang menghadapi kesulitan bisnis/usaha	5	42%	7	58%
3. Program Klinik Manajemen Bagi Pelaku UMKM					
1	Menyediakan klinik terkait aspek manajerial (tata kelola usaha)	4	33%	8	67%
2	Menyediakan klinik terkait aspek manajemen pemasaran	4	33%	8	67%
3	Menyediakan klinik terkait aspek manajemen industri kreatif	3	25%	9	75%
4	Menyediakan klinik terkait aspek manajemen keuangan/ Akuntansi	6	50%	6	50%
5	Menyediakan klinik terkait aspek kompetensi/keterampilan sumber daya manusia	3	25%	9	75%
6	Menyediakan klinik yang terkait aspek Perekayasaan/ desain usaha	4	33%	8	67%
7	Menyediakan klinik terkait aspek promosi/memfasilitasi pameran	4	33%	8	67%
8	Menyediakan klinik terkait pemanfaatan aspek teknologi informasi	4	33%	8	67%
9	Menyediakan klinik terkait akses permodalan	8	67%	4	33%
10	Menyediakan klinik terkait akses kemitraan (memitrakan)	3	25%	9	75%
11	Menyediakan klinik terkait perijinan usaha/legalitas	3	25%	9	75%
12	Menyediakan klinik yang terkait perlindungan usaha (hak cipta/paten)	2	17%	10	83%
4. Program Kunjungan/Pendampingan Bagi Pelaku UMKM					
1	Memberi pendampingan aspek manajerial (tata kelola)	3	25%	9	75%
2	Memberi pendampingan aspek manajemen pemasaran	4	33%	8	67%
3	Memberi pendampingan aspek manajemen industri kreatif	2	17%	10	83%
4	Memberi pendampingan aspek manajemen keuangan/ Akt	6	50%	6	50%
5	Memberi pendampingan aspek keterampilan SDM	5	42%	7	58%
6	Memberi pendampingan aspek Perekayasaan usaha	3	25%	9	75%
7	Memberi pendampingan aspek promosi/pameran	5	42%	7	58%
8	Memberi pendampingan pemanfaatan aspek IT	2	17%	10	83%

9	Memberi pendampingan akses permodalan	10	83%	2	17%
10	Memberi pendampingan akses kemitraan (memitran)	5	42%	7	58%
11	Memberi pendampingan perijinan usaha/legalitas	3	25%	9	75%
12	Memberi pendampingan perlindungan usaha (paten)	4	33%	8	67%
5. Bina Mitra Dalam Pengembangan UMKM					
1	Melakukan koordinasi program dengan Dinas Koperasi & UMKM	3	25%	9	75%
2	Melakukan koordinasi program dengan Dinas Pariwisata	2	17%	10	83%
3	Melakukan koordinasi program dengan Perguruan Tinggi	2	17%	10	83%
4	Melakukan koordinasi program terpadu dengan tokoh masyarakat/pemuka agama/lembaga lain	2	17%	10	83%
5	Melakukan kerjasama dengan Dinas Koperasi terkait dengan pengembangan UMKM	3	25%	9	75%
6	Melakukan kerjasama dengan Dinas Pariwisata terkait dengan pengembangan UMKM	2	17%	10	83%
7	Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi terkait dengan pengembangan UMKM	5	42%	7	58%
8	Melakukan kerjasama dengan tokoh masyarakat/pemuka agama/lembaga lain	2	17%	10	83%
9	Melakukan kajian bersama dengan Dinas Koperasi terkait dengan pengembangan UMKM	4	33%	8	67%
10	Melakukan kajian bersama dengan Dinas Pariwisata terkait dengan pengembangan UMKM	3	25%	9	75%
11	Melakukan kajian bersama dengan Perguruan Tinggi terkait dengan pengembangan UMKM	4	33%	8	67%
12	Melakukan kajian bersama dengan tokoh masyarakat/pemuka agama/lembaga lain	2	17%	10	83%
13	Menjalankan program khusus terkait pengembangan UMKM pada kawasan wisata religi	1	8%	11	92%
14	Menjalankan program klinik dan pelatihan dgn pelaku UMKM pada kawasan wisata religi	1	8%	11	92%
15	Menjalankan program pendampingan terkait dengan pengembangan UMKM pada kawasan wisata religi	1	8%	11	92%

Sumber: Diolah oleh Penulis

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa peran riil lembaga perbankan dalam pengelolaan UMKM berdasarkan pada lima aspek yang diamati memiliki respon yang bervariasi atas pernyataan dengan jawaban “ya”. Dalam rancangan kuesioner jawaban “ya” menunjukkan makna telah melakukan peran yang positif terhadap upaya pengelolaan UMKM dengan arah yang benar atau mengarah pada tindakan yang efektif, oleh karena itu semakin banyak yang memberi jawaban “ya” maka memberi makna yang baik artinya telah melakukan peran yang benar dalam pengelolaan UMKM.

Jawaban “ya” di dalam kuesioner nantinya akan dipergunakan sebagai dasar menyusun *mapping* yang menggambarkan tentang karakteristik peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM. Jawaban “ya” dalam tabel diatas berada pada rentang

prosentase yang tidak sama, diantara aspek satu dengan yang lainnya, maka untuk memudahkan memahami tabel tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Kebijakan pengembangan, jawaban “ya” 33% -100% dengan rata rata 63,5%
- b. Program penyaluran kredit, jawaban “ya” 42% - 92% dengan rata rata 72,2%
- c. Program klinik manajemen, jawaban “ya” 17% - 67% dengan rata rata 31,9%
- d. Program pendampingan, jawaban “ya” 17% - 83% dengan rata rata 36,1%
- e. Bina mitra, jawaban “ya” 8% - 42% dengan rata rata 20,6%

Dari jawaban tersebut diatas menunjukkan masih perlunya perbaikan pada peran lembaga perbankan dalam pengelolaan UMKM menjadi lebih baik, karena peran yang diberikan pada tiga aspek tersebut masih berkisar pada rata rata dibawah angka 50% yaitu program klinik manajemen 31,9%, program pendampingan angka rata ratanya sekitar 36,1% bahkan untuk aspek bina mitra dalam pengembangan UMKM hanya pada angka 20,56%. Sesuai dengan fungsinya lembaga perbankan telah memainkan perannya dengan baik pada aspek penyaluran dan pengelolaan kredit dengan angka rata rata berkisar 72,2%, peran ini pun dapat memberi imbas yang positif pada pengembangan usaha UMKM.

5.3.1.4 Peran Perguruan Tinggi

Peran lembaga perguruan tinggi menunjukkan suatu upaya riil yang dapat dilakukan untuk mendorong bagaimana pengelolaan UMKM dapat berjalan menjadi lebih efektif dan menuju pada praktek manajemen yang layak untuk mengelola aktivitas bisnis/usahanya menjadi lebih baik. Mengacu pada proses triangulasi maka dapat diidentifikasi sub kajian yaitu: a) kebijakan kurikulum kewirausahaan dan magang mahasiswa, b) program klinik/layanan bagi UMKM, c) program pelatihan bagi UMKM, d) program pendampingan UMKM, e) program bina mitra dalam pengembangan UMKM, f) program riset dan pengembangan bagi UMKM dan g) publikasi ilmiah terkait dengan UMKM. Ketujuh indikator tersebut memiliki nilai kemanfaatan yang penting bagi UMKM karena merupakan kebutuhan aspek manajemen yang terkait dengan pengelolaan usahany. Berdasarkan uraian tersebut dapat di desain suatu kuesioner yang relevan untuk mengungkapkan karakteristik peran dinas pariwisata dalam pengelolaan UMKM sekaligus disajikan jawaban nara sumber data dalam tabel 5.4 sebagai berikut:

Tabel 5.4: Karakteristik Peran Perguruan Tinggi

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			
		Ya	%	Tdk	%
1. Kebijakan Kurikulum Kewirausahaan & Program Magang					
1	Mata Kuliah Kewirausahaan masuk dalam kurikulum program studi	27	100	0	0%
2	Mata Kuliah Kewirausahaan memberi praktek langsung di lapangan	27	100	0	0%
3	Program magang pada kelompok UMKM masuk dalam kurikulum	10	37%	17	63%
4	Program studi mendesain khusus materi program magang/praktek	7	26%	20	74%
5	Materi Magang meliputi aspek manajemen Pemasaran, manajemen keuangan, manajemen SDM dan Manajemen keuangan/akuntansi	12	44%	15	56%
6	Program magang pada kelompok UMKM sudah dijalankan selama tiga tahun terakhir (tahun 2016, 2017 dan tahun 2018)	10	37%	17	63%
7	Program magang pada kelompok UMKM sudah dilakukan secara berkelanjutan (2016 - 2018) pada tempat yang sama	3	11%	24	89%
8	Program magang selama tiga tahun terakhir (tahun 2016 - 2018) pada kelompok UMKM telah mencapai target yang diinginkan oleh Prodi	7	26%	22	74%
9	Program magang pada kelompok UMKM diikuti oleh 4-8 mahasiswa	5	19%	22	81%
10	Program magang oleh mahasiswa disediakan dosen pendamping yang memiliki pemahaman yang memadai tentang bisnis UMKM	10	37%	17	63%
11	Laporan hasil magang mahasiswa dijadikan umpan balik bagi pelaku UMKM (dilakukan sosialisasi hasil magang)	10	37%	17	63%
12	Laporan hasil magang mahasiswa dijadikan rujukan untuk mendesain program lanjutan Prodi dalam pengembangan UMKM	7	26%	20	74%
13	Pelaksanaan program magang selalu dievaluasi setiap akhir tahun oleh Prodi dalam rangka pengembangan manajemen UMKM	7	26%	20	74%
14	Program studi ini telah menyediakan pendanaan untuk mendukung kebijakan kurikulum kewirausahaan dan program magang sejak tiga tahun terakhir (2016-2018)	3	11%	24	89%
2. Program Klinik Bagi Pelaku UMKM					
1	Program studi sudah memiliki sentra pelayanan/klinik UMKM	3	11%	24	89%
2	Sentra pelayanan/klinik UMKM sudah menjadi bagian dari struktur organisasi formal dari Fakultas Ekonomi/program studi	3	11%	24	89%
3	Sentra pelayanan/klinik UMKM sudah ada sejak tiga tahun terakhir	3	11%	24	89%
4	Sentra pelayanan/klinik UMKM telah dikelola oleh unit sendiri yang pengelolaannya tidak merangkap jabatan struktural di fakultas/prodi	0	0%	27	100
5	Sentra pelayanan/klinik UMKM dikelola oleh dosen atau profesi lain yang memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang bisnis UMKM	5	19%	22	81%
6	Sentra pelayanan/klinik UMKM memberi pelayanan yang meliputi aspek manajemen pemasaran, aspek manajemen operasional, aspek manajemen SDM dan manajemen keuangan/akuntansi	7	26%	20	74%

7	Sentra pelayanan/klinik UMKM memberi pelayanan dengan jadwal reguler setiap minggu (jadwal hari dan jam yang sudah diatur)	3	11%	24	89%
8	Sentra pelayanan/klinik UMKM memberi pelayanan manajemen hanya di kampus saja sesuai jadwal yang telah ditentukan	3	11%	24	89%
9	Sentra pelayanan/klinik UMKM juga memberi pelayanan manajemen langsung di tempat UMKM sesuai prioritas yang disepakati bersama	7	26%	20	74%
10	Sentra pelayanan/klinik UMKM telah mengintegrasikan program layanan manajemen dengan program magang mahasiswa secara reguler	3	11%	24	89%
11	Sentra pelayanan/klinik UMKM telah menjalin kemitraan dengan dinas koperasi, lembaga perbankan, unit koperasi, dinas pariwisata	0	0%	27	100
12	Kegiatan sentra pelayanan/klinik UMKM selalu dievaluasi program kerjanya setiap tahun agar dapat mengikuti perkembangan UMKM	3	11%	24	89%
13	Program studi ini telah menyediakan pendanaan untuk mendukung program klinik bagi pelaku UMKM sejak tiga tahun terakhir (2016-2018)	0	0%	27	100
3. Program Pelatihan Bagi Pelaku UMKM					
1	Prodi ini memiliki program pelatihan manajemen untuk UMKM	3	11%	24	89%
2	Pelatihan manajemen untuk UMKM melibatkan dosen atau profesi lain yang memiliki pengetahuan mumpuni dengan aktivitas UMKM	3	11%	24	89%
3	Program pelatihan manajemen untuk pelaku UMKM meliputi aspek manajemen pemasaran, operasional, SDM dan keuangan/akuntansi	3	11%	24	89%
4	Program pelatihan manajemen telah dilakukan selama tiga tahun terakhir (2016-2018) dengan jadwal yang teratur dan berkelanjutan	0	0%	27	100
5	Program pelatihan manajemen merupakan bagian dari program sentra layanan/klinik UMKM yang dimiliki oleh fakultas/program studi	0	0%	27	100
6	Program pelatihan manajemen UMKM, juga diminati oleh pelaku UMKM lain melalui permintaan secara langsung dan formal	3	11%	24	89%
7	Program pelatihan manajemen memberi manfaat positif bagi pelaku UMKM dan pengembangan usahanya	3	11%	24	89%
8	Program pelatihan manajemen juga menjalin mitra dengan dinas koperasi & UMKM, perbankan, dinas pariwisata, koperasi dan lainnya	3	11%	24	89%
9	Program pelatihan manajemen selalu dievaluasi program kerjanya setiap tahun agar dapat mengikuti perkembangan bisnis UMKM	3	11%	24	89%
10	Program studi ini telah menyediakan pendanaan untuk mendukung program pelatihan bagi pelaku UMKM sejak tiga tahun terakhir (2016-2018)	0	0%	27	100
4. Program Pendampingan Bagi Pelaku UMKM					
1	Prodi ini memiliki program pendampingan manajemen untuk pelaku UMKM	10	37%	17	63%
2	Program pendampingan manajemen untuk UMKM telah melibatkan dosen/profesi lain yang memiliki pengetahuan mumpuni terkait aktivitas UMKM	10	37%	17	63%

3	Program pendampingan manajemen untuk pelaku UMKM meliputi aspek manajemen pemasaran, operasional, SDM dan keuangan/akt	10	37%	17	63%
4	Program pendampingan manajemen telah dilakukan selama tiga tahun terakhir (2016-2018) dengan jadwal yang teratur dan berkelanjutan	7	26%	20	74%
5	Program pendampingan manajemen merupakan bagian dari program sentra layanan/klinik UMKM yang dimiliki fakultas/program studi	0	0%	27	100
6	Program pendampingan manajemen untuk UMKM, juga diminati oleh pelaku UMKM lain melalui permintaan secara langsung dan formal	3	11%	24	89%
7	Program pendampingan manajemen telah memberi manfaat positif bagi pelaku UMKM dan pengembangan usahanya	7	26%	20	74%
8	Program pendampingan manajemen juga menjalin mitra dengan dinas koperasi, lembaga perbankan, dinas koperasi, dinas pariwisata dan lainnya	10	37%	17	63%
9	Program pendampingan manajemen dievaluasi program kerjanya setiap tahun agar dapat mengikuti perkembangan bisnis UMKM	7	26%	22	74%
10	Program studi ini telah menyediakan pendanaan untuk mendukung program pendampingan bagi pelaku UMKM sejak tiga tahun terakhir (2016-2018)	0	0%	27	100
5. Bina Mitra Dalam Pengembangan UMKM					
1	Melakukan koordinasi program dengan Dinas Koperasi & UMKM	0	0%	27	100
2	Melakukan koordinasi program dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0	0%	27	100
3	Melakukan koordinasi program Prodi dengan Lembaga perbankan/instansi lain	5	19%	22	81%
4	Melakukan koordinasi program dengan tokoh masyarakat/pemuka agama/pelaku bisnis	3	11%	24	89%
5	Memiliki program kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM	0	0%	27	100
6	Memiliki program kerjasama dengan Dinas Pariwisata & Kebudayaan	0	0%	27	100
7	Memiliki program kerjasama dengan Lembaga perbankan/instansi lain	5	19%	22	81%
8	Memiliki program kerjasama dengan tokoh masyarakat/pemuka agama/pelaku bisnis	3	11%	24	89%
9	Kajian bersama dengan Dinas Koperasi & UMKM	0	0%	27	100
10	Kajian bersama dengan Dinas Pariwisata & Kebudayaan	0	0%	27	100
11	Kajian bersama dengan Lembaga perbankan/instansi lain	0	0%	27	100
12	Kajian bersama dengan tokoh masyarakat/pemuka agama	3	11%	24	89%
13	Memiliki program khusus dengan Sentra UMKM kawasan wisata religi	0	0%	27	100
14	Mengadakan program klinik & pelatihan dengan UMKM kawasan wisata religi	3	11%	24	89%
15	Melakukan program pendampingan dengan UMKM pada kawasan wisata religi	3	11%	24	89%
16	Program studi ini telah menyediakan pendanaan untuk mendukung program bina mitra untuk pengembangan UMKM sejak tiga tahun terakhir (2016-2018)	0	0%	27	100
6. Program Riset & Pengembangan UMKM					
1	Fakultas/Program studi memiliki tema/topik riset unggulan dibidang Koperasi dan UMKM	10	37%	17	63%

2	Tema/topik riset unggulan fakultas/prodi selalu dievaluasi minimal lima tahun sekali	5	19%	22	89%
3	Tema/riset unggulan bidang koperasi dan UMKM meliputi aspek manajemen UMKM, aspek strategi pengembangan UMKM, daya saing UMKM, optimalisasi UMKM dan pemberdayaan UMKM	7	26%	20	74%
4	Memiliki kelompok dosen (1-3 dosen) yang fokus risetnya dibidang Koperasi dan UMKM	7	26%	20	74%
5	Program studi memiliki 2-5 dosen yang <i>roadmap</i> penelitiannya fokus pada bidang koperasi dan UMKM selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2016-2018)	5	19%	22	89%
6	Dosen program studi ini telah menghasilkan 2-5 judul penelitian per tahun terkait dengan tema/topik koperasi dan UMKM selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2016-2018)	7	26%	20	74%
7	Setiap dosen program studi memiliki <i>roadmap</i> dan tema penelitian yang disinkronkan dengan penulisan skripsi mahasiswanya minimal untuk kurun waktu satu tahun (dua semester)	10	37%	17	63%
8	Program studi ini memiliki 2-4 dosen yang <i>roadmap</i> penelitiannya terkait dengan judul skripsi mahasiswanya dengan tema koperasi dan UMKM sejak tiga tahun terakhir (2016-2018)	5	19%	22	89%
9	Program studi telah menghasilkan judul skripsi 3-6 per tahun dengan fokus kajian koperasi dan UMKM sejak tiga tahun terakhir (2016-2018)	5	19%	22	89%
10	Program studi ini memiliki program <i>joint reasearch</i> antara dosen dan mahasiswanya dengan tema kajian koperasi dan UMKM sejak tiga tahun terakhir (2016-2018)	5	19%	22	89%
11	<i>Joint reasearch</i> antara dosen dan mahasiswa di program studi ini telah menghasilkan penelitian 2-5 judul pertahun terkait tema koperasi dan UMKM sejak tiga tahun terakhir (2016-2018)	5	19%	22	89%
12	<i>Roadmap</i> penelitian dosen terkait dengan tema skripsi mahasiswanya selalu dievaluasi minimal dua tahun sekali	7	26%	20	74%
13	Tujuan evaluasi <i>roadmap</i> penelitian dosen, <i>roadmap</i> dan tema skripsi mahasiswa karena satu keinginan untuk mengikuti pengembangan dan kebutuhan bisnis UMKM	12	44%	15	56%
14	Hasil riset dosen dan mahasiswa yang dimiliki program studi ini selalu diimplementasikan untuk memberi manfaat langsung bagi pelaku UMKM melalui program pengabdian masyarakat.	10	37%	17	63%
15	Program studi ini telah menyediakan pendanaan untuk mendukung program riset dan pengembangan UMKM sejak tiga tahun terakhir (2016-2018)	3	11%	24	89%
7. Publikasi Ilmiah Tentang UMKM					
1	Program studi ini telah menargetkan publikasi karya ilmiah dosennya antara 2-5 judul pertahun pada jurnal nasional/internasional terkait tema koperasi dan UMKM sejak tiga tahun terakhir (2016-2018)	10	37%	17	63%
2	Program studi ini telah menargetkan penyusunan buku ajar terkait dengan tema koperasi dan UMKM antara 2-5 judul pertahun sejak tiga tahun terakhir (2016-2018)	5	19%	22	89%
3	Program studi ini telah menargetkan dosennya menjadi nara sumber/pembicara dalam seminar internasional/ nasional terkait tema koperasi dan UMKM antara 2-5 judul pertahun sejak tiga tahun terakhir (2016-2018)	10	37%	17	63%

4	Program studi ini telah menargetkan hak cipta (HKI) atas karya ilmiah dosennya terkait dengan koperasi dan UMKM antara 2-5 judul pertahun sejak tiga tahun terakhir (2016-2018)	3	11%	24	89%
5	Program studi ini telah menyediakan pendanaan untuk mendukung publikasi karya ilmiah dosennya antara 2-5 judul pertahun pada jurnal nasional/internasional terkait tema UMKM sejak tiga tahun terakhir (2016-2018)	3	11%	24	89%
6	Program studi ini telah menyediakan pendanaan untuk mendukung penyusunan buku ajar terkait dengan koperasi dan UMKM antara 2-5 judul pertahun sejak tiga tahun terakhir (2016-2018)	3	11%	24	89%
7	Program studi ini telah menyediakan pendanaan untuk mendukung dosennya menjadi nara sumber/pembicara dalam seminar nasional/ internasional terkait koperasi dan UMKM antara 2-5 judul pertahun sejak tiga tahun terakhir (2016-2018)	5	19%	22	81%
8	Program studi ini telah menyediakan pendanaan untuk mendukung hak cipta (HKI) atas karya ilmiah dosennya terkait dengan koperasi dan UMKM antara 2-5 judul pertahun sejak tiga tahun terakhir (2016-2018)	3	11%	24	89%

Sumber: Diolah oleh Penulis

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa peran riil yang dilakukan oleh lembaga perguruan tinggi terhadap pengelolaan UMKM berdasarkan tujuh aspek yang diamati memiliki respon yang bervariasi atas pernyataan dengan jawaban “ya”. Dalam rancangan kuesioner ini jawaban “ya” menunjukkan makna telah melakukan peran yang positif terhadap upaya pengelolaan UMKM dengan arah yang benar atau mengarah pada tindakan yang efektif, oleh karena itu semakin banyak yang memberi jawaban “ya” memberi arti perannya sudah baik dan benar.

Jawaban “ya” di dalam kuesioner nantinya akan dipergunakan sebagai dasar menyusun *mapping* yang menggambarkan tentang karakteristik peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM. Jawaban “ya” dalam tabel diatas berada pada rentang prosentase yang tidak sama antara aspek satu dengan yang lainnya, maka untuk memudahkan memahami tabel tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Kebijakan kurikulum, jawaban “ya” 11% -100% dengan rata rata 38,4%
- b. Program klinik UMKM, jawaban “ya” 0% - 26% dengan rata rata 5,8%
- c. Program pelatihan UMKM, jawaban “ya” 0% - 11% dengan rata rata 7,8%
- d. Program pendampingan, jawaban “ya” 0% - 37% dengan rata rata 24,1%
- e. Bina mitra, jawaban “ya” 0% - 19% dengan rata rata 5,8%
- f. Program riset, jawaban “ya” 11% - 44% dengan rata rata 25,4%
- g. Publikasi ilmiah, jawaban “ya” 11% - 37% dengan rata rata 19,4%

Dari jawaban tersebut diatas menunjukkan masih perlunya perbaikan pada ketujuh aspek peran dari lembaga perguruan tinggi didalam pengelolaan UMKM agar menjadi lebih baik, karena peran yang dilakukan terhadap ketujuh aspek tersebut masih berkisar pada rata rata dibawah angka 40%. Bahkan untuk aspek program klinik, program pelatihan dan program bina mitra memiliki angka rata rata dibawah 8,0%. Program pendampingan, program riset dan publikasi karya ilmiah memiliki angka rata rata dibawah 26%, jadi perguruan tinggi harus melakukan redesain dalam pengembangan pengelolaan UMKM, hal ini untuk mendukung implementasi tridarma perguruan tinggi yang riil dan bermartabat bagi masyarakat.

5.3.2 Mapping Peran Stakeholder Dalam Pengelolaan UMKM

Tahapan ini bertujuan untuk pemetakan/*mapping* atas peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM pada kawasan wisata religi. Tujuan dari *Mapping* ini adalah untuk menggambarkan karakteristik peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam merumuskan suatu model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM yang efektif. Berdasarkan jawaban responden (nara sumber) atas pernyataan dengan memberi jawaban “ya”, maka selanjutnya dipergunakan untuk menyusun *mapping* peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM yang telah dilakukan selama ini terhadap praktek pengelolaan UMKM kawasan wisata religi kedalam tiga kategori jawaban “ya” yaitu:

1. Kategori rendah jika jawaban pernyataan “ya” $\leq 34\%$
2. Kategori sedang jika jawaban pernyataan “ya” 35% - 68%
3. Kategori tinggi jika jawaban pernyataan “ya” 69% - 100%

Untuk mengungkap peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM dapat dinyatakan kedalam empat peran: a) dinas koperasi, b) dinas pariwisata, c) lembaga perbankan dan d) lembaga perguruan tinggi. Berdasarkan pemetakan/*mapping* atas jawaban responden selanjutnya dapat dipergunakan sebagai rujukan dalam merumuskan “Model peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM yang efektif”, oleh karena itu *mapping* ini sangat berguna untuk mengenali karakteristik aspek peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM. Untuk menggambarkan secara detail atas jawaban pernyataan “ya” dan *mapping*nya dalam tabel sebagai berikut.

5.3.2.1 Peran Dinas Koperasi dan UMKM

Merujuk tabel 5.1 atas jawaban pernyataan “ya” maka dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori rendah, sedang dan tinggi, sehingga dapat di-*mapping*kan peran Dinas Koperasi dan UMKM sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 5.5. Untuk memetakan kondisi riil tentang kelima aspek peran dinas koperasi yang dikontribusikan selama ini dapat ditampilkan dalam tabel 5.5 sebagai berikut:

Tabel 5.5: Mapping Peran Dinas Koperasi

No	Butir Pertanyaan	Kondisi Riil UMKM		
		Rendah	Sedang	Tinggi
		≤ 34%	35-68%	69-100%
I. Kebijakan Pengembangan UMKM				
1	Memiliki kebijakan untuk mendorong pengembangan UMKM	-	-	100%
2	Kebijakan yang menyangkut aspek manajerial (tata kelola usaha)	-	-	75%
3	Kebijakan yang menyangkut aspek manajemen pemasaran	-	-	100%
4	Kebijakan menyangkut aspek manajemen produksi	-	-	100%
5	Kebijakan yang menyangkut aspek manajemen keuangan/ Akuntansi	-	-	75%
6	Kebijakan menyangkut aspek kompetensi/keterampilan Sumber Daya Manusia	-	-	100%
7	Kebijakan menyangkut aspek Perekayasaan/desain usaha	-	-	100%
8	Kebijakan yang menyangkut aspek promosi/memfasilitasi pameran	-	-	100%
9	Kebijakan yang menyangkut pemanfaatan aspek teknologi informasi	-	-	100%
10	Kebijakan yang menyangkut aspek akses permodalan	-	-	100%
11	Kebijakan yang menyangkut pada aspek kemitraan/akses memitran pelaku UMKM	-	-	75%
12	Kebijakan yang menyangkut aspek legalitas usaha atau aspek perijinan	-	-	100%
13	Kebijakan yang menyangkut pada perlindungan usaha (hak cipta/paten)	-	-	100%
	<i>Nilai Rata Rata</i>	-	-	94,2%
II. Program Klinik Bagi Pelaku UMKM				
1	Melakukan klinik yang terkait dengan aspek manajerial (tata kelola usaha)	-	-	75%
2	Melakukan klinik terkait aspek manajemen pemasaran	-	-	75%
3	Melakukan klinik terkait aspek manajemen produksi	-	-	100%
4	Melakukan klinik terkait aspek manajemen keuangan/ Akuntansi	-	-	75%
5	Melakukan klinik terkait aspek kompetensi/keterampilan SDM	-	-	75%
6	Melakukan klinik terkait aspek Perekayasaan/desain usaha	-	-	75%
7	Melakukan klinik terkait aspek promosi/memfasilitasi pameran	-	-	100%
8	Melakukan klinik terkait pemanfaatan aspek teknologi informasi	-	-	75%
9	Melakukan klinik terkait akses permodalan	-	-	75%
10	Melakukan klinik terkait akses kemitraan (memitran)	-	-	75%

11	Melakukan klinik terkait perijinan usaha/legalitas	-	-	75%
12	Melakukan klinik terkait perlindungan usaha (hak cipta/paten)	-	-	75%
	<i>Nilai Rata Rata</i>	-	-	79,2%
III. Program Pelatihan Bagi Pelaku UMKM				
1	Memberi pelatihan aspek manajerial (tata kelola usaha)	-	-	100%
2	Memberi pelatihan aspek manajemen pemasaran	-	-	100%
3	Memberi pelatihan aspek manajemen produksi	-	-	100%
4	Memberi pelatihan aspek manajemen keuangan/ Akuntansi	-	-	75%
5	Memberi pelatihan aspek kompetensi/keterampilan SDM	-	-	100%
6	Memberi pelatihan aspek Perencanaan/desain usaha	-	50%	-
7	Memberi pelatihan aspek promosi/memfasilitasi pameran	-	-	100%
8	Memberi pelatihan pemanfaatan aspek IT	-	50%	-
9	Memberi pelatihan akses permodalan	-	50%	-
10	Memberi pelatihan akses kemitraan (memitrakan)	-	-	75%
11	Memberi pelatihan perijinan usaha/legalitas	-	-	100%
12	Memberi pelatihan perlindungan usaha (hak cipta/paten)	-	-	100%
	<i>Nilai Rata Rata</i>	-	50,0%	94,4%
IV. Program Pendampingan Bagi Pelaku UMKM				
1	Melakukan pendampingan aspek manajerial (tata kelola)	-	50%	-
2	Melakukan pendampingan aspek manajemen pemasaran	-	50%	-
3	Melakukan pendampingan aspek manajemen produksi	-	-	75%-
4	Melakukan pendampingan aspek manajemen keuangan/ Akuntansi	-	50%	-
5	Melakukan pendampingan aspek keterampilan SDM	-	50%	-
6	Melakukan pendampingan aspek Perencanaan usaha	-	50%	-
7	Melakukan pendampingan aspek promosi/pameran	-	-	75%
8	Melakukan pendampingan pemanfaatan aspek IT	-	50%	-
9	Melakukan pendampingan akses permodalan	-	50%	-
10	Melakukan pendampingan akses kemitraan (memitrakan)	-	50%	-
11	Melakukan pendampingan perijinan usaha/legalitas	-	50%	-
12	Melakukan pendampingan perlindungan usaha (hak cipta)	-	50%	-
	<i>Nilai Rata Rata</i>	-	50,0%	75,0%
V. Bina Mitra Dalam Pengembangan UMKM				
1	Melakukan koordinasi program dengan Dinas Pariwisata	-	50%	-
2	Melakukan koordinasi program terpadu dengan Lembaga Perbankan	-	-	100%
3	Melakukan koordinasi program dengan Perguruan Tinggi	-	50%	-
4	Melakukan koordinasi program dengan tokoh masyarakat/pemuka agama	-	50%	-
5	Melakukan kerjasama dengan Dinas Pariwisata terkait dengan pengelolaan UMKM	-	-	75%
6	Melakukan kerjasama dengan Lembaga Perbankan terkait UMKM	-	-	100%
7	Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi terkait UMKM	-	50%	-
8	Melakukan kerjasama dengan tokoh masyarakat terkait UMKM	25%	-	-
9	Melakukan kajian bersama dengan Dinas Pariwisata terkait UMKM	-	50%	-
10	Melakukan kajian bersama dengan Perbankan yang terkait pengelolaan UMKM	-	50%	-
11	Melakukan kajian bersama dengan Perguruan Tinggi yang terkait dengan pengelolaan UMKM	25%	-	-
12	Melakukan kajian bersama dengan tokoh masyarakat terkait UMKM	-	50%	-

13	Menjalankan program khusus dengan pelaku UMKM pada kawasan wisata religi	25%	-	-
14	Melakukan klinik & pelatihan dengan UMKM kawasan wisata religi	25%	-	-
15	Melakukan pendampingan dengan UMKM pada kawasan wisata religi	25%	-	-
	Nilai Rata Rata	25,0%	50,0%	91,7%

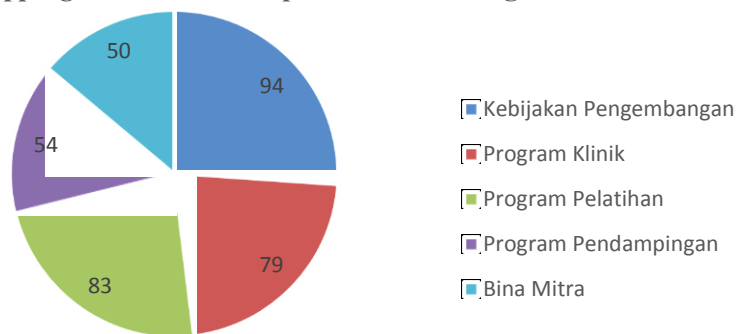
Sumber: Diolah oleh Penulis

Mapping atas jawaban “ya” dari responden menggambarkan suatu keadaan riil bahwa *stakeholder* telah melakukan perannya dalam pengelolaan UMKM pada arah yang benar, oleh karena itu semakin besar prosentase jawaban “ya” berarti menunjukkan peran *stakeholder* semakin optimal dalam mendukung pengelolaan UMKM. Berdasarkan *mapping* tersebut diatas dapat dijelaskan keterkaitan peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM dalam angka prosentase rata rata sebagai berikut:

- Kebijakan pengembangan, rata rata responden menjawab “ya” 94,2%
- Program klinik UMKM, rata rata responden menjawab “ya” 79,2%
- Program pelatihan UMKM, rata rata responden menjawab “ya” 83,3%
- Program pendampingan, rata rata responden menjawab “ya” 54,2%
- Bina mitra, rata rata responden menjawab “ya” 50,0%

Program pendampingan dan program bina mitra pengembangan, selama ini masih belum dilakukan secara optimal karena dari jawaban “ya” dari narasumber baru menunjukkan angka rata rata sekitar 50% sehingga perlu meningkatkan peran dinas koperasi dimasa mendatang. Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang posisi peran *stakeholder* yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, maka dapat ditampilkan melalui gambar 5.1 sebagai berikut:

Mapping Peran Dinas Koperasi Dalam Pengelolaan UMKM



Gambar 5.1: Peran Dinas Koperasi Dalam Pengelolaan UMKM

Hasil *mapping* gambar 5.1 menunjukkan bahwa perumusan dalam model ini perlu untuk menekankan pentingnya mengembangkan program pendampingan dan bina mitra yang harus dilakukan oleh dinas koperasi, agar perannya kedepan dalam pengelolaan UMKM menjadi lebih optimal dan dapat memberi kontribusi riil bagi kemajuan bisnis UMKM.

5.3.2.2 Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Merujuk tabel 5.2 atas jawaban pernyataan “ya” maka dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori rendah, sedang dan tinggi, sehingga dapat di-*mapping*kan peran Dinas Pariwisata sebagaimana yang ditampilkan seperti pada tabel 5.6. Untuk memetakan kondisi riil tentang kelima aspek peran dinas pariwisata yang di kontribusikan selama ini dapat ditampilkan dalam tabel 5.6 sebagai berikut:

Tabel 5.6: Mapping Peran Dinas Pariwisata

No	Butir Pertanyaan	Kondisi Riil UMKM		
		Rendah ≤ 34%	Sedang 35-68%	Tinggi 69-100%
I. Kebijakan Pengembangan UMKM				
1	Memiliki kebijakan untuk mendorong pengembangan UMKM dan Pariwisata	25%	-	-
2	Kebijakan yang menyangkut aspek manajerial (tata kelola usaha) UMKM	25%	-	-
3	Kebijakan yang menyangkut aspek manajemen pemasaran	25%	-	-
4	Kebijakan menyangkut aspek manajemen industri kreatif	-	50%	-
5	Kebijakan yang menyangkut aspek manajemen keuangan/ Akuntansi	-	50%	-
6	Kebijakan menyangkut aspek kompetensi/keterampilan sumber daya manusia	-	50%	-
7	Kebijakan menyangkut aspek Perekayasaan/desain usaha	25%	-	-
8	Kebijakan yang menyangkut aspek promosi/memfasilitasi pameran	-	-	75%
9	Kebijakan yang menyangkut pemanfaatan aspek teknologi informasi	25%	-	-
10	Kebijakan yang menyangkut aspek permodalan	-	50%	-
11	Kebijakan yang menyangkut dengan aspek kemitraan (memitragkan)	-	50%	-
12	Kebijakan menyangkut aspek perijinan usaha/legalitas	-	50%	-
13	Kebijakan yang menyangkut perlindungan pada dunia usaha (hak cipta/paten)	-	50%	-
	<i>Nilai Rata Rata</i>	25,0%	50,0%	75,0%
II. Program Klinik Bagi Pelaku UMKM				
1	Melakukan klinik yang terkait aspek manajerial (tata kelola usaha) UMKM dan Pariwisata	25%	-	-
2	Melakukan klinik terkait aspek manajemen pemasaran	-	50%	-
3	Melakukan klinik terkait aspek manajemen industri kreatif	-	50%	-
4	Melakukan klinik terkait aspek manajemen keuangan/ Akuntansi	-	50%	-

5	Melakukan klinik terkait aspek kompetensi/keterampilan SDM	-	50%	-
6	Melakukan klinik terkait aspek Perencanaan/desain usaha	25%	-	-
7	Melakukan klinik yang terkait aspek promosi produk/memfasilitasi keikutsertaan dalam pameran	-	50%	-
8	Melakukan klinik terkait pemanfaatan aspek teknologi informasi	-	50%	-
9	Melakukan klinik terkait akses permodalan	-	50%	-
10	Melakukan klinik terkait akses kemitraan (memitrakan)	-	50%	-
11	Melakukan klinik terkait perijinan usaha/legalitas	-	50%	-
12	Melakukan klinik terkait perlindungan usaha (hak cipta/paten)	-	50%	-
	<i>Nilai Rata Rata</i>	25,0%	50,0%	-
III. Program Pelatihan Bagi Pelaku UMKM				
1	Memberi pelatihan aspek manajerial (tata kelola usaha) UMKM dan pariwisata	-	50%	-
2	Memberi pelatihan aspek manajemen pemasaran	-	50%	-
3	Memberi pelatihan aspek manajemen industri kreatif	-	50%	-
4	Memberi pelatihan aspek manajemen keuangan/ Akuntansi	-	50%	-
5	Memberi pelatihan aspek kompetensi/keterampilan SDM	-	50%	-
6	Memberi pelatihan aspek Perencanaan/desain usaha	-	50%	-
7	Memberi pelatihan aspek promosi/memfasilitasi pameran	-	-	75%
8	Memberi pelatihan pemanfaatan aspek IT	-	50%	-
9	Memberi pelatihan akses permodalan	-	50%	-
10	Memberi pelatihan akses kemitraan (memitrakan)	-	50%	-
11	Memberi pelatihan perijinan usaha/legalitas	-	50%	-
12	Memberi pelatihan perlindungan usaha (hak cipta/paten)	-	50%	-
	<i>Nilai Rata Rata</i>	-	50,0%	75,0%
IV. Program Pendampingan Bagi Pelaku UMKM				
1	Melakukan pendampingan aspek manajerial (tata kelola)	25%	-	-
2	Melakukan pendampingan aspek manajemen pemasaran	25%	-	-
3	Melakukan pendampingan aspek manajemen pada industri kreatif	-	-	75%
4	Melakukan pendampingan aspek manajemen keuangan/ Akuntansi	-	50%	-
5	Melakukan pendampingan aspek keterampilan SDM	-	50%	-
6	Melakukan pendampingan aspek Perencanaan usaha	25%	-	-
7	Melakukan pendampingan aspek promosi/pameran	-	50%	-
8	Melakukan pendampingan pemanfaatan aspek IT	-	50%	-
9	Melakukan pendampingan akses permodalan	-	50%	-
10	Melakukan pendampingan akses kemitraan (memitrakan)	-	50%	-
11	Melakukan pendampingan perijinan usaha/legalitas	-	50%	-
12	Melakukan pendampingan perlindungan usaha (paten)	-	50%	-
	<i>Nilai Rata Rata</i>	25,0%	50,0%	75,0%
V. Bina Mitra Dalam Pengembangan UMKM				
1	Melakukan koordinasi program dengan Dinas Koperasi & UMKM	-	50%	-
2	Melakukan koordinasi program terpadu dengan Lembaga Perbankan	25%	-	-
3	Melakukan koordinasi program dengan Perguruan Tinggi	-	50%	-
4	Melakukan koordinasi program dengan tokoh masyarakat/pemuka agama	-	50%	-
5	Melakukan kerjasama dengan Dinas Koperasi yang terkait pengembangan UMKM	-	50%	-
6	Melakukan kerjasama dengan Lembaga Perbankan terkait UMKM	25%	-	-

7	Melakukan kerjasama dengan lembaga Perguruan Tinggi yang terkait dengan pengembangan UMKM	25%	-	-
8	Melakukan kerjasama dengan tokoh masyarakat/pemuka agama	25%	-	-
9	Melakukan kajian bersama dengan Dinas Koperasi terkait UMKM	-	50%	-
10	Melakukan kajian bersama dengan lembaga Perbankan terkait dengan pengembangan UMKM	25%	-	-
11	Melakukan kajian bersama dengan lembaga Perguruan Tinggi terkait dengan pengembangan UMKM	25%	-	-
12	Melakukan kajian bersama dengan tokoh masyarakat/pemuka agama	-	50%	-
13	Menjalankan program khusus dengan pelaku pariwisata kawasan wisata religi	-	-	75%
14	Mengadakan klinik dan pelatihan dgn pelaku pariwisata pada kawasan wisata religi	-	50%	-
15	Menjalankan program pendampingan dengan pelaku pariwisata pada kawasan wisata religi	-	50%	-
	<i>Nilai Rata Rata</i>	25,0%	50,0%	75,0%

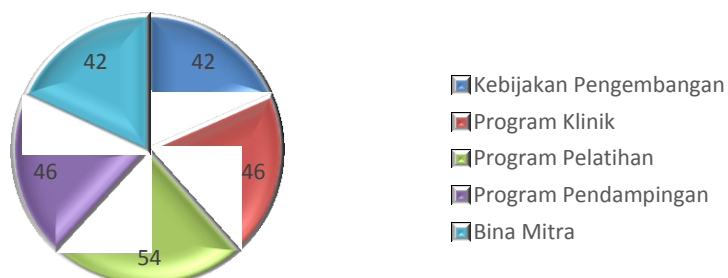
Sumber: Diolah oleh Penulis

Mapping atas jawaban “ya” dari responden menggambarkan suatu keadaan riil bahwa *stakeholder* telah melakukan perannya dalam pengelolaan UMKM pada arah yang benar, oleh karena itu semakin besar prosentase jawaban “ya” berarti menunjukkan peran *stakeholder* semakin optimal. Berdasarkan *mapping* tersebut diatas dapat dijelaskan keterkaitan peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM dalam angka prosentase rata rata sebagai berikut:

- Kebijakan pengembangan, rata rata responden menjawab “ya” 42,3%
- Program klinik UMKM, rata rata responden menjawab “ya” 45,8%
- Program pelatihan UMKM, rata rata responden menjawab “ya” 54,2%
- Program pendampingan, rata rata responden menjawab “ya” 45,8%
- Bina mitra, rata rata responden menjawab “ya” 41,7%

Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang posisi peran *stakeholder* dari Dinas Pariwisata, maka dapat ditampilkan pada gambar 5.2 sebagai berikut:

***Mapping* Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan UMKM**



Gambar 5.2: Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan UMKM

Hasil *mapping* gambar 5.2 menunjukkan bahwa perumusan dalam model ini harus menekankan pentingnya mengembangkan lima aspek yang dilakukan oleh dinas pariwisata, agar perannya kedepan dalam pengelolaan UMKM menjadi lebih optimal dan dapat memberi kontribusi riil bagi pengembangan UMKM serta mendorong kemandirian UMKM menuju bisnis yang kuat dan dinamis.

5.3.2.3 Peran Lembaga Perbankan

Merujuk tabel 5.3 atas jawaban pernyataan “ya” maka dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori rendah, sedang dan tinggi, sehingga dapat di-*mapping*kan peran lembaga perbankan sebagaimana yang ditampilkan seperti tabel 5.7. Untuk memetakan kondisi riil tentang kelima aspek peran lembaga perbankan yang telah di kontribusikan selama ini untuk pengelolaan UMKM dapat ditampilkan dalam tabel 5.7 sebagai berikut:

Tabel 5.7: Mapping Peran Lembaga Perbankan

No	Butir Pertanyaan	Kondisi Riil UMKM		
		Rendah ≤ 34%	Sedang 35-68%	Tinggi 69-100%
I. Kebijakan Pengembangan UMKM				
1	Memiliki kebijakan strategis dalam rangka mendorong pengembangan UMKM	-	-	100%
2	Kebijakan untuk mendorong penerapan manajerial (tata kelola usaha)	-	-	75%
3	Memiliki kebijakan untuk mendorong penerapan yang terkait dengan manajemen pemasaran	-	-	83%
4	Kebijakan yang mendorong penerapan manajemen industri kreatif	-	67%	-
5	Memiliki kebijakan untuk mendorong penerapan terkait manajemen keuangan/Akuntansi	-	-	83%
6	Memiliki kebijakan mendorong peningkatan kompetensi/keterampilan SDM	-	67%	-
7	Memiliki kebijakan untuk mendorong pengembangan Perencanaan/desain usaha	-	67%	-
8	Kebijakan mendorong melakukan promosi/memfasilitasi pameran	-	58%	-
9	Kebijakan mendorong penggunaan teknologi informasi	33%	-	-
10	Kebijakan mendorong pemanfaatan akses permodalan	-	-	83%
11	Kebijakan mendorong melakukan kemitraan (memitirakan)	-	58%	-
12	Kebijakan mendorong pengurusan perijinan usaha/legalitas	-	67%	-
13	Kebijakan mendorong pengurusan hak cipta/paten	-	50%	-
	<i>Nilai Rata Rata</i>	33,0%	62,0%	85,4%
II. Program Penyaluran & Pengelolaan Kredit UMKM				
1	Menyediakan kredit modal kerja (jangka pendek) untuk UMKM	-	-	79%
2	Menyediakan kredit investasi (jangka panjang) untuk UMKM	-	67%	-

3	Menyediakan kredit UMKM, tanpa persyaratan aset tetap	-	67%	-
4	Menyediakan kredit UMKM, dengan jaminan kelayakan usaha	-	50%	-
5	Melakukan kunjungan ke lokasi usaha pasca pemberian kredit	-	67%	-
6	Melakukan monitoring atas penggunaan kredit oleh pelaku UMKM	-	-	92%
7	Evaluasi perkembangan usaha pelaku UMKM minimal setahun sekali	-	-	83%
8	Evaluasi jumlah kredit UMKM minimal sekali dalam satu tahun	-	-	83%
9	Menyediaan konsultasi pengajuan kredit bagi pelaku UMKM	-	-	83%
10	Menyediakan konsultasi untuk pengelolaan kredit yang diterima	-	-	83%
11	Menyediakan konsultasi untuk pengembangan usaha bagi pelaku UMKM	-	50%	-
12	Menyediakan bimbingan saat UMKM sedang menghadapi kesulitan bisnis/usaha	-	42%	-
	<i>Nilai Rata Rata</i>	-	57,2%	83,8%
III. Program Klinik Manajemen Bagi Pelaku UMKM				
1	Menyediakan klinik terkait aspek manajerial (tata kelola usaha)	33%	-	-
2	Menyediakan klinik terkait aspek manajemen pemasaran	33%	-	-
3	Menyediakan klinik terkait aspek manajemen industri kreatif	25%	-	-
4	Menyediakan klinik terkait aspek manajemen keuangan/Akuntansi	-	50%	-
5	Menyediakan klinik terkait aspek kompetensi/keterampilan sumber daya manusia	25%	-	-
6	Menyediakan klinik yang terkait aspek Perencanaan/desain usaha	33%	-	-
7	Menyediakan klinik terkait aspek promosi/memfasilitasi pameran	33%	-	-
8	Menyediakan klinik terkait pemanfaatan aspek teknologi informasi	33%	-	-
9	Menyediakan klinik terkait akses permodalan	-	67%	-
10	Menyediakan klinik terkait akses kemitraan (memitrakan)	25%	-	-
11	Menyediakan klinik terkait perijinan usaha/legalitas	25%	-	-
12	Menyediakan klinik yang terkait perlindungan usaha (hak cipta/paten)	17%	-	-
	<i>Nilai Rata Rata</i>	28,2%	58,5%	-
IV. Program Kunjungan/Pendampingan Bagi Pelaku UMKM				
1	Memberi pendampingan aspek manajerial (tata kelola)	25%	-	-
2	Memberi pendampingan aspek manajemen pemasaran	33%	-	-
3	Memberi pendampingan aspek manajemen industri kreatif	17%	-	-
4	Memberi pendampingan aspek manajemen keuangan/Akt	-	50%	-
5	Memberi pendampingan aspek keterampilan SDM	-	42%	-
6	Memberi pendampingan aspek Perencanaan usaha	25%	-	-
7	Memberi pendampingan aspek promosi/pameran	-	42%	-
8	Memberi pendampingan pemanfaatan aspek IT	17%	-	-
9	Memberi pendampingan akses permodalan	-	-	83%
10	Memberi pendampingan akses kemitraan (memitrakan)	-	42%	-
11	Memberi pendampingan perijinan usaha/legalitas	25%	-	-
12	Memberi pendampingan perlindungan usaha (paten)	33%	-	-
	<i>Nilai Rata Rata</i>	25,0%	44,0%	83,0%

V. Bina Mitra Dalam Pengembangan UMKM				
1	Melakukan koordinasi program dengan Dinas Koperasi & UMKM	25%	-	-
2	Melakukan koordinasi program dengan Dinas Pariwisata	17%	-	-
3	Melakukan koordinasi program dengan Perguruan Tinggi	17%	-	-
4	Melakukan koordinasi program terpadu dengan tokoh masyarakat/pemuka agama/lembaga lain	17%	-	-
5	Melakukan kerjasama dengan Dinas Koperasi terkait dengan pengembangan UMKM	25%	-	-
6	Melakukan kerjasama dengan Dinas Pariwisata terkait dengan pengembangan UMKM	17%	-	-
7	Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi terkait dengan pengembangan UMKM	-	42%	-
8	Melakukan kerjasama dengan tokoh masyarakat/pemuka agama/lembaga lain	17%	-	-
9	Melakukan kajian bersama dengan Dinas Koperasi terkait dengan pengembangan UMKM	33%	-	-
10	Melakukan kajian bersama dengan Dinas Pariwisata terkait dengan pengembangan UMKM	25%	-	-
11	Melakukan kajian bersama dengan Perguruan Tinggi terkait dengan pengembangan UMKM	33%	-	-
12	Melakukan kajian bersama dengan tokoh masyarakat/pemuka agama/lembaga lain	17%	-	-
13	Menjalankan program khusus terkait pengembangan UMKM pada kawasan wisata religi	8%	-	-
14	Menjalankan program klinik dan pelatihan dgn pelaku UMKM pada kawasan wisata religi	8%	-	-
15	Menjalankan program pendampingan terkait dengan pengembangan UMKM pada kawasan wisata religi	8%	-	-
	<i>Nilai Rata Rata</i>	7,9%	42,0%	-

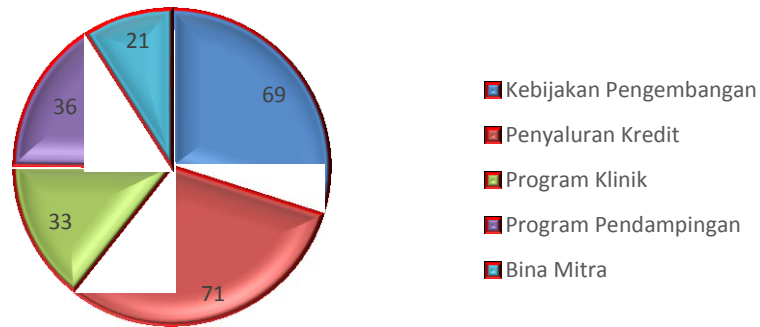
Sumber: Diolah oleh Penulis

Mapping atas jawaban “ya” dari responden menggambarkan suatu keadaan riil bahwa *stakeholder* telah melakukan perannya dalam pengelolaan UMKM pada arah yang benar, oleh karena itu semakin besar prosentase jawaban “ya” berarti menunjukkan peran *stakeholder* semakin optimal. Berdasarkan *mapping* tersebut diatas dapat dijelaskan keterkaitan peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM dalam angka prosentase rata rata sebagai berikut:

- a. Kebijakan pengembangan, rata rata responden menjawab “ya” 68,5%
- b. Program penyaluran kredit UMKM, rata rata responden menjawab “ya” 70,5%
- c. Program klinik manajemen, rata rata responden menjawab “ya” 33,25%
- d. Program pendampingan, rata rata responden menjawab “ya” 36,2%
- e. Bina mitra, rata rata responden menjawab “ya” 20,6%

Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang posisi peran *stakeholder* yang dilakukan oleh lembaga perbankan, maka dapat ditampilkan melalui gambar 5.3 sebagai berikut:

Mapping Peran Perbankan Dalam Pengelolaan UMKM



Gambar 5.3: Peran Lembaga Perbankan Dalam Pengelolaan UMKM

Hasil *mapping* gambar 5.3 menunjukkan bahwa perumusan dalam model ini harus mengembangkan aspek klinik manajemen, aspek pendampingan dan aspek bina mitra menjadi lebih baik lagi. Peran perbankan masih belum optimal dalam memberi kontribusi terhadap pengelolaan UMKM, jika lembaga perbankan dapat mendorong perannya lebih baik lagi, tentunya kedepan akan memperoleh manfaat dari kemajuan bisnis UMKM sehingga dampaknya juga memberi kemajuan bagi lembaga perbankan itu sendiri.

5.3.2.4 Peran Perguruan Tinggi

Merujuk tabel 5.4 atas jawaban pernyataan “ya” maka dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori rendah, sedang dan tinggi, sehingga dapat di-*mapping*kan peran lembaga perguruan tinggi sebagaimana yang ditampilkan seperti tabel 5.8. Untuk memetakan kondisi riil tentang tujuh aspek peran lembaga perguruan tinggi yang telah diberikan selama ini dapat ditampilkan dalam tabel 5.8 sebagai berikut:

Tabel 5.8: Mapping Peran Perguruan Tinggi

No	Butir Pertanyaan	Kondisi Riil UMKM		
		Rendah ≤ 34%	Sedang 35-68%	Tinggi 69-100%
I. Kebijakan Kurikulum Kewirausahaan & Program Magang				
1	Mata Kuliah Kewirausahaan masuk dalam kurikulum program studi	-	-	100%
2	Mata Kuliah Kewirausahaan memberi praktek langsung di lapangan	-	-	100%
3	Program magang pada kelompok UMKM masuk dalam kurikulum	-	37%	-

4	Program studi mendesain khusus materi program magang/praktek	26%	-	-
5	Materi Magang meliputi aspek manajemen Pemasaran, manajemen keuangan, manajemen SDM dan Manajemen keuangan/akuntansi	-	44%	-
6	Program magang pada kelompok UMKM sudah dijalankan selama tiga tahun terakhir (tahun 2016, 2017 dan tahun 2018)	-	37%	-
7	Program magang pada kelompok UMKM sudah dilakukan secara berkelanjutan (2016 - 2018) pada tempat yang sama	11%	-	-
8	Program magang selama tiga tahun terakhir (tahun 2016 - 2018) pada kelompok UMKM telah mencapai target yang diinginkan oleh Prodi	26%	-	-
9	Program magang pada kelompok UMKM diikuti oleh 4-8 mahasiswa	19%	-	-
10	Program magang oleh mahasiswa disediakan dosen pendamping yang memiliki pemahaman yang memadai tentang bisnis UMKM	-	37%	-
11	Laporan hasil magang mahasiswa dijadikan umpan balik bagi pelaku UMKM (dilakukan sosialisasi hasil magang)	-	37%	-
12	Laporan hasil magang mahasiswa dijadikan rujukan untuk mendesain program lanjutan Prodi dalam pengembangan UMKM	26%	-	-
13	Pelaksanaan program magang selalu dievaluasi setiap akhir tahun oleh Prodi dalam rangka pengembangan manajemen UMKM	26%	-	-
14	Program studi ini telah menyediakan pendanaan untuk mendukung kebijakan kurikulum kewirausahaan dan program magang sejak tiga tahun terakhir (2016-2018)	11%	-	-
	<i>Nilai Rata Rata</i>	20,7%	38,6%	100%
II. Program Klinik Bagi Pelaku UMKM				
1	Program studi sudah memiliki sentra pelayanan/klinik UMKM	11%	-	-
2	Sentra pelayanan/klinik UMKM sudah menjadi bagian dari struktur organisasi formal dari Fakultas Ekonomi/program studi	11%	-	-
3	Sentra pelayanan/klinik UMKM sudah ada sejak tiga tahun terakhir	11%	-	-
4	Sentra pelayanan/klinik UMKM telah dikelola oleh unit sendiri yang pengelolaannya tidak merangkap jabatan struktural di fakultas/prodi	0%	-	-
5	Sentra pelayanan/klinik UMKM dikelola oleh dosen atau profesi lain yang memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang bisnis UMKM	19%	-	-
6	Sentra pelayanan/klinik UMKM memberi pelayanan yang meliputi aspek manajemen pemasaran, aspek manajemen operasional, aspek manajemen SDM dan manajemen keuangan/akuntansi	26%	-	-
7	Sentra pelayanan/klinik UMKM memberi pelayanan dengan jadwal reguler setiap minggu (jadwal hari dan jam yang sudah diatur)	11%	-	-
8	Sentra pelayanan/klinik UMKM memberi pelayanan manajemen hanya di kampus saja sesuai jadwal yang telah ditentukan	11%	-	-
9	Sentra pelayanan/klinik UMKM juga memberi pelayanan manajemen langsung di tempat UMKM sesuai prioritas yang disepakati bersama	26%	-	-

10	Sentra pelayanan/klinik UMKM telah mengintegrasikan program layanan manajemen dengan program magang mahasiswa secara reguler	11%	-	-
11	Sentra pelayanan/klinik UMKM telah menjalin kemitraan dengan dinas koperasi, lembaga perbankan, unit koperasi, dinas pariwisata	0%	-	-
12	Kegiatan sentra pelayanan/klinik UMKM selalu dievaluasi program kerjanya setiap tahun agar dapat mengikuti perkembangan UMKM	11%	-	-
13	Program studi ini telah menyediakan pendanaan untuk mendukung program klinik bagi pelaku UMKM sejak tiga tahun terakhir (2016-2018)	0%	-	-
	<i>Nilai Rata Rata</i>	11,4%	-	-
III. Program Pelatihan Bagi Pelaku UMKM				
1	Prodi ini memiliki program pelatihan manajemen untuk UMKM	11%	-	-
2	Pelatihan manajemen untuk UMKM melibatkan dosen atau profesi lain yang memiliki pengetahuan mumpuni dengan aktivitas UMKM	11%	-	-
3	Program pelatihan manajemen untuk pelaku UMKM meliputi aspek manajemen pemasaran, operasional, SDM dan keuangan/akuntansi	11%	-	-
4	Program pelatihan manajemen telah dilakukan selama tiga tahun terakhir (2016-2018) dengan jadwal yang teratur dan berkelanjutan	0%	-	-
5	Program pelatihan manajemen merupakan bagian dari program sentra layanan/klinik UMKM yang dimiliki oleh fakultas/program studi	0%	-	-
6	Program pelatihan manajemen UMKM, juga diminati oleh pelaku UMKM lain melalui permintaan secara langsung dan formal	11%	-	-
7	Program pelatihan manajemen memberi manfaat positif bagi pelaku UMKM dan pengembangan usahanya	11%	-	-
8	Program pelatihan manajemen juga menjalin mitra dengan dinas koperasi & UMKM, perbankan, dinas pariwisata, koperasi dan lainnya	11%	-	-
9	Program pelatihan manajemen selalu dievaluasi program kerjanya setiap tahun agar dapat mengikuti perkembangan bisnis UMKM	11%	-	-
10	Program studi ini telah menyediakan pendanaan untuk mendukung program pelatihan bagi pelaku UMKM sejak tiga tahun terakhir (2016-2018)	0%	-	-
	<i>Nilai Rata Rata</i>	7,7%	-	-
IV. Program Pendampingan Bagi Pelaku UMKM				
1	Prodi ini memiliki program pendampingan manajemen untuk pelaku UMKM	-	37%	-
2	Program pendampingan manajemen untuk UMKM telah melibatkan dosen/profesi lain yang memiliki pengetahuan mumpuni terkait aktivitas UMKM	-	37%	-
3	Program pendampingan manajemen untuk pelaku UMKM meliputi aspek manajemen pemasaran, operasional, SDM dan keuangan/akt	-	37%	-
4	Program pendampingan manajemen telah dilakukan selama tiga tahun terakhir (2016-2018) dengan jadwal yang teratur dan berkelanjutan	26%	-	-

5	Program pendampingan manajemen merupakan bagian dari program sentra layanan/klinik UMKM yang dimiliki fakultas/program studi	0%	-	-
6	Program pendampingan manajemen untuk UMKM, juga diminati oleh pelaku UMKM lain melalui permintaan secara langsung dan formal	11%	-	-
7	Program pendampingan manajemen telah memberi manfaat positif bagi pelaku UMKM dan pengembangan usahanya	26%	-	-
8	Program pendampingan manajemen juga menjalin mitra dengan dinas koperasi, lembaga perbankan, dinas koperasi, dinas pariwisata dan lainnya	-	37%	-
9	Program pendampingan manajemen dievaluasi program kerjanya setiap tahun agar dapat mengikuti perkembangan bisnis UMKM	26%	-	-
10	Program studi ini telah menyediakan pendanaan untuk mendukung program pendampingan bagi pelaku UMKM sejak tiga tahun terakhir (2016-2018)	0%	-	-
	<i>Nilai Rata Rata</i>	8,9%	37,0%	-
V. Bina Mitra Dalam Pengembangan UMKM				
1	8. Bina Mitra Dalam Pengembangan UMKM	0%	-	-
2	Melakukan koordinasi program dengan Dinas Koperasi & UMKM	0%	-	-
3	Melakukan koordinasi program dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	19%	-	-
4	Melakukan koordinasi program Prodi dengan Lembaga perbankan/instansi lain	11%	-	-
5	Melakukan koordinasi program dengan tokoh masyarakat/pemuka agama/pelaku bisnis	0%	-	-
6	Memiliki program kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM	0%	-	-
7	Memiliki program kerjasama dengan Dinas Pariwisata & Kebudayaan	19%	-	-
8	Memiliki program kerjasama dengan Lembaga perbankan/instansi lain	11%	-	-
9	Memiliki program kerjasama dengan tokoh masyarakat/pemuka agama/pelaku bisnis	0%	-	-
10	Kajian bersama dengan Dinas Koperasi & UMKM	0%	-	-
11	Kajian bersama dengan Dinas Pariwisata & Kebudayaan	0%	-	-
12	Kajian bersama dengan Lembaga perbankan/instansi lain	11%	-	-
13	Kajian bersama dengan tokoh masyarakat/pemuka agama	0%	-	-
14	Memiliki program khusus dengan Sentra UMKM kawasan wisata religi	11%	-	-
15	Mengadakan program klinik & pelatihan dengan UMKM kawasan wisata religi	11%	-	-
16	Melakukan program pendampingan dengan UMKM pada kawasan wisata religi	0%	-	-
	<i>Nilai Rata Rata</i>	5,8%	-	-
VI. Program Riset & Pengembangan UMKM				
1	Fakultas/Program studi memiliki tema/topik riset unggulan dibidang Koperasi dan UMKM	-	37%	-
2	Tema/topik riset unggulan fakultas/prodi selalu dievaluasi minimal lima tahun sekali	19%	-	-
3	Tema/riset unggulan bidang koperasi dan UMKM meliputi aspek manajemen UMKM, aspek strategi pengembangan	26%	-	-

	UMKM, daya saing UMKM, optimalisasi UMKM dan pemberdayaan UMKM			
4	Memiliki kelompok dosen (1-3 dosen) yang fokus risetnya dibidang Koperasi dan UMKM	26%	-	-
5	Program studi memiliki 2-5 dosen yang <i>roadmap</i> penelitiannya fokus pada bidang koperasi dan UMKM selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2016-2018)	19%	-	-
6	Dosen program studi ini telah menghasilkan 2-5 judul penelitian per tahun terkait dengan tema/topik koperasi dan UMKM selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2016-2018)	26%	-	-
7	Setiap dosen program studi memiliki <i>roadmap</i> dan tema penelitian yang disinkronkan dengan penulisan skripsi mahasiswanya minimal untuk kurun waktu satu tahun (dua semester)	-	37%	-
8	Program studi ini memiliki 2-4 dosen yang <i>roadmap</i> penelitiannya terkait dengan judul skripsi mahasiswanya dengan tema koperasi dan UMKM sejak tiga tahun terakhir (2016-2018)	19%	-	-
9	Program studi telah menghasilkan judul skripsi 3-6 per tahun dengan fokus kajian koperasi dan UMKM sejak tiga tahun terakhir (2016-2018)	19%	-	-
10	Program studi ini memiliki program <i>joint reasearch</i> antara dosen dan mahasiswanya dengan tema kajian koperasi dan UMKM sejak tiga tahun terakhir (2016-2018)	19%	-	-
11	<i>Joint reasearch</i> antara dosen dan mahasiswa di program studi ini telah menghasilkan penelitian 2-5 judul pertahun terkait tema koperasi dan UMKM sejak tiga tahun terakhir (2016-2018)	19%	-	-
12	<i>Roadmap</i> penelitian dosen terkait dengan tema skripsi mahasiswanya selalu dievaluasi minimal dua tahun sekali	26%	-	-
13	Tujuan evaluasi <i>roadmap</i> penelitian dosen, <i>roadmap</i> dan tema skripsi mahasiswa karena satu keinginan untuk mengikuti pengembangan dan kebutuhan bisnis UMKM	-	44%	-
14	Hasil riset dosen dan mahasiswa yang dimiliki program studi ini selalu diimplementasikan untuk memberi manfaat langsung bagi pelaku UMKM melalui program pengabdian masyarakat.	-	37%	-
15	Program studi ini telah menyediakan pendanaan untuk mendukung program riset dan pengembangan UMKM sejak tiga tahun terakhir (2016-2018)	11%	-	-
	<i>Nilai Rata Rata</i>	20,8%	38,7%	-
VII. Publikasi Ilmiah Tentang UMKM				
1	Program studi ini telah menargetkan publikasi karya ilmiah dosennya antara 2-5 judul pertahun pada jurnal nasional/internasional terkait tema koperasi dan UMKM sejak tiga tahun terakhir (2016-2018)	-	37%	-
2	Program studi ini telah menargetkan penyusunan buku ajar terkait dengan tema koperasi dan UMKM antara 2-5 judul pertahun sejak tiga tahun terakhir (2016-2018)	19%	-	-
3	Program studi ini telah menargetkan dosennya menjadi nara sumber/pembicara dalam seminar internasional/nasional terkait tema koperasi dan UMKM antara 2-5 judul pertahun sejak tiga tahun terakhir (2016-2018)	-	37%	-
4	Program studi ini telah menargetkan hak cipta (HKI) atas karya ilmiah dosennya terkait dengan koperasi dan UMKM	11%	-	-

	antara 2-5 judul pertahun sejak tiga tahun terakhir (2016-2018)			
5	Program studi ini telah menyediakan pendanaan untuk mendukung publikasi karya ilmiah dosennya antara 2-5 judul pertahun pada jurnal nasional/internasional terkait tema koperasi dan UMKM sejak tiga tahun terakhir (2016-2018)	11%	-	-
6	Program studi ini telah menyediakan pendanaan untuk mendukung penyusunan buku ajar terkait dengan koperasi dan UMKM antara 2-5 judul pertahun sejak tiga tahun terakhir (2016-2018)	11%	-	-
7	Program studi ini telah menyediakan pendanaan untuk mendukung dosennya menjadi nara sumber/pembicara dalam seminar nasional/ internasional terkait koperasi dan UMKM antara 2-5 judul pertahun sejak tiga tahun terakhir (2016-2018)	19%	-	-
8	Program studi ini telah menyediakan pendanaan untuk mendukung hak cipta (HKI) atas karya ilmiah dosennya terkait dengan koperasi dan UMKM antara 2-5 judul pertahun sejak tiga tahun terakhir (2016-2018)	11%	-	-
	<i>Nilai Rata Rata</i>	13,7%	37,0%	-

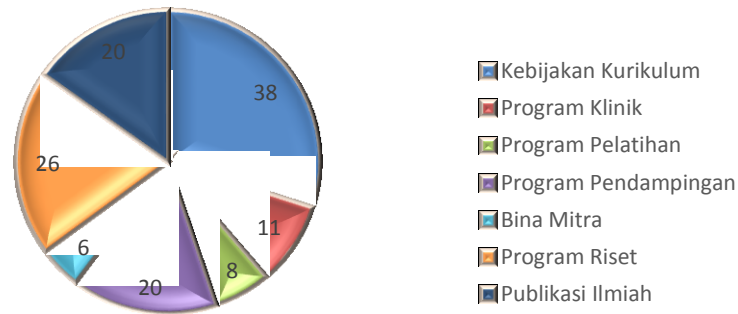
Sumber: Diolah oleh Penulis

Mapping atas jawaban “ya” dari responden menggambarkan suatu keadaan riil bahwa *stakeholder* telah melakukan perannya dalam pengelolaan UMKM pada arah yang benar, oleh karena itu semakin besar prosentase jawaban “ya” berarti menunjukkan peran *stakeholder* semakin optimal. Berdasarkan *mapping* tersebut diatas dapat dijelaskan keterkaitan peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM dalam angka prosentase rata rata sebagai berikut:

- a. Kebijakan kurikulum, rata rata responden menjawab “ya” 38,4%
- b. Program klinik manajemen, rata rata responden menjawab “ya” 11,4%
- c. Program klinik manajemen, rata rata responden menjawab “ya” 7,7%
- d. Program pendampingan, rata rata responden menjawab “ya” 20,0%
- e. Bina mitra, rata rata responden menjawab “ya” 5,80%
- f. Program riset, rata rata responden menjawab “ya” 25,6%
- g. Publikasi ilmiah, rata rata responden menjawab “ya” 19,5%

Data diatas menunjukkan bahwa ketujuh indikator yang terkait dengan peran perguruan tinggi hanya memiliki angka prosentase masih sangat rendah karena di bawah angka 25%, bahkan hanya ada satu indikator yang memiliki angka 38%. Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang posisi peran *stakeholder* yang dilakukan oleh lembaga perguruan tinggi, maka dapat ditampilkan melalui gambar 5.4 sebagai berikut:

Mapping Peran Perguruan Tinggi Dalam Pengelolaan UMKM



Gambar 5.4: Peran Perguruan Tinggi Dalam Pengelolaan UMKM

Hasil *mapping* gambar 5.4 menunjukkan bahwa perumusan dalam model ini perlunya untuk mengembangkan seluruh aspek lembaga perguruan tinggi, agar perannya kedepan dalam pengelolaan UMKM akan menjadi lebih optimal dan dapat memberi kontribusi riil bagi kemajuan aktivitas UMKM.

5.3.3 Merumuskan Model Optimalisasi Peran *Stakeholder*

Berdasarkan pada *mapping* tersebut, maka dapat dilihat keseluruhan nilai dari pernyataan responden pada masing masing aspek dan indikator yang diamati, selanjutnya dilakukan reduksi data (memilih) yang relevan untuk dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan “Model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan sentra UMKM” yang sesuai dengan karakteristik kawasan wisata religi. Pemilihan indikator dari setiap aspek didasarkan pada jawaban pernyataan “ya” yang masuk kategori rendah, karena isi pernyataannya ini menggambarkan peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM belum dilakukan dengan optimal, oleh karena itu perumusan ini bertujuan untuk menghasilkan suatu rumusan: “Model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM yang efektif” maka dapat diuraikan sebagai berikut:

5.3.3.1 Penentuan Titik Krusial Optimalisasi Peran *Stakeholder* Dalam Pengelolaan UMKM

Penentuan titik krusial merupakan tahapan untuk menemukan aspek penting yang menjadi kelemahan terkait optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM, oleh karena itu pemetakan karakteristik yang terkait peran *stakeholder*

dalam pengelolaan UMKM harus dicermati secara seksama sekaligus dijadikan instrumen untuk mengidentifikasi indikator penting yang dipergunakan untuk merumuskan suatu model yang relevan dengan karakteristik UMKM yang berada di kawasan wisata religi Jawa Timur. Untuk memberikan dasar pemikiran yang sistematis dan logis keterkaitan antara titik kritis dan perumusan model dapat diuraikan secara detail sebagai berikut:

1. Peran Dinas Koperasi dan UMKM

Mapping karakteristik peran dinas koperasi dalam pengelolaan UMKM sebagaimana ditunjukkan pada tabel 5.5, maka dapat ditemukan titik krusial yang sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka merumuskan model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM dengan uraian sebagai berikut:

- a. Aspek pelatihan masih terdapat tiga titik krusial yang harus menjadi perhatian yaitu pelatihan perekayasaan usaha, pemanfaatan IT dan akses permodalan, kebetulan tiga titik krusial ini harus ada keterlibatan dengan institusi lainnya karena keterbatas sumberdaya yang ada yang dimiliki oleh lembaga, sehingga diperlukan untuk membangun sinergi dengan institusi lainnya.
- b. Aspek pendampingan masih terdapat sepuluh titik krusial yang harus jadi pertimbangan serius khususnya menyangkut aspek pendampingan manajerial, hal ini tentu akan menyulitkan dinas koperasi untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang mumpuni dan memadai dalam rangka memberi pendampingan langsung baik dalam pengaturan jadwal maupun keberlanjutannya.
- c. Aspek bina mitra masih terdapat 13 titik krusial yang harus menjadi perhatian, khusus bina mitra dengan UMKM kawasan wisata religi masih sangat rendah oleh karena itu melakukan satu sinergi dengan institusi lain merupakan jalan bijak yang dapat mengatasi beberapa titik lemah dalam aspek pendampingan dan aspek bina mitra sehingga optimalisasi peran dinas koperasi untuk mendorong pengembangan dan pengelolaan UMKM menjadi semakin jelas.

2. Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Hasil *Mapping* terkait dengan karakteristik peran dinas pariwisata dalam pengelolaan UMKM sebagaimana ditampilkan pada tabel 5.6, maka dapat di

temukan titik krusial yang sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka merumuskan model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Aspek pengembangan masih memiliki 12 titik krusial yang harus mendapat perhatian khususnya terkait pengembangan manajerial, manajemen tatakelola, pemanfaatan IT, perekayasaan bisnis.
- b. Aspek klinik masih terdapat 12 titik krusial yang menyangkut pengembangan manajerial, manajemen, perekayasaan bisnis serta pemanfaatan IT.
- c. Aspek pelatihan masih terdapat 12 titik krusial yang harus menjadi perhatian yaitu semua unsur pelatihan masih sangat lemah.
- d. Aspek pendampingan masih terdapat 11 titik krusial yang harus menjadi pertimbangan serius khususnya menyangkut aspek pendampingan manajerial, hal ini tentu akan menyulitkan dinas koperasi untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang mumpuni dan memadai dalam rangka memberi pendampingan langsung baik dalam pengaturan jadwal maupun keberlanjutannya.
- e. Aspek bina mitra masih terdapat 14 titik krusial yang harus menjadi perhatian, lebih khusus bina mitra dengan UMKM kawasan wisata religi masih sangat rendah, oleh karena itu melakukan satu sinergi dengan institusi lain merupakan jalan bijak untuk mengatasi beberapa titik lemah dalam aspek pendampingan dan aspek bina mitra sehingga optimalisasi peran dinas pariwisata mendorong pengembangan dan pengelolaan UMKM menjadi semakin jelas, baik dalam penentuan jadwalnya dan menjamin keberlanjutannya agar perannya menjadi lebih optimal.

3. Peran Lembaga Perbankan

Mengacu hasil *Mapping* yang terkait dengan karakteristik peran lembaga perbankan dalam pengelolaan UMKM sebagaimana ditampilkan pada tabel 5.7 maka dapat di temukan titik krusial yang sangat penting untuk diperhatikan dalam merumuskan model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM:

- a. Aspek klinik manajemen masih terdapat 12 titik lemah,
- b. Aspek pendampingan terdapat 11 titik lemah
- c. Aspek bina mitra terdapat 15 titik lemah

Peran lembaga perbankan akan menjadi semakin strategis jika ada upaya riil melakukan sinergi dengan institusi lainnya khususnya dengan lembaga perguruan tinggi dalam menyediakan sumberdaya manusia, modal pengetahuan dan alokasi waktu yang memadai dan konsisten. Sinergi antar institusi harus menjadi langkah strategis dalam rangka menuju optimalisasi peran lembaga perbankan dalam pengembangan dan pengelolaan UMKM, oleh karena itu keterbatasan sumberdaya bukan suatu hambatan dalam meningkatkan peran institusi untuk kemajuan dan perkembangan ekonomi rakyat khususnya kemajuan UMKM. Aspek klinik manajemen, aspek pendampingan dan aspek bina mitra merupakan aspek yang sangat krusial bagi lembaga perbankan, hal ini disebabkan oleh tersedianya sumberdaya lembaga perbankan yang terbatas, oleh karena itu upaya optimalisasi peran *stakeholder* harus mampu mengungkap titik krusial yang dimilikinya, sekaligus menjadikan kelemahan itu sebagai suatu yang lebih baik dan bermanfaat untuk pengembangan dalam pengelolaan UMKM.

4. Peran Lembaga Perguruan Tinggi

Mengacu hasil *Mapping* yang terkait dengan karakteristik peran lembaga perguruan tinggi dalam pengelolaan UMKM sebagaimana ditampilkan pada tabel 5.8 maka dapat di temukan titik krusial yang sangat penting untuk diperhatikan dalam merumuskan model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM. Peran perguruan tinggi dalam pengelolaan UMKM memiliki titik krusial pada seluruh aspeknya yang dapat diuraikan sebagai berikut:

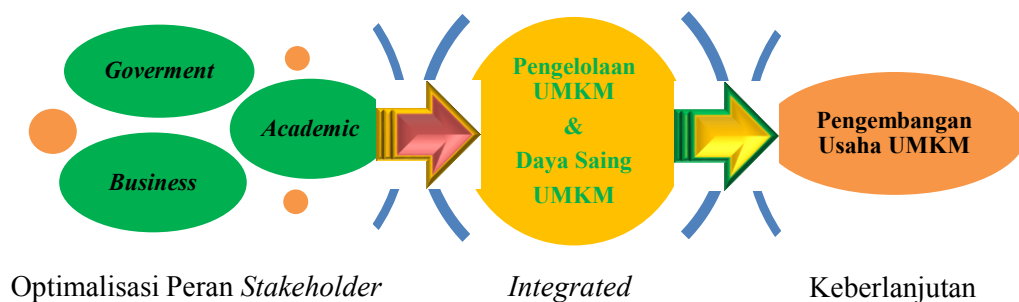
- a. Aspek kebijakan kurikulum & program magang terdapat 11 titik lemah
- b. Aspek klinik/sentra layanan manajemen terdapat 13 titik lemah
- c. Aspek program pelatihan terdapat 10 titik lemah
- d. Aspek program pendampingan terdapat 10 titik lemah
- e. Aspek program bina mitra untuk pengembangan UMKM terdapat 16 titik lemah
- f. Aspek program riset dan pengembangan UMKM terdapat 15 titik lemah
- g. Aspek publikasi ilmiah terkait tema UMKM terdapat 8 titik lemah

Mengacu pada titik krusial tersebut lembaga perguruan tinggi seharusnya melakukan reorientasi perannya dalam rangka mendorong pengembangan dan

membantu pengelolaan UMKM menjadi semakin membaik sehingga menjadikan UMKM sebagai kekuatan ekonomi yang kuat dan mandiri.

5.3.3.2 Rumusan Model Optimalisasi Peran *Stakeholder* Dalam Pengelolaan UMKM

Mengacu pada titik krusial dalam pengelolaan sektor UMKM yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan suatu model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM yang meliputi tiga tahapan yang terdiri dari: a) redesain optimalisasi peran *stakeholder*, b) sinkronisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM c) keberlanjutan usaha



Gambar 5.5: Model Optimalisasi Peran *Stakeholder* Dalam Pengelolaan UMKM

Model tersebut diatas dirumuskan melalui tiga tahapan, dimana tahapan satu dengan tahapan berikutnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus di lakukan secara berurutan agar menghasilkan model yang komprehensif, oleh karena itu rumusan model tersebut dapat diuraikan tahapannya sebagai berikut:

1. Redesain Optimalisasi Peran *Stakeholder*

Merupakan langkah untuk mengidentifikasi berbagai peran yang dilakukan oleh *stakeholder* dengan mengarahkan pada aspek yang lebih optimal dalam upaya pengembangan pengelolaan UMKM yang lebih efektif. Redesain merupakan langkah menata kembali agar masing masing *stakeholder* mampu memainkan perannya menjadi lebih optimal untuk mendorong pengembangan UMKM yang sesuai dengan domain dan kompetensinya, sehingga mampu memberikan nilai kemanfaatan bagi pengelolaan UMKM menjadi lebih efektif dan mandiri.

2. Sinkronisasi Peran *Stakeholder*

Proses penyelarasan dan memadukan berbagai peran yang berbeda untuk hasil yang lebih optimal untuk implementasi manajemen UMKM, oleh karena itu diperlukan langkah sinergi dan *ter-integrated* melalui berbagai aktivitas program klinik layanan UMKM, program pelatihan manajemen, program pendampingan hasil pelatihan, bina mitra untuk pengembangan UMKM, program riset serta publikasi terkait dengan aktivitas UMKM. Program pengembangan manajemen dapat dilakukan oleh semua *stakeholder*, namun tidak akan memberikan manfaat yang efektif jika tidak dilakukan sinkronisasi program secara terintegrasi, oleh karena itu diperlukan kesepakatan diantara pemangku kepentingan agar dapat menyumbangkan peran yang terbaik untuk pengembangan dan implementasi manajemen bagi pelaku UMKM.

3. Keberlanjutan Usaha UMKM

Merupakan kebutuhan untuk menjadikan UMKM lebih mandiri dan menyiapkan diri untuk menghadapi persaingan global dan perubahan bisnis yang bersifat dinamis, oleh karena itu keberlanjutan usaha merupakan representasi dari upaya pengembangan model dimasa mendatang karena tuntutan perubahan persaingan usaha, perubahan berbisnis dan penggunaan media bisnis, perkembangan bisnis yang mulai kompleks serta keinginan untuk lebih besar. Keberlanjutan usaha ini harus didukung oleh peran stakeholder melalui program riset terkait dengan tema UMKM serta upaya untuk mempublikasi keberadaan UMKM melalui lembaga ilmiah baik lewat seminar maupun publikasi media lainnya.

5.3.4 Pengujian Efektivitas Model

Rumusan model tersebut belum diuraikan secara detail tentang operasional di lapangan, karena masih harus dilakukan pengujian terkait dengan tingkat efektivitas atau kelayakan modelnya, oleh karena itu harus disusun instrumen yang sesuai dengan kebutuhan dan dipergunakan untuk mengungkap seberapa besar tingkat efektivitasnya. Instrumen merupakan suatu media yang dimanfaatkan untuk dapat mengetahui persepsi dari pemangku kepentingan tentang model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM yang tentu diharapkan menjadi lebih baik dibanding kondisi sebelumnya. Rekonstruksi situasi dianggap sebagai cara yang

praktis, ekonomis dan efektif untuk mengungkap apa yang dirancang dalam suatu model, dengan cara mendesain kuesioner bertentuk pertanyaan tertutup. Kuesioner ini dibagikan kepada 27 orang sebagai responden dengan suatu metode *purposive sampling* agar bersedia memberi penilaian/persepsi atas serangkaian pertanyaan yang telah disusun dengan harapan dapat menjadi alat untuk mengukur tingkat efektivitas model sebagaimana yang telah dirumuskan sebagai model.

Desain kuesioner dalam pengujian model, menggunakan pengukuran skala *Likert* yaitu jenis pengukuran skala yang bertujuan untuk memperoleh persepsi atau sikap dari responden atas suatu pernyataan dengan memilih alternatif jawaban yang tersdia: 1) sangat tidak setuju/sangat tidak sesuai, 2) tidak setuju/ tidak sesuai, 3) sedang/cukup, 4) setuju/sesuai, dan 5) sangat setuju/sangat sesuai, atas pernyataan yang dinyatakan dalam kuesioner, sedangkan hasil pengukurannya menggunakan skala interval. Adapun tujuan dari desain pengukuran ini adalah ingin mengungkap tentang persepsi dari responden terkait dengan rumusan model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM secara obyektif agar hasilnya nanti dapat diterapkan untuk pemangku kepentingan dalam pengembangan aspek manajemen UMKM dimasa yang akan datang. Adapun tahapan dalam pengujian model dapat diuraikan secara sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi indikator yang ada didalam rumusan model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM
2. Menentukan jenis skala pengukuran didalam kuesioner dengan menggunakan skala Likert dan hasil pengukuran dengan menggunakan skala interval yaitu lima tingkatan/interval
3. Mendesain kuesioner yang terkait dengan pengungkapan persepsi pelaku usaha atas “Rumusan Model Optimalisasi Peran *Stakeholder* Dalam Pengelolaan UMKM”
4. Menyebarkan kuesioner kepada 27 responden (*purposive sampling*) yang berada di wilayah obyek yang diteliti (kota Tuban, Lamongan, Gresik dan Surabaya)
5. Melakukan tabulasi data terkait hasil jawaban dari 27 responden, sehingga dapat mengungkap tingkat efektivitas “Rumusan Model” sesuai dengan yang telah dipersepsi oleh responden atau *Stakeholder*, melalui data tabulasi dapat dibuat dasar tentang efektivitas model yang telah dirumuskan tersebut.

6. Melakukan telaah secara lebih mendalam tentang persepsi *stakeholder* atas rumusan model yang telah dibuat, kemudian dievaluasi tentang kelemahannya untuk dilakukan penyempurnaan lebih lanjut.

Untuk memberikan gambaran detail terkait jawaban responden dan persepsi pemangku kepentingan atas ”rumusan model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM” maka dapat disajikan dalam tabel 5.9 sebagai berikut:

Tabel 5.9: Persepsi atas “Model Optimalisasi Peran *Stakeholder*”

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden					Nilai (%)
		1	2	3	4	5	
I. Peran Dinas Koperasi dan UMKM							
1	Dinas Koperasi sebaiknya memiliki program klinik layanan manajemen untuk UMKM, agar dapat memberi peningkatan pada kualitas pengelolaan usahanya menjadi lebih efektif	-	-	-	20	7	85,2
2	Dinas Koperasi seharusnya memiliki program pelatihan manajemen untuk UMKM, agar dapat memberi peningkatan pada kualitas pengelolaan usahanya menjadi lebih efektif	-	-	-	18	9	86,7
3	Dinas Koperasi sebaiknya memiliki program pendampingan hasil pelatihan manajemen untuk UMKM, agar dapat memberi peningkatan pada kualitas pengelolaan usahanya menjadi lebih efektif	-	-	-	20	7	85,2
4	Dinas Koperasi sebaiknya melakukan program bina mitra atau membangun jejaring untuk UMKM, agar dapat memberi peningkatan pada kualitas usahanya menjadi lebih baik	-	-	-	21	6	84,4
5	Sebaiknya Dinas Koperasi melakukan program kerjasama dengan Dinas Pariwisata agar dapat turut mengembangkan peningkatan kualitas manajemen pengelolaan UMKM secara <i>ter-integrated</i>	-	-	-	22	5	83,7
6	Sebaiknya Dinas Koperasi melakukan program kerjasama dengan lembaga perbankan agar dapat turut mempermudah peroleh pendanaan untuk peningkatan usaha dan pengelolaan pasca kredit bagi pelaku UMKM secara <i>ter-integrated</i>	-	-	-	24	3	82,2
7	Sebaiknya Dinas Koperasi melakukan program kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi agar dapat mempercepat peningkatan kualitas manajemen dan pengelolaan usaha bagi pelaku UMKM secara <i>ter-integrated</i>	-	-	12	8	7	76,3
8	Sebaiknya Dinas Koperasi mengoptimalkan perannya dalam pengembangan kualitas aspek manajemen bagi pelaku UMKM dalam rangka pembelajaran mandiri menghadapi persaingan dan perubahan bisnis global	-	-	10	15	2	74,1
Total Nilai Persepsi Responden		-	-	-	-	-	82,2
II.							
1	Dinas Pariwisata sebaiknya memiliki program klinik layanan manajemen untuk UMKM, agar dapat memberi peningkatan pada kualitas pengelolaan usahanya menjadi lebih efektif	-	-	9	15	3	75,6
2	Dinas Pariwisata seharusnya memiliki program pelatihan manajemen untuk UMKM, agar dapat memberi peningkatan pada kualitas pengelolaan usahanya menjadi lebih efektif	-	-	7	9	11	83,0
3	Dinas Pariwisata sebaiknya memiliki program pendampingan hasil pelatihan manajemen untuk UMKM, agar dapat memberi peningkatan pada kualitas pengelolaan usahanya menjadi lebih efektif	-	-	8	9	10	81,5
4	Dinas Pariwisata sebaiknya melakukan program bina mitra atau membangun jejaring untuk UMKM, agar dapat	-	-	5	10	12	85,2

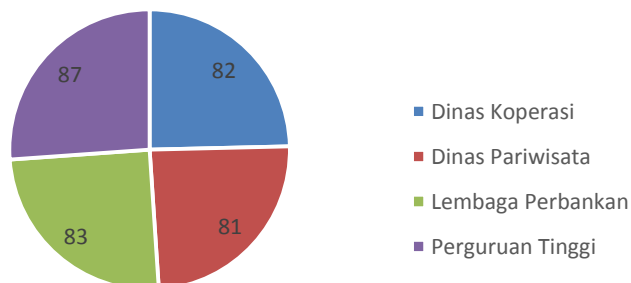
	memberi peningkatan pada kualitas usahanya menjadi lebih baik						
5	Sebaiknya Dinas Pariwisata melakukan program kerjasama dengan Dinas Koperasi agar dapat turut mengembangkan peningkatan kualitas manajemen pengelolaan UMKM secara <i>ter-integrated</i>	-	-	7	12	8	80,7
6	Sebaiknya Dinas Pariwisata melakukan program kerjasama dengan lembaga perbankan agar dapat turut mempermudah peroleh pendanaan untuk peningkatan usaha dan pengelolaan pasca kredit bagi pelaku UMKM secara <i>ter-integrated</i>	-	-	8	10	9	80,7
7	Sebaiknya Dinas Pariwisata melakukan program kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi agar dapat mempercepat peningkatan kualitas manajemen dan pengelolaan usaha bagi pelaku UMKM secara <i>ter-integrated</i>	-	-	8	11	8	80,0
8	Sebaiknya Dinas Pariwisata mengoptimalkan perannya dalam pengembangan kualitas aspek manajemen bagi pelaku UMKM dalam rangka pembelajaran mandiri menghadapi persaingan dan perubahan bisnis global	-	-	6	8	13	85,2
	Total Nilai Persepsi Responden	-	-	-	-	-	81,4
III. Lembaga Perbankan							
1	Lembaga Perbankan sebaiknya memiliki program klinik layanan proses kredit untuk UMKM, agar dapat memberi peningkatan pada kualitas pengelolaan usahanya menjadi lebih efektif	-	-	6	14	7	80,7
2	Lembaga Perbankan seharusnya memiliki program pelatihan proses pengajuan kredit untuk UMKM, agar dapat memberi peningkatan pada kualitas pengelolaan usahanya menjadi lebih efektif	-	-	7	11	9	81,5
3	Lembaga Perbankan sebaiknya memiliki program khusus pendampingan dalam pengelolaan kredit untuk UMKM, agar dapat memberi peningkatan pada kualitas pengelolaan dana dan pengawasan usahanya menjadi lebih efektif	-	-	7	9	11	83,0
4	Lembaga Perbankan sebaiknya melakukan program bina mitra atau membangun jejaring untuk UMKM, agar dapat memberi peningkatan pada kualitas usahanya menjadi lebih maju dan berkembang	-	-	7	8	12	83,7
5	Sebaiknya lembaga perbankan melakukan program kerjasama dengan Dinas Koperasi agar dapat turut mengembangkan peningkatan kualitas usahanya dalam pengelolaan UMKM secara <i>ter-integrated</i>	-	-	6	9	12	84,4
6	Sebaiknya lembaga perbankan melakukan program kerjasama dengan Dinas Pariwisata agar dapat turut mengembangkan peningkatan kualitas usahanya dalam pengelolaan UMKM secara <i>ter-integrated</i>	-	-	4	10	13	86,7
7	Sebaiknya lembaga perbankan melakukan program kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi agar dapat mempercepat peningkatan kualitas manajemen dan pengelolaan usaha bagi pelaku UMKM secara <i>ter-integrated</i>	-	-	6	9	12	84,4
8	Sebaiknya lembaga perbankan mengoptimalkan perannya dalam pengembangan kualitas aspek pengelolaan dana pasca perolehan kredit bagi pelaku UMKM dalam rangka untuk pembelajaran mandiri menghadapi persaingan dan perubahan bisnis global	-	-	7	8	12	83,7
	Total Nilai Persepsi Responden	-	-	-	-	-	83,4
IV.							
1	Lembaga perguruan tinggi sebaiknya memiliki program klinik manajemen untuk UMKM, agar dapat memberi peningkatan pada kualitas pengelolaan usahanya menjadi lebih efektif	-	-	5	10	12	85,2
2	Lembaga perguruan tinggi seharusnya memiliki program pelatihan manajemen untuk UMKM, agar dapat memberi efek untuk peningkatan kualitas pengelolaan usahanya menjadi lebih efektif	-	-	5	9	13	85,9

3	Lembaga perguruan sebaiknya memiliki program khusus pendampingan hasil pelatihan manajemen untuk UMKM, agar dapat memberi peningkatan pada kualitas pengelolaan usahanya menjadi lebih efektif	-	-	6	11	10	83,0
4	Lembaga perguruan tinggi sebaiknya melakukan program bina mitra atau membangun jejaring untuk UMKM, agar dapat memberi peningkatan pada kualitas usahanya menjadi lebih baik	-	-	3	9	15	88,9
5	Sebaiknya Lembaga perguruan tinggi melakukan program kerjasama dengan Dinas Koperasi secara terschedule agar dapat turut mengembangkan peningkatan kualitas manajemen dalam pengelolaan UMKM secara <i>ter-integrated</i>	-	-	3	8	16	89,6
6	Sebaiknya Lembaga perguruan tinggi melakukan program kerjasama dengan Dinas Pariwisata secara terschedule agar dapat turut mengembangkan peningkatan kualitas manajemen dalam pengelolaan UMKM secara <i>ter-integrated</i>	-	-	3	7	17	90,4
7	Sebaiknya Lembaga perguruan tinggi melakukan program kerjasama dengan lembaga perbankan secara terschedule agar dapat turut mengembangkan peningkatan kualitas manajemen dalam pengelolaan UMKM secara <i>ter-integrated</i>	-	-	4	8	15	88,1
8	Sebaiknya lembaga perguruan tinggi mengoptimalkan peran yang lebih dominan lagi dalam pengembangan kualitas aspek manajemen bagi pelaku UMKM dalam rangka pembelajaran mandiri menghadapi persaingan dan perubahan bisnis global	-	-	5	8	14	86,7
9	Sebaiknya lembaga perguruan tinggi melakukan program riset terpadu dan terschedule terkait berbagai problem UMKM agar dapat memberi solusi atas problem manajemennya sekaligus untuk pengembangan manajemen di masa mendatang	-	-	5	7	15	87,4
10	Sebaiknya lembaga perguruan tinggi melakukan publikasi ilmiah terkait dengan hasil riset dari berbagai problem UMKM sehingga penyebaran informasinya menambah pengembangan riset dan manfaat dimasa mendatang	-	-	5	8	14	86,7
	Total Nilai Persepsi Responden	-	-	-	-	-	87,2

Sumber: Diolah oleh Penulis

Mengacu pada nilai rata rata persepsi dari responden tersebut diatas maka dapat ditampilkan dalam bentuk ringkasan, agar memudahkan untuk memahami efektivitas rumusan model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM melalui tampilan gambar sebagai berikut.

Persepsi Responden Atas Rumusan Model



Gambar 5. 6: Persepsi Responden Terhadap Rumusan Model

Berdasarkan tabel dan gambar tersebut diatas menunjukkan bahwa “rumusan model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM” telah dipersepsi sangat baik oleh pemangku kepentingan, karena rata rata nilai persepsi dari seluruh aspek yang dipertimbangkan dalam rumusan model memiliki nilai berkisar pada angka 81,2% - 87,2%.

5.3.5 Mengevaluasi Efektivitas Model

Berdasarkan persepsi dari 27 responden yang telah ditunjuk sebagai sampel dalam pengujian rumusan model, selanjutnya dikaji lebih mendalam melalui *focus group discussion* dari kalangan akademisi dan penggiat UMKM dengan tujuan untuk memperoleh masukan yang bersifat konstruktif dan masif, sehingga di hasilkan suatu “model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM” yang lebih aplikatif dan sesuai dengan karakteristik *stakeholder* dan UMKM yang berada pada kawasan wisata religi. Melalui *focus group discussion* yang dihadiri oleh tim peneliti dan kalangan akademisi, maka dapat direkomendasi beberapa catatan perbaikan model sebagai berikut:

1. Redesain Optimalisasi peran *stakeholder*, menyangkut keterlibatan pemangku kepentingan yang bukan dalam satu organisasi, hal ini tentu dapat menimbulkan konflik kepentingan diantara pemangku kepentingan, oleh karena itu diperlukan keterbukaan dan kepedulian dari semua pihak dengan menempatkan UMKM sebagai kepentingan bersama yaitu menjadikan UMKM sebagai pelaku bisnis alternatif dimasa mendatang karena jumlah dan kontribusinya yang sangat besar bagi perekonomian regional dan nasional. Kebangkitan UMKM sebagai pelaku ekonomi yang mandiri tentu memberi efek domino bagi perkembangan dan pertumbuhan usaha perbankan dan kegiatan bisnis lainnya.
2. Sinkronisasi peran *stakeholder*, menyangkut keterlibatan langsung pemangku kepentingan dalam memainkan perannya dalam mendukung pengembangan UMKM. Sinergi merupakan satu langkah strategis dan efektif untuk mendorong optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengembangan dan pengelolaan UMKM, oleh karena itu dibutuhkan kerjasama terpadu dari para pemangku kepentingan agar program klinik manajemen, program pelatihan, program pendampingan dan bina mitra berjalan efektif untuk pengembangan pengelolaan UMKM.

3. Keberlanjutan Usaha UMKM, menyangkut program jangka panjang yang harus dipersiapkan untuk memandirikan dan mendewakan UMKM siap menghadapi persaingan global dan perubahan lingkungan bisnis, oleh karena itu perlunya di desain program ter-*integrated* dan berkelanjutan agar proses memandirian dan pendewasaan UMKM dapat berjalan secara natural, sehingga keberlanjutan dari usaha UMKM dapat terjamin melalui sistem dan bersifat masif.

Berdasarkan hasil rekomendasi dari pertemuan *focus group discussion*, maka langkah selanjutnya adalah melakukan perbaikan dan mendeskripsikan “**Model Optimalisasi Peran Stakeholder dalam Pengelolaan UMKM**” secara lengkap sehingga nantinya dapat diterapkan oleh pemangku kepentingan dan UMKM yang berada di kawasan wisata religi, bahkan penggunaan model ini tidak menutup bagi pelaku UMKM yang lain. Rumusan model tidak mengalami perubahan konsep, tetapi dilakukan penyempurnaan yang terkait dengan konten, oleh karena itu “model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM” segera disusun menjadi dokumen model yang lengkap dan dapat dioperasionalkan. Model ini diharapkan dapat menjadi alternatif bagi pemangku kepentingan dan UMKM sebagai rujukan dalam memainkan perannya dalam pengembangan pengelolaan UMKM dengan kesamaan karakteristik, oleh karena itu model optimalisasi peran *stakeholder* dapat menjadi alternatif model optimalisasi untuk lembaga dan sektor usaha lain.

5.4 Pembahasan Model Optimalisasi Peran Stakeholder

Tahap ini merupakan tahapan terakhir dalam rumusan model, oleh karena itu pemodelannya harus mencakup berbagai aspek permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat. Pengelolaan UMKM kawasan wisata religi harus dikembangkan sesuai dengan karakteristiknya, oleh karena itu pengembangan model merupakan suatu kebutuhan, agar kedepannya UMKM menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan kuat, oleh karena itu model optimalisasi peran *stakeholder* dapat diuraikan sebagai berikut:

5.4.1 Redesain Optimalisasi Peran Stakeholder

Stakeholder memiliki potensi untuk memainkan peran yang strategis dalam rangka mendorong pengembangan dan pengelolaan UMKM melalui penerapan

manajemen yang memadai, oleh karena itu optimalisasi peran *stakeholder* menjadi satu upaya untuk mendukung terwujudnya pengelolaan manajemen UMKM yang lebih baik. UMKM sebagai salah satu pelaku usaha di Indonesia memiliki jumlah yang sangat besar serta memiliki kontribusi terhadap perekonomian regional dan nasional, namun kontribusinya masih belum maksimal karena berbagai kelemahan yang masih melekat sebagai lebel pada UMKM khususnya kelemahan pada aspek manajemen. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah maupun kalangan masyarakat, namun tetap saja UMKM belum meningkat pamornya dibandingkan dengan pelaku bisnis lainnya yaitu badan usaha swasta dan badan usaha milik negara atau daerah, karena berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah belumlah cukup menyentuh akar permasalahan yang terjadi pada diri UMKM.

Kehadiran badan usaha milik desa seharusnya dipandang sebagai potensi baru untuk mengangkat keberadaan UMKM sebagai alternatif kekuatan ekonomi baru karena secara kultural dan struktur memiliki ikatan yang kuat dengan pemerintahan desa. Selama ini *stakeholder* UMKM meliputi komponen government, business dan academic (*triple helix*), dimana masing masing memainkan perannya sesuai dengan domain yang dimiliki, bahkan cenderung memainkan peran sesuai dengan ego sektoralnya, sehingga dampak manfaatnya kurang optimal bagi kepentingan dan perkembangan UMKM saat sekarang yang akan mendatang (wahyudiono, 2017). Redesain optimalisasi peran *stakeholder* merupakan satu kebutuhan yang mendesak agar potensi yang dimiliki masing masing tidak sia sia baik dari aspek kebijakan, waktu, tenaga dan biaya.

Optimalisasi peran *stakeholder* membutuhkan suatu perangkat model agar berbagai pemangku kepentingan mampu menempatkan perannya pada porsi yang semestinya serta mampu membangun sinergi bersama dalam rangka mendorong penerapan manajemen dan pengelolaan UMKM yang layak. Secara konseptual tiga kekuatan pemangku kepentingan mampu memberi kontribusi yang optimal, namun titik lemahnya adalah pada aspek sinkronisasi didalam merumuskan kebijakan, implementasi kebijakan dan monitoring hasil implementasinya, oleh karena itu jika memiliki suatu model tentu akan memberi satu arah yang lebih jelas karena semua dapat berjalan secara optimal. Untuk memberi gambaran yang lebih jelas terkait dengan redesain optimalisasi peran *stakeholder* UMKM diuraikan sebagai berikut.

5.4.1.1 Kalangan Birokrasi

Keterlibatan birokrasi atas keberadaan UMKM memberi arah yang jelas bagi keberlanjutan usaha UMKM di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Unsur departemen/kementerian, dinas, bagian maupun sub bagian di kalangan pemerintahan telah terbentuk dan telah menjalankan perannya sesuai dengan regulasi yang ada baik menyangkut pelaksanaan tugas maupun alokasi anggarannya. Tidak perlu diragukan lagi bahwa kalangan dari birokrasi yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan keberadaan sektor UMKM telah dilakukan secara maksimal, namun permasalahan UMKM bukanlah sederhana banyak yang harus diselesaikan melalui lintas dinas dan unsur lainnya. Permasalahan perijinan, lemahnya sumberdaya manusia, akses permodalan, praktek manajemen dan aspek lainnya, oleh karena itu membutuhkan langkah sinergi dengan kelembagaan lainnya agar kalangan birokrasi mampu mengoptimalkan perannya sesuai dengan domain dan kewenangan yang dimilikinya, diantaranya meliputi langkah sebagai berikut:

1. Memiliki program ter-*integrated* lintas kedinasan atau lintas instansi agar dapat menyusun program terpadu terkait dengan keberadaan UMKM yaitu dari dinas koperasi UMKM, dinas pariwisata, dinas kesehatan dan lembaga lainnya karena secara spesifik masing masing kota dan kabupaten memiliki karakteristik yang berbeda beda, oleh karena kepemilikan program terpadu dapat menghilangkan ego sektoral dari masing masing dinas, karena permasalahan UMKM bukanlah tugas satu dinas saja tetapi tugas bersama, sehingga semua penanganan masalah UMKM berjalan secara efektif dan efisien, khususnya terkait dengan program pelatihan, pendampingan usaha, pengembangan usaha, pengembangan kualitas pelaku UMKM
2. Perlunya melakukan kerjasama dengan lembaga perbankan setempat, minimal menyusun kebijakan terkait dengan prioritas perkreditan bagi pelaku UMKM di wilayahnya, hal ini sangatlah penting karena akses UMKM terhadap lembaga perbankan masih sangat lemah, khususnya tersedianya jaminan program kredit tanpa anggunan bagi UMKM yang memperoleh skala prioritas bagi program usaha tertentu bagi pelaku UMKM, oleh karena itu kerjasama dengan lembaga perbankan muntlak harus dilakukan agar aktivitas usaha UMKM dapat tumbuh berkembang dengan baik dan mandiri.

3. Perlunya melakukan kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi setempat khususnya terkait dengan program pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi pelaku UMKM. Kerjasama ini sangatlah penting mengingat adanya keterbatasan kompetensi instruktur, waktu dan biaya, oleh karena itu cukup realitis jika kerjasama ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas bagi pelaku UMKM. Perguruan tinggi memiliki sumberdaya yang memadai dibidang riset, hal ini sangat dibutuhkan oleh kalangan birokrasi dalam rangka menyusun program prioritas yang terkait dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, sehingga kepemilikan program prioritas terkait dengan permasalahan UMKM dapat mendorong pada terwujudnya optimalisasi peran birokrasi dalam pengembangan dan pengelolaan UMKM yang efektif dan produktif.

5.4.1.2 Kalangan Bisnis

Pelaku bisnis terdiri dari berbagai profesi yang melakukan bisnis dalam satu wilayah tertentu, baik yang memiliki hubungan atau yang tidak memiliki hubungan dengan pelaku UMKM. Namun pelaku bisnis dapat mempengaruhi keberlanjutan UMKM di masa yang akan, oleh karena itu perlunya dioptimalkan perannya dalam rangka mendukung pengembangan dan pengelolaan UMKM. Pelaku bisnis terdiri dari badan usaha milik negara/daerah, badan usaha swasta dengan berbagai profesi dan bidang usaha. Beberapa pelaku bisnis yang memiliki peran secara langsung dengan UMKM diantaranya adalah lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya, oleh karena itu optimalisasi peran lembaga perbankan harus berkontribusi secara langsung dengan pengembangan dan pengelolaan UMKM, baik kepentingan jangka pendek maupun kepentingan jangka panjang.

Lembaga perbankan yang berdomisili di suatu wilayah seharusnya memiliki program pembiayaan yang dapat mendukung jenis kebutuhan dana yang selaras dengan karakteristik bisnis UMKM, hal ini tentu membutuhkan satu kerjasama tim yang *ter-integrated* dengan lembaga atau institusi lainnya. Lembaga perbankan di wilayah tertentu sebaiknya memahami betul nilai nilai kearifan lokal maupun nilai budaya masyarakat setempat, agar nantinya dapat mendesain program pembiayaan yang sesuai dan relevan dengan karakteristik UMKM di daerah. Optimalisasi peran lembaga perbankan dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Perlunya lembaga perbankan melakukan kerjasama dengan dinas terkait dengan pengembangan UMKM, dengan harapan dapat diperoleh informasi yang relevan dan menemukan skala prioritas terkait dengan kebutuhan jenis pembiayaan dari pelaku UMKM. Hal ini sangat penting bagi lembaga perbankan karena fungsi utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan kredit kepada pihak yang membutuhkannya tidak terkecuali dalam hal ini adalah pelaku UMKM, oleh karena itu perbankan harus memandang pentingnya program kemitraan dengan cara memberi perhatian pada pelaku UMKM melalui program klinik pengajuan kredit, program pelatihan pengelolaan kredit, program pendampingan tata kelola usaha pasca penerimaan kredit maupun klinik pengembangan bisnis
2. Perlunya lembaga perbankan melakukan kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi setempat untuk mengembangkan program pelatihan dan pendampingan manajemen UMKM, sehingga optimalisasi peran perbankan dapat berjalan lebih efektif karena tersedia sumberdaya manusia yang lebih mumpuni dibidangnya. Program pembiayaan dan tujuan penyaluran kredit harus mengena pada sasaran yang telah ditentukan, oleh karena itu kerjasama dengan perguruan tinggi yang berada di wilayah tersebut memiliki tujuan tersedianya jaminan kemampuan pelaku UMKM untuk mengelola dana kredit yang diterimanya dari perbankan karenanya diikuti program pelatihan dan pendampingan yang dilakukan bersama dengan perguruan tinggi.
3. Badan usaha milik negara/daerah dan badan usaha swasta lainnya juga memiliki peran yang penting dalam mendorong pengembangan dan pengelolaan UMKM, oleh karena itu perlunya pelaku bisnis ini menggunakan dana *corporate social responsibility* (CSR) untuk membantu pengembangan kualitas manajemen dari pelaku UMKM yang berada diwilayahnya. Strategi kerjasama dengan lembaga perbankan dapat dilakukan melalui program penyaluran kredit bergulir bagi pelaku UMKM, dimana perusahaan menempatkan dana CSR nya di perbankan tertentu, sedangkan perbankan menyalurkan dalam bentuk kredit sesuai dengan rekomendasi dari pemilik dana tersebut. Kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi juga dapat dilakukan melalui program pelatihan dan pendampingan pada aspek manajemennya, dengan demikian kolaborasi program kerjasama terpadu antar lembaga merupakan bentuk jawaban untuk mewujudkan optimalisasi peran

stakeholder dalam mendukung pengembangan dan penggunaan pola manajemen yang modern dan efektif untuk pengelolaan bisnis UMKM serta mendewasakan keberadaan UMKM dalam menghadapi persaingan global dan bisnis yang terus berkembang dinamis sesuai dengan eranya.

5.4.1.3 Kalangan akademik

Perguruan tinggi dipandang sebagai *stakeholder* yang memiliki peran sangat strategis untuk mendukung pengembangan bagi UMKM dimasa mendatang, karena perguruan tinggi memiliki kekuatan dibidang riset dan sumberdaya manusia yang mumpuni untuk mewujudkan program klinik manajemen, pelatihan kompetensi di bidang manajemen serta program lain yang relevan dengan pengembangan kualitas manajemen UMKM. Selama ini perguruan tinggi dipandang pendukung *agent of development*, namun kenyataan yang terjadi perguruan tinggi masih berkuat pada pemenuhan program legalitas saja, masih belum mampu mengembangkan perannya sebagai agen perubahan, oleh karena itu perlunya optimalisasi peran yang lebih riil agar kedepannya perguruan tinggi mampu memainkan perannya sebagai agen dan pelaku perubahan dibidang ilmu pengetahuan.

Seharusnya pemerintah mendorong secara riil untuk mewajibkan secara ketat bahwa setiap perguruan tinggi harus memiliki program bina mitra dengan pelaku UMKM atau dengan masyarakat desa tertentu secara terjadwal dan berkelanjutan, agar keberadaan sentra UMKM yang tersebar di berbagai daerah dapat memperoleh sentuhan manajemen yang memadai melalui program mitra bersama. Kelemahan perguruan tinggi saat sekarang adalah tidak memiliki program berkesinambungan pada kelompok masyarakat atau sentra UMKM, sedangkan program pengabdian pada masyarakat yang dilakukan saat sekarang hanya bersifat parsial dan tidak ada kelanjutannya sehingga hasilnya tidak memiliki efek jangka panjang bahkan efek jangka pendekpun hampir tidak ada karena mengabaikan karakteristik yang ada pada pelaku UMKM, oleh karena itu perlu langkah konkrit untuk optimalisasi peran perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan UMKM sebagai berikut>

1. Perlunya perguruan tinggi mendesain kebijakan kurikulum kewirausahaan dan program magang mahasiswa secara *ter-integrated* dengan program risetnya baik untuk tingkat perguruan tinggi, fakultas/jurusan maupun program riset dosennya

- sehingga program ini mampu mendukung perannya sebagai agen perubahan di tengah masyarakat, karena ikut secara langsung untuk merubah aspek kualitas manajemen bagi pelaku UMKM melalui program klinik manajemen, program pelatihan manajemen, program pendampingan hasil pelatihan dan bina mitra, sehingga program ini memberi efek langsung pada kualitas manajemen UMKM
2. Perlunya perguruan tinggi melakukan kerjasama dengan lembaga perbankan di wilayah tersebut khususnya melakukan pendampingan pada pelaku UMKM dan masyarakat pasca penerimaan kredit dari perbankan, agar pengelolaan kredit dapat dilakukan secara efektif. Program pendampingan UMKM dapat dikemas melalui program pengabdian masyarakat yang selama ini masih berjalan kurang efektif karena tidak adanya kemitraan dengan lembaga lain, oleh karena itu jika memiliki kerjasama dengan lembaga perbankan tentunya perguruan tinggi dapat mengoptimalkan perannya dalam pengembangan pengelolaan UMKM
 3. Perlunya perguruan tinggi memiliki program riset unggulan dibidang UMKM, mengingat selama ini sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian regional maupun perekonomian nasional. Melalui program riset ter-integrtaed tentu banyak aspek manajemen dan bisnis UMKM yang tercover dalam penelitian, sehingga keberlanjutan usaha UMKM terus menjadi prioritas dalam riset perguruan tinggi. Program riset juga membantu untuk menemukan solusi dari berbagai permasalahan yang dialami oleh UMKM, dengan demikian manajemen UMKM diharapkan memperoleh solusi yang cepat dan tepat
 4. Perlunya kerjasama dengan instansi pemerintah khususnya dinas terkait dengan UMKM, dengan memprioritaskan pada program pelatihan, pendampingan serta riset manajemen UMKM. Kendala instasi pemerintah adalah ketersediaan waktu yang kurang cukup untuk melakukan pendampingan dan monitoring atas hasil pelatihan, oleh karena itu kerjasama dengan lembaga lain menjadi tolok ukur untuk menjaga keberlanjutan usaha UMKM dimasa mendatang.

5.4.2 Sinkronisasi Peran *Stakeholder* Dalam Pengelolaan UMKM

Sinkronisasi merupakan upaya untuk mensinergikan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para *stakeholder*, dengan sasaran untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan UMKM menjadi lebih efektif dan efisien, oleh karena itu para

pemangku kepentingan sebaiknya tidak harus melakukan program klinik layanan manajemen, program pelatihan dan program pendampingan secara sendiri sendiri agar sumberdaya yang ada dapat dimanfaatkan lebih optimal bagi perbaikan model manajemen UMKM. Sinkronisasi peran *stakeholder* dapat diarahkan pada program klinik manajemen, program pelatihan, program pendampingan dan bina mitra untuk pengembangan UMKM. Untuk memberi gambaran yang lebih rinci terkait program tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Program Klinik Manajemen**, merupakan serangkaian kegiatan yang memberi layanan manajemen pada pelaku UMKM dengan tujuan memberi solusi atas berbagai permasalahan aspek manajemen yang dihadapi oleh kelompok pelaku UMKM. Klinik UMKM juga menampung keinginan pelaku UMKM untuk konsultasi yang terkait dengan pengembangan manajemen dalam rangka menghadapi persaingan bisnis global serta perubahan sistem bisnis yang dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi.
2. **Program Pelatihan**, merupakan serangkaian kegiatan terstruktur yang memiliki tujuan untuk memberi peningkatan kualitas manajemen pada kelompok pelaku UMKM baik aspek manajemen sumberdaya manusia, aspek manajemen manufaktur, manajemen pemasaran maupun manajemen keuangan/ akuntansi. Program pelatihan juga dapat dilakukan sesuai skedule program studi atau atas permintaan dari kelompok UMKM, oleh karena itu program pelatihan harus memberi ruang yang memadai bagi program studi untuk mengekspresikan potensi akademik yang dimilikinya baik kompetensi lembaganya maupun sumber daya para dosennya. Program pelatihan harus memberi peluang bagi pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kualitas manajemennya, agar pelaku UMKM mampu menjadi pelaku bisnis yang kuat dan mandiri dalam menciptakan bisnis yang lebih baik dimasa mendatang.
3. **Program Pendampingan**, merupakan serangkaian kegiatan terstruktur dalam rangka memberi pendampingan kepada para pelaku UMKM atas hasil pelatihan yang diperoleh pada kesempatan tertentu, agar hasil pelatihan dapat memberi daya manfaat sesuai dengan karakteristik dan kondisi riil yang di rasakan oleh para pelaku UMKM. Dengan program pendampingan diharapkan semua materi pelatihan dapat diimplementasi sesuai dengan kebutuhan masing masing pelaku

UMKM, oleh karena itu program pendampingan harus dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: a) pendampingan materi pelatihan, b) pendampingan monitoring dan c) pendampingan keberhasilan. Melalui program pendampingan yang terstruktur tentu akan memberi hasil yang efektif didalam menerapkan aspek manajemen untuk membantu mengelola bisnisnya menjadi lebih efisien serta berdaya saing yang lebih tinggi bagi UMKM.

4. **Bina Mitra UMKM**, merupakan serangkaian kegiatan yang akan mengarah pada upaya membangun kemitraan UMKM dengan para pemangku kepentingan dengan tujuan para pelaku UMKM dapat membangun jejaring yang lebih baik, terstruktur dan bersifat formal, dengan demikian aktivitas UMKM akan menjadi lancar, karena terbukanya akses dengan lembaga keuangan, dinas terkait dengan aspek legalitas, akses dengan mitra bisnis serta akses lainnya. Bina mitra memiliki tujuan untuk pengembangan UMKM yang mengarah pada terbentuknya sistem usaha yang terbuka, dinamis, bersifat formal sehingga usaha kelompok UMKM dapat menjadi kuat dan mandiri, sehingga dapat menjadi salah satu pelaku bisnis yang berkontribusi pada pendapatan masyarakat.

5.4.3 Model Optimalisasi Peran *Stakeholder* Dalam Pengelolaan UMKM

Optimalisasi peran *stakeholder* dalam rangka mendukung pengembangan dan pengelolaan UMKM yang efektif, memerlukan suatu langkah strategis dan sinergis dari berbagai pemangku kepentingan, agar peran masing masing dapat memberikan sumbangsih pemikiran konseptual dan langkah riil bagi perubahan implementasi manajemen UMKM yang efektif. Disamping itu optimalisasi peran *stakeholder* juga bertujuan untuk menghilangkan sifat ego sektoral yang sering terjadi diantara lembaga yang memiliki kepentingan bersama dengan UMKM serta menghindarkan penggunaan sumberdaya yang tidak perlu terjadi. Program bersama antar lembaga merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan peran *stakeholder*, oleh karena itu memerlukan suatu model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengembangan dan pengelolaan UMKM. Identifikasi berbagai permasalahan dan kebutuhan untuk menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM merupakan representatif dari *stakeholder* tentang bagaimana cara mengoptimalkan perannya sebagai *stakeholder*, agar keberadaannya mampu memberi kontribusi riil

dan turut mewujudkan pengembangan dan pengelolaan UMKM yang lebih efektif baik saat sekarang maupun dimasa mendatang. Adapun gambaran secara rinci peran dari para pemangku kepentingan dapat diuraikan sebagai berikut.

5.4.3.1 Peran Dinas Koperasi dan UMKM

Dinas koperasi dan UMKM merupakan salah satu institusi pemerintahan kabupaten/kota yang tugas utamanya membuat regulasi dan mengimplementasikan terkait dengan sektor koperasi dan UMKM, oleh karena itu sangatlah tepat jika dinas ini memegang peran strategis dalam rangka mendorong pengembangan UMKM di wilayahnya masing masing. Selama ini dinas koperasi telah menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, namun realitanya masih kurang mampu menjadikan sektor UMKM sebagai alternatif kekuatan ekonomi baru. Sektor UMKM secara kultural telah tumbuh berkembang sesuai dengan lingkungannya, bahkan jauh dari prioritas apapun sektor ini tetap berjalan dengan kekuatannya sendiri.

Permasalahan klasik yang dihadapi sektor UMKM adalah keterbatasan pada aspek manajemen baik aspek sumberdaya manusia, aspek finansial, aspek produksi, aspek pemasaran, aspek teknologi, aspek pendanaan maupun aspek jejaring. Hal ini sudah dipahami benar oleh para pemangku kepentingan khususnya dinas koperasi dan UMKM setempat, namun permasalahannya bukan sesederhana yang kita duka, karena permasalahan UMKM sangatlah kompleks bahkan seringkali solusi yang di berikan bersifat parsial dan tidak tuntas menyentuh akar permasalahannya. Program klinik, program pelatihan dan program pendamping sudah sering dilakukan secara berkala oleh dinas setempat, namun semuanya dilakukan oleh secara parsial serta tidak berkesinambungan, hal inilah yang menjadi akar permasalahan penanganan di UMKM yang tidak pernah tuntas. Beberapa langkah strategis yang perlu untuk dipertimbangkan dalam upaya optimalisasi peran dinas koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan UMKM sebagai berikut:

1. Perlunya dinas koperasi menyusun program kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya yang secara formalitas dan informal memiliki keterkaitan fungsi dengan UMKM beserta pelakunya diantaranya lembaga perbankan, dinas pariwisata, dinas kesehatan, lembaga perguruan tinggi, lembaga masyarakat dan organisasi keagamaan. Hal ini dibutuhkan sesuai dengan karakteristik UMKM

itu sendiri. Tujuan kerjasama adalah untuk membangun sinergi memanfaatkan sumberdaya yang terbatas namun dapat memberi efek simultan dan efisien bagi pemangku kepentingan, bahkan bagi UMKM dan pelakunya oleh karena itu di perlukan keseriusan dari para pemangku kepentingan untuk memandang bahwa permasalahan UMKM adalah problem bersama, jika hal ini dilakukan melalui program *ter-integrated* tentu akan mampu mendorong pengembangan UMKM berjalan lebih cepat dan bermartabat dalam rangka mengangkat sektor UMKM sebagai alternatif kekuatan ekonomi baru.

2. Program pendampingan hasil pelatihan merupakan satu kebutuhan yang sangat krusial dalam mengatasi permasalahan manajemen UMKM, mengingat program klinik, program pelatihan sudah sering dilakukan melalui program yang didesain dengan skema pembiayaan dari APBN maupun APBD, bahkan sering diberikan kredit bergulir pada kelompok UMKM namun gaungnya tidaklah besar. Hal inti yang belum dituntaskan oleh para pemangku kepentingan adalah melakukan satu program pendampingan hasil pelatihan dan dilakukan secara berkesinambungan, oleh karena itu kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi merupakan solusi tepat untuk memenuhi kebutuhan program pendampingan, karena hanya institusi perguruan tinggi yang memiliki sumberdaya yang cukup dan mumpuni untuk melakukan pendampingan.
3. Perlunya melakukan pemetaan sentra UMKM yang berada di wilayah kerjanya, dengan menyusun skala prioritas sesuai dengan karakteristik sentra UMKM di masing masing lokasi. Melalui pemetaan sentra UMKM yang benar, tentunya dapat mempermudah dalam menyusun berbagai program yang selaras dan sesuai dengan kebutuhan riil UMKM, oleh karena itu mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki oleh pemangku kepentingan dan melakukan program kerja sama merupakan jawaban tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan UMKM seperti program riset, program peningkatan kompetensi manajemen, program monitoring dan kebutuhan pengembangan UMKM dalam rangka menghadapi persaingan global. Pemetaan sentra UMKM dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan dan kebutuhan solusi yang terkait dengan UMKM, sehingga dapat disusun skala prioritas program yang tepat sesuai dengan karakteristik yang ada pada kelompok UMKM di wilayahnya.

5.4.3.2 Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dinas pariwisata dan kebudayaan merupakan satu institusi pemerintahan kabupaten/kota yang tugas utamanya membuat regulasi dan mengimplementasikan terkait dengan sektor pariwisata dimana didalamnya terdapat aktivitas UMKM, oleh karena itu sangatlah tepat jika dinas ini memegang peran strategis dalam rangka mendorong pengembangan pariwisata sekaligus UMKM di wilayahnya. Selama ini dinas pariwisata telah menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, namun realitanya masih kurang mampu menjadikan pariwisata dan sektor UMKM sebagai alternatif kekuatan ekonomi baru. Sektor pariwisata secara kultural telah tumbuh berkembang sesuai dengan lingkungannya, bahkan jauh dari prioritas apapun sektor ini tetap berjalan dengan kekuatannya sendiri.

Permasalahan klasik yang dihadapi sektor pariwisata adalah keterbatasan pada aspek manajemen baik aspek sumberdaya manusia, aspek finansial, aspek produksi, aspek pemasaran, aspek teknologi, aspek pendanaan, aspek jejaring serta aspek infrastruktur. Hal ini sudah dipahami benar oleh para pemangku kepentingan khususnya dinas pariwisata setempat, namun permasalahannya bukan sesederhana yang kita duka, karena permasalahan pariwisata sangat kompleks bahkan seringkali solusi yang di berikan bersifat parsial dan tidak tuntas menyentuh pada akar permasalahannya. Program klinik, program pelatihan dan program pendamping sudah sering dilakukan secara berkala oleh dinas setempat, namun semuanya dilakukan oleh secara parsial serta tidak berkesinambungan, hal inilah yang menjadi akar permasalahan penanganan di pariwisata dan UMKM yang tidak pernah tuntas. Beberapa langkah strategis yang perlu untuk dipertimbangkan dalam upaya untuk optimalisasi peran dinas pariwisata dan UMKM yang ada didalamnya sebagai satu upaya untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan UMKM sebagai berikut:

1. Perlunya dinas pariwisata menyusun program kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya yang secara formalitas dan informal memiliki keterkaitan fungsi dengan pariwisata dan UMKM beserta pelakunya diantaranya lembaga perbankan, dinas koperasi, dinas kesehatan, lembaga perguruan tinggi, lembaga masyarakat dan organisasi keagamaan. Hal ini dibutuhkan sesuai dengan karakteristik kawasan wisata dan pelaku UMKM yang ada didalamnya. Tujuan kerjasama adalah untuk membangun sinergi memanfaatkan sumberdaya yang

terbatas namun dapat memberi efek simultan dan efisien bagi pemangku kepentingan, bahkan bagi UMKM dan pelakunya oleh karena itu di perlukan keseriusan dari para pemangku kepentingan untuk memandang bahwa permasalahan pariwisata dan UMKM adalah problem bersama, jika hal ini di lakukan melalui program ter-*integrated* tentu dapat mendorong pengembangan pariwisata dan UMKM berjalan lebih cepat dan bermartabat dalam rangka mengangkat sektor pariwisata dan pelaku UMKM yang berada dikawasan wisata tersebut sebagai alternatif kekuatan ekonomi baru.

2. Program pendampingan hasil pelatihan merupakan satu kebutuhan yang sangat krusial dalam mengatasi permasalahan manajemen sektor pariwisata, mengingat program klinik, program pelatihan sudah sering dilakukan melalui program yang didesain dengan skema pembiayaan dari APBN maupun APBD, bahkan sering diberikan kredit bergulir pada pelaku pariwisata namun gaungnya tidaklah besar. Hal inti yang belum dituntaskan oleh para pemangku kepentingan adalah melakukan satu program pendampingan hasil pelatihan dan dilakukan secara berkesinambungan, oleh karena itu kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi merupakan solusi tepat untuk memenuhi kebutuhan program pendampingan, karena hanya institusi perguruan tinggi yang memiliki sumberdaya yang cukup dan mumpuni untuk melakukan pendampingan.
3. Perlunya melakukan pemetakan kawasan tujuan wisata yang berada di wilayah kerjanya, dengan menyusun skala prioritas sesuai dengan karakteristik kawasan wisata di masing masing lokasi. Melalui pemetakan kawasan wisata yang benar, tentunya dapat mempermudah dalam menyusun berbagai program yang selaras dan sesuai dengan kebutuhan riil pelaku pariwisata, oleh karena itu langkah mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki oleh pemangku kepentingan dan melakukan program kerja sama merupakan jawaban tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan pariwisata seperti program riset, program peningkatan kompetensi manajemen, program monitoring dan kebutuhan pengembangan industri pariwisata dan pelaku UMKM yang ada didalamnya.
4. Perlunya sinkronisasi program terpadu pada dua institusi pemerintahan, karena pelaku UMKM dan industri pariwisata merupakan dua sisi dalam satu keping mata uang logam artinya dua pelaku sektor usaha ini selalu berdampingan

keberadaannya dalam suatu kawasan atau wilayah, oleh karena itu perlunya sinkronisasi program dari dua institusi pemerintah ini dalam menyusun kebijakan pada sektor pariwisata dan sektor UMKM secara ter-integrated. Dinas pariwisata tentu lebih berkonsentrasi pada pengembangan daerah tujuan wisata dengan segala prasana penunjangnya, sedangkan dinas koperasi lebih berfokus pada pengembangan sektor UMKM dan pelaku usahanya khususnya sebagai pelengkap dalam penyedia barang dan jasa yang berada di kawasan wisata tersebut, oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa optimalisasi peran stakeholder dalam pengembangan pengelolaan sektor UMKM akan menjadi lebih efektif, manakala dua institusi pemerintahan ini yaitu dinas pariwisata dan dinas koperasi untuk mensinergikan program kerjanya dalam rangka mendukung program pengembangan industri pariwisata dan sektor UMKM.

5.4.3.3 Peran Lembaga Perbankan

Lembaga perbankan memiliki peran yang strategis dan spesifik di tengah masyarakat kita, mengingat fungsi bank menjadi mediasi antara masyarakat pemilik dana dan masyarakat yang membutuhkan dana, oleh karena itu lembaga perbankan menjadi sangat penting untuk mendukung pengembangan sektor UMKM dari aspek permodalan. Selama ini aspek permodalan dan akses permodalan menjadi salah satu titik lemah bagi UMKM mengingat keterbatasannya untuk mampu memenuhi salah satu aspek legalitasnya. Selama ini perbankan menggunakan aspek legalitas sebagai salah satu persyaratannya baik dari aspek anggunan, aspek finansial, aspek akuntansi dan perijinan. Justru disinilah titik lemah yang ada pada sektor UMKM, oleh karena itu terdapat beberapa rekomendasi penting untuk mendorong optimalisasi peran perbankan untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan UMKM yang efektif sebagai berikut:

1. Perlunya lembaga perbankan memiliki program kerjasama dengan institusi terkait dan lembaga lainnya yang secara formalitas dan informal memiliki satu keterkaitan fungsi dengan sektor UMKM beserta pelakunya khususnya lembaga perguruan tinggi, dinas koperasi, dinas pariwisata, lembaga masyarakat serta organisasi keagamaan. Hal ini dibutuhkan sesuai dengan karakteristik dari sektor UMKM dan pelakunya. Tujuan dari kerjasama adalah untuk membangun sinergi

dalam memanfaatkan sumberdaya yang terbatas namun dapat memberi efek simultan dan efisien bagi pemangku kepentingan, bahkan bagi UMKM dan pelakunya, oleh karena itu di perlukan kepedulian dari pemangku kepentingan untuk memandang bahwa permasalahan UMKM adalah problem bersama, jika hal ini dilakukan melalui program yang *ter-integrated* tentu dapat mendorong pengembangan pariwisata dan UMKM berjalan lebih cepat dan bermartabat dalam rangka mengangkat sektor UMKM menjadi kuat dan mandiri.

2. Program pendampingan pengelolaan kredit bagi pelaku UMKM merupakan satu kebutuhan yang sangat krusial dalam mengatasi permasalahan manajemen tata kelola modal kerja. Hal penting yang belum dituntaskan oleh para pemangku kepentingan adalah melakukan satu program pendampingan hasil pelatihan dan dilakukan secara berkesinambungan, oleh karena itu kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi merupakan solusi tepat untuk memenuhi kebutuhan program pendampingan pasca perolehan kredit, karena hanya institusi perguruan tinggi yang memiliki sumberdaya yang cukup dan mumpuni untuk melakukan program pendampingan secara berkelanjutan.
3. Perlunya melakukan pemetaan karakteristik UMKM yang berada di wilayah kerjanya, sehingga dapat disusun skala prioritas sesuai dengan karakteristik yang ada di masing masing lokasi sentra UMKM. Melalui pemetaan kawasan sentra UMKM dengan tepat dan benar, tentu dapat mempermudah dalam menyusun berbagai program yang selaras dan sesuai dengan kebutuhan riil bagi pelaku UMKM, oleh karena itu mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki oleh pemangku kepentingan dan melakukan program kerja sama merupakan jawaban tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan UMKM seperti program riset, program peningkatan kompetensi dan kualitas manajemen, program monitoring dan kebutuhan pengembangan UMKM dimasa yang akan datang.
4. Perlunya sinkronisasi program terpadu dengan institusi lain, karena UMKM dan pelakunya selalu terkait dengan lintas lembaga, oleh karena itu sinkronisasi di dalam menyusun program dan kebijakan harus dilakukan secara *ter-integrated*. Lembaga perbankan harus fokus pada pengembangan dan penyediaan program kredit yang efektif dan efisien bagi pelaku UMKM dan sektor usahanya dengan satu persyaratan yang aman dan fleksibel sesuai dengan karakteristiknya.

5.4.3.4 Peran Lembaga Perguruan Tinggi

Perguruan memiliki posisi yang sangat strategis dalam rangka memainkan perannya sebagai pelaku agen perubahan ditengah masyarakat kita, oleh karena itu optimalisasi peran perguruan tinggi harus menggunakan peluang yang dimilikinya untuk turut mendukung pengembangan dan pengelolaan UMKM yang lebih efektif melalui kegiatan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Program perguruan tinggi yang relevan untuk melakukan optimalisasi perannya dalam mendukung pengembangan dan pengelolaan UMKM dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:

- 1 **Program Kewirausahaan**, merupakan redesain mata kuliah kewirausahaan dalam sistem kurikulum dengan menambahkan kegiatan lapangan langsung di sentra UMKM secara terpadu baik materinya, jadwal terstruktur, keterlibatan dosen, mahasiswa, lembaga dan pelaku UMKM, sehingga program ini memberi pengalaman pembelajaran langsung pada obyeknya serta manfaatnya dapat di rasakan langsung oleh pelaku UMKM khususnya terkait dengan pengembangan aspek manajerialnya.
- 2 **Program Magang mahasiswa**, merupakan kegiatan yang didesain perguruan tinggi dalam upaya untuk memberikan pembelajaran kewirausahaan langsung dengan obyeknya, sehingga mahasiswa dapat berinteraksi dengan kondisi dan situasi yang dialami oleh pelaku UMKM, khususnya yang menyangkut aspek manajemen sumberdaya manusia, manajemen proses, manajemen pemasaran dan manajemen keuangan/akuntansi. Program magang mahasiswa juga memberi peluang untuk memberi pendampingan kepada pelaku UMKM langsung pada obyek permasalahan yang dialami oleh pelaku UMKM, sehingga setiap problem langsung dapat dicarikan solusi, diterapkan dan dievaluasi sesuai dengan kondisi riil yang terjadi dilapangan, dengan demikian praktek manajerial akan menjadi lebih baik sekaligus untuk membangun keunggulan bagi UMKM.
- 3 **Sentra Layanan UMKM**, merupakan program terpadu untuk memberi tempat bagi dosen dan mahasiswa perguruan tinggi mengekspresikan potensi akademik yang dimilikinya untuk memberi layanan manajemen bagi pelaku UMKM baik manajemen sumberdaya manusia, manajemen proses, manajemen pemasaran

dan manajemen keuangan/akuntansi. Sentra layanan manajemen bagi UMKM harus dijadikan program yang terstruktur dan menjadi bagian yang tidak terpisah dengan program kewirausahaan dan magang mahasiswa, sehingga program ini dapat memberi dampak langsung untuk mengatasi berbagai problem manajemen yang dapat menghambat bisnis UMKM, dengan demikian orientasi manajemen UMKM akan berjalan pada jalur yang benar serta mampu mendorong perilaku manajemen yang mengarah pada terciptanya praktek manajemen yang efektif dan efisien

- 4 **Sinkronisasi Program Lapangan**, merupakan upaya perguruan tinggi untuk mensinergikan berbagai sumber daya, program dan kegiatan lembaga lainnya secara *ter-integrated* dengan sentra layanan manajemen bagi pelaku UMKM yang meliputi manajemen sumberdaya manusia, manajemen proses, manajemen pemasaran dan manajemen keuangan/akuntansi. Sinkronisasi program lapangan juga bertujuan untuk mengoptimalkan peran perguruan tinggi dalam membantu memberi solusi atas berbagai permasalahan aspek manajemen yang dialami oleh pelaku UMKM, sehingga dalam jangka panjang turut membantu memperkuat terciptanya daya saing UMKM yang kuat dan mandiri dalam rangka menghadapi persaingan global dan perubahan sistem bisnis.
- 5 **Program Riset UMKM**, riset merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur, oleh karena itu program riset harus diarahkan pada topik dan tema yang terkait dengan aspek manajemen UMKM. Melalui riset yang terprogram tentu praktek manajemen yang diterapkan oleh UMKM terus mengalami proses pengembangan sesuai dengan perubahan pada eranya. Topik dan tema riset UMKM harus mampu memberi solusi pada aspek manajemennya agar orientasi manajemen yang diadopsi oleh pelaku UMKM memiliki model yang terbaik dan lebih aplikatif.
- 6 **Publikasi Ilmiah**, merupakan upaya program studi untuk melakukan sosialisasi hasil riset yang terkait dengan tema manajemen UMKM, dengan publikasi hasil riset tentu akan memberi peluang untuk pengembangan aspek manajemen yang lebih terbuka karena dapat diakses oleh masyarakat lebih luas, sehingga dapat membuka peluang masukan dari penggiat riset manajemen UMKM. Oleh

karena itu publikasi ilmiah merupakan piranti penting untuk membangun daya saing UMKM menjadi lebih kuat dan unggul dari aspek manajemen.

5.4.3.5 Kebutuhan Pengembangan Model Usaha UMKM

Pengembangan model usaha merupakan salah satu kebutuhan jangka panjang UMKM dan sektor usaha, karena UMKM berada wilayah persaingan bisnis yang bersifat kompleks, oleh karena itu didalam perumusan model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM perlu dikemukakan, bahwa pengembangan bisnis merupakan satu kebutuhan yang harus dipertimbangan, mengingat perbaikan sistem manajemen pengelolaan UMKM bertujuan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik, sehingga perbaikan kinerja UMKM juga menuntut pada pengembangan usaha UMKM di masa mendatang, karena adanya perubahan bisnis dan persaingan global. Beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan usaha dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menyusun kebutuhan kelompok masyarakat atau pelaku UMKM tentang model pelatihan yang terkait dengan pengembangan usahanya. Identifikasi ini dapat dilakukan melalui program penelitian terlebih dahulu sehingga dapat dirumuskan berbagai kebutuhan pelatihan yang dapat mendorong kemajuan usaha UMKM. Model manajerial, pengelolaan usaha atau tata kelola, sering menjadi kendala terbesar bagi pelaku UMKM, oleh karena itu setiap lembaga pendidikan tinggi dapat menentukan prioritas pelatihan sesuai dengan bidang keilmuan yang ada pada lembaganya.
2. Menyusun kebutuhan sumberdaya yang terkait dengan implementasi program bina mitra untuk setiap obyek dan kurun waktu tertentu (idealnya dua tahun). Orientasi kebutuhan sumberdaya dapat diprioritaskan pada penentuan jadwal, pemilihan mitra bina dengan sekelompok UMKM, kebutuhan jenis pelatihan, jumlah dosen dan mahasiswa yang ikut dilibatkan dalam program pelatihan, pendampingan sampai pada pengembangan.
3. Melakukan kemitraan dengan kalangan pemerintahan atau pelaku bisnis untuk sinkronisasi dengan program pemerintah atau program *corporate* lainnya dalam rangka pemenuhan sumber dana, agar implementasi program pelatihan dan pendampingan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4. Menentukan skala prioritas program CSR yang akan dilakukan oleh *corporate* baik menyangkut program kegiatan, jumlah dana yang dialokasikan, sasaran dan target yang diinginkan serta kelompok masyarakat atau pelaku UMKM yang memperoleh kesempatan untuk program CSR
5. Melakukan evaluasi program CSR dan bina mitra dengan kalangan pendidikan tinggi agar menghasilkan program berkelanjutan untuk pelaku UMKM yang lebih terintegrasi dan holistik sehingga berdampak positif pada kemajuan dan keberlanjutan kegiatan masyarakat dan usaha UMKM.
6. Pemerintah sebagai unsur regulator seharusnya mampu untuk menyusun suatu regulasi yang memberi perlindungan terhadap UMKM, mengingat jumlahnya yang sangat besar dan terbukti telah memberi kontribusi terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui kiprahnya di sektor UMKM.
7. Memberi sanksi tegas terhadap *corporate* yang tidak melakukan program CSR sesuai dengan regulasi yang ada, dengan regulasi yang jelas tentu semua pihak dapat saling mendukung upaya pengembangan UMKM yang berorientasi pada kemitraan. Lembaga pendidikan tinggi, *corporate* dan pemerintah daerah yang berada dalam satu wilayah yang sama (tingkat kecamatan) dapat saling bermitra untuk mengembangkan eksistensi dan keberlanjutan sentra UMKM yang ada di wilayahnya, sehingga UMKM bukan sebagai obyek tetapi juga menjadi subyek dalam perekonomian suatu negara, sehingga keberadaannya dapat memperkuat perekonomian nasional dan berkontribusi secara riil dalam bagi kesejahteraan masyarakat kawasan wisata religi di Jawa Timur.
8. Optimalisasi nilai-nilai kearifan lokal dan budaya masyarakat merupakan nilai peradaban suatu kelompok warga yang tetap terjaga dan dipelihara dalam komunitasnya, karena memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakatnya. Nilai kearifan lokal dan budaya akan turut mewarnai dalam aspek kehidupan warga dan tercermin dalam perilaku sehari-hari baik dalam kehidupan maupun aktivitas usaha, oleh karena itu nilai kearifan lokal dan budaya masyarakat sebenarnya merupakan sumber daya yang dapat dioptimalkan kontribusinya karena memiliki nilai spirit dalam rangka mendorong kehidupan yang lebih baik, usaha yang lebih berkembang dan selalu menjaga serta melestarikan norma-norma dan etika dalam kehidupan. Hal ini tentu akan mewarnai corak

kehidupan masyarakatnya baik dalam komunitas warga maupun aktivitas bisnisnya. Nilai kearifan lokal dan budaya masyarakat yang bernilai positif diantaranya adalah keunikan bahasa, adat istiadat, cagar alam, berpakaian, pola komunikasi dan lainnya, jika hal ini dapat diinovasi dan diimplementasikan dalam aktivitas usaha tentu akan menjadi nilai yang unik dan dapat mencerminkan karakteristik bagi masyarakat.

9. Keinginan menjadi lebih baik, sebagian dari masyarakat kita adalah memiliki keinginan menjadi lebih baik dalam segala aspek kehidupan, tentu ini merupakan sumberdaya yang bersifat *intangibile*, mampu menjadi pendorong dalam perkembangan usaha dari masyarakat, karena sudah tercermin dalam norma kehidupan, etika serta norma agama. Karakteristik ini tentu mempermudah proses terbentuknya nilai tambah dalam aktivitas masyarakat karena sudah muncul motivasi diri yang kuat, spirit untuk berubah dan kemampuan bertahan dalam menghadapi setiap tantangan, oleh karena itu keinginan menjadi lebih baik merupakan sumberdaya *intangibile*, tentunya layak dipertimbangkan dalam setiap pemberdayaan masyarakat karena akan mempermudah proses pengembangan UMKM dengan segala aspek yang ada padanya.
10. Bakat keterampilan, masyarakat yang berdomisili disuatu kawasan, biasanya memiliki bakat secara alami berupa keterampilan yang diperoleh lewat faktor keturunan maupun faktor lingkungan, oleh karena itu nilai tambah masyarakat harus dioptimalkan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi yang lebih berdayaguna dan bermartabat bagi kesejahteraan warganya. Bakat keterampilan yang muncul secara alami biasanya berupa keterampilan memanfaatkan sumberdaya alami, keuletan dalam berkarya, bertahan dalam kesulitan, mengoptimalkan potensi alam sekitar serta kreativitas dan inovasi dalam berkarya. Tanpa disadari bakat keterampilan ini akan mendukung proses transformasi sumberdaya alam ke dalam kegiatan produktif yang bernilai tambah ekonomis serta turut memacu perkembangan kegiatan masyarakat dan sentra UMKM.
11. Pelaku usaha mikro dan kecil sebagian besar masih dilakukan oleh kelompok masyarakat marginal, jumlah pelaku sangat besar namun skala usahanya masih

sangat kecil, oleh karena itu pelaku UMKM masih membutuhkan program pendampingan pada aspek manajerialnya terutama peningkatan kompetensi pengelolaan usaha, akses pasar, akses permodalan, akses teknologi komunikasi dan informasi serta membangun jejaring (kemitraan). Jumlah UMKM Jawa Timur sangat besar dan terbukti memberi kontribusi bagi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan warganya walaupun masih belum optimal, oleh karena itu diperlukan sinergi dari kalangan *stakeholder* dalam merumuskan kebijakan strategis dalam membangun keunggulan daya saing UMKM dalam memasuki masyarakat ekonomi Asean dan persaingan global. Keberlanjutan usaha UMKM merupakan upaya strategis dalam rangka memperkuat sistem perekonomian dan jati diri suatu bangsa, khususnya perekonomian domestik yang mengarah pada kemandirian anggaran, oleh karena itu pengembangan kompetensi manajemen bagi pelaku UMKM harus diarahkan pada beberapa kebijakan strategis sebagai berikut:

- a. Terciptanya pelaku UMKM yang berkompoten, kreatif dan inovatif, sehingga mampu dan siap menghadapi berbagai tantangan dan persaingan global
 - b. Berorientasi pada bisnis, bukan sekedar membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya tetapi untuk meraih profit, menciptakan nilai sumberdaya yang produktif
 - c. Meningkatkan tingkat kemampuan manajerial yang mumpuni guna untuk mengelola usahanya lebih efektif dan efisien
 - d. Terjalannya kemitraan dengan lembaga lain baik yang terkait dengan akses pembiayaan, akses pasar, akses sumberdaya dan akses keberlanjutan usaha
 - e. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, dalam rangka menuju pada bisnis berbasis digital, hal ini akan menunjang implementasi bisnis yang cepat, jangkauan luas, kinerja bisnis semakin baik.
12. Sentra UMKM merupakan suatu kawasan yang dihuni oleh sekelompok orang yang menjalankan kegiatan usaha yang sama, karena adanya panggilan jiwa dan merasa senasib dan sepenanggungan, memiliki tujuan sama, memiliki komunitas yang sama bahkan terbentuk karena faktor lingkungan yang sama. Namun dalam perkembangan sentra UMKM ada yang sengaja dijadikan lokasi khusus pelaku usaha, agar mempermudah proses pembinaan, pengembangan usahanya,

pengawasan dan tujuan lainnya. Kegiatan usaha yang tergabung dalam sentra UMKM akan memperoleh nilai manfaat lebih baik daripada melakukan usaha dilokasi sendiri, oleh karena itu sentra UMKM masih dibutuhkan dalam rangka pengembangan usaha dari kelompok masyarakat, adapun nilai tambah yang diperoleh pelaku usaha yang berada di sentra UMKM adalah:

- a. Transformasi *hardskill* dan *softskill* berjalan lebih lancar diantara pelaku UMKM, karena berada pada satu kawasan, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama, bahkan semua proses akan berjalan secara alami (informal).
- b. Komunikasi semua aspek kegiatan di sentra UMKM akan berjalan efektif dan efisien, karena bersifat informal dan melibatkan pelaku yang karakteristiknya relatif sama
- c. Memudahkan konsumen atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan suatu produk yang diinginkan dengan cara mengenalinya melalui sentra UMKM di lokasi tertentu sekaligus alternatif pilihan produk yang diinginkan.
- d. Ajang pengenalan produk yang sangat efektif dan efisien, karena tidak harus melakukan promosi secara individual, konsumen datang dan mengenalinya sendiri ke lokasi, tinggal bagaimana cara menciptakan suasana tempat usaha yang menarik, nyaman dan bersahabat dengan pembeli
- e. Akses informasi dan kemitraan dengan lembaga lain akan menjadi mudah dan cepat karena semua proses kemitraan akan berlangsung ditempat lokasi usaha serta memberi rasa aman bagi mitranya. Kemitraan menjadi bagian strategi penting dalam pengembangan usaha maupun sentra UMKMnya sendiri, oleh karena itu sentra UMKM dibutuhkan untuk menjamin keberlanjutan usaha UMKM disaat sekarang maupun dimasa yang akan datang.

5.5 Luaran Yang Dicapai

Tujuan penelitian ini adalah merumuskan suatu model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM yang efektif pada kawasan wisata religi Jawa Timur, dengan harapan dapat memberi solusi atas permasalahan manajemen yang dihadapi oleh pelaku UMKM agar pengelolaan usahanya menjadi efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan potensi ekonominya menjadi lebih baik serta berkontribusi riil bagi kesejahteraan masyarakat di kawasan wisata religi makam

para wali di Jawa Timur. Penelitian ini memiliki target luaran pada tahun kedua yang terdiri:

1. Luaran wajib berupa: model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM yang efektif atau paten sederhana (hak cipta)
2. Luaran tambahan: a) publikasi ilmiah internasional, b) buku Ajar Manajemen UMKM : Orientasi Peran *stakeholder* Dalam Membangun Daya Saing UMKM dengan standar ISBN, c) pemakalah dalam pertemuan ilmiah nasional (seminar/proseding)

Capaian luaran pada akhir tahun pertama penelitian telah terealisasi sesuai dengan kontrak penelitian, sedangkan untuk capaian luaran tambahan realisasinya akan berlanjut pada tahun berikutnya (t_{s1}). Untuk memberikan gambaran secara rinci capaian luaran tahun pertama dapat ditunjukkan dalam tabel 5.10 sebagai berikut:

Tabel 5.10: Capaian Luaran Pada Tahun kedua

No	Jenis Luaran	Target Luaran	Capaian	Keterangan
1	Laporan Penelitian Utama	terlaksana	terlaksana- t_s	Upload Simlitabmas
2	Perekayasaan Sosial: Model Kebijakan	terlaksana	terlaksana- t_s	ISBN: 978-602-1187-51-7
3	Paten Sederhana: Hak Cipta	terlaksana	terlaksana- t_s	Pengajuan: EC00201851546 Pencatatan: 000122271
4	Artikel ilmiah: Proseding	draft	terlaksana- t_s	SENIMA-3 UNESA Surabaya, 5 Oktober 2018
5	Artikel ilmiah: Jurnal internasional	draft	draft- t_1	draft
6	Buku Ajar	draft	draft- t_1	ISBN: 978-602-1187-52-4

1. Laporan penelitian utama: Laporan induk penelitian yang wajib disusun atas hasil penelitian lapangan pada tahun kedua
2. Perekayasaan Sosial: Model Optimalisasi Peran *Stakeholder* Dalam Pengelolaan UMKM Kawasan Wisata Religi di Jawa Timur (ISBN 978-602-1187-51-7)
3. Paten Sederhana: Model Optimalisasi Peran *Stakeholder* Dalam Pengelolaan UMKM Kawasan Wisata Religi di Jawa Timur (Pengajuan: EC00201704412; Nomor Pencatatan; 000122271)
4. Proseding/seminar nasional: Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi Dalam Rangka Memperkuat Daya Saing UMKM Kawasan Wisata Religi di Jawa Timur (SENIMA-3 UNESA Surabaya, 5 Oktober 2018)

5. Jurnal Ilmiah Internasional: Strategi Perguruan Tinggi Membangun Kualitas Manajemen dan Daya Saing UMKM Kawasan Wisata Religi Di Jawa Timur (*The Strategic to Developmen Management and Competitivenes of SMEs on Religious Tourism Areas in East Java*)

Rencana Publikasi Jurnal draft-t₁:

- Journal of Innovation Management in Small and Medium Enterprises
 - Journal International of Servises Economic and Management
6. Buku Ajar: MANAJEMEN UMKM: Orientasi Peran *Stakeholder* dalam Membangun Daya Saing UMKM (ISBN: 978-602-1187-52-4)

5.5.1 Laporan Penelitian

Laporan penelitian utama merupakan wujud pertanggungjawaban peneliti kepada pemberi dana dalam hal ini Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam suatu kontrak penelitian Nomor: 007/SP2H/K7/KM/2018. Hasil penugasan ini telah di monev secara internal maupun monev eksternal yang telah dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2018. Dalam monev eksternal telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara langsung terkait dengan target luaran yang telah dijanjikan oleh peneliti yang tertuang dalam proposal penelitian. Laporan penelitian yang disertai dengan luarannya semua telah dievaluasi dan dicek secara langsung oleh *reviewer* yang dihadirkan untuk melakukan monev eksternal sebagaimana yang telah peneliti buat dalam rincian yang tercermin pada tabel 5.18 diatas.

5.5.2 Perekayasaan Sosial

Perekayasaan sosial merupakan produk luaran yang berwujud model, desain kebijakan dan perekayasaan lain yang dapat dijadikan panduan bagi masyarakat atau organisasi untuk melakukan suatu perbaikan sistem maupun tata kelola. Judul perekayasaan sosial dalam penelitian ini: “Model Optimalisasi Peran *Stakeholder* Dalam Pengelolaan UMKM Kawasan Wisata Religi Di Jawa Timur”. Model berupa produk buku yang berisi optimalisasi peran stakeholder dalam pengelolaan UMKM khususnya bidang manajemen, sehingga model ini dapat dipergunakan sebagai panduan untuk meningkatkan peran dalam pengelolaan UMKM yang lebih efektif,

karena produknya berupa buku, maka model perekayasaan sosial juga didaftarkan ISBN dengan nomor registrasi: ISBN: 978-602-1187-51-7. Adapun struktur buku model dapat disampaikan sebagai berikut:

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PRAKATA.....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR.....	
BAB 1. PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang.....	
1.2 Perumusan Masalah.....	
1.3 Tujuan Penyusunan Model.....	
1.4 Manfaat Penyusunan Model.....	
BAB 2. METODE PENELITIAN.....	
2.1 Jenis Penelitian.....	
2.2 Obyek dan Nara Sumber.....	
2.3 Instrumen Penelitian.....	
2.4 Sampel Sumber Data.....	
2.5 Teknik Pengumpulan Data.....	
2.6 Teknik Pengujian Keabsahan Data.....	
2.7 Satuan Kajian (fokus amatan).....	
2.7.1 Peran Dinas Koperasi.....	
2.7.2 Peran Dinas Pariwisata.....	
2.7.3 Peran Lembaga Perbankan.....	
2.7.4 Peran Perguruan Tinggi.....	
2.8 Teknik Analisis Data.....	
2.8.1 Rancangan dan Metode Penelitian.....	
2.8.2 Langkah Langkah Perumusan Model.....	
BAB 3. GAMBARAN OBYEK PENELITIAN.....	
3.1 Gambaran Umum Obyek.....	
3.2 Karakteristik Sentra UMKM.....	
3.2.1 Pelaku UMKM.....	
3.2.2 Lokasi Sentra UMKM.....	
3.2.3 Komoditi Barang Dagangan.....	
3.2.4 Siklus Kunjungan Wisatawan.....	
3.2.5 Infrastruktur Kawasan Wisata.....	
BAB 4. PERUMUSAN MODEL.....	
4.1 Aspek Perumusan Model.....	
4.2 Tahapan Perumusan Model.....	
4.2.1 Identifikasi Peran <i>Stakeholder</i>	

4.2.1.1	Peran Dinas Koperasi dan UMKM.....
4.2.1.2	Peran Dinas Pariwisata.....
4.2.1.3	Peran Lembaga Perbankan.....
4.2.1.4	Peran Perguruan Tinggi.....
4.2.2	Mapping Peran <i>Stakeholder</i> Dalam Pengelolaan UMKM.....
4.2.2.1	Peran Dinas Koperasi dan UMKM.....
4.2.2.2	Peran Dinas Pariwisata.....
4.2.2.3	Peran Lembaga Perbankan.....
4.2.2.4	Peran Perguruan Tinggi.....
4.2.3	Merumuskan Model Optimalisasi Peran <i>Stakeholder</i>
4.2.3.1	Penentuan Titik Krusial.....
4.2.3.2	Rumusan Model.....
4.2.4	Pengujian Efektivitas Model.....
4.2.5	Mengevaluasi Efektivitas Rumusan Model.....
4.3	Pembahasan Model Optimalisasi Peran <i>Stakeholder</i>
4.3.1	Redesain Optimalisasi Peran <i>Stakeholder</i>
4.3.1.1	Kalangan Birokrasi.....
4.3.1.2	Kalangan Bisnis.....
4.3.1.3	Kalangan Akademik.....
4.3.2	Sinkronisasi Peran <i>Stakeholder</i>
4.3.3	Model Optimalisasi Peran <i>Stakeholder</i>
4.3.3.1	Peran Dinas Koperasi dan UMKM.....
4.3.3.2	Peran Dinas Pariwisata.....
4.3.3.3	Peran Lembaga Perbankan.....
4.3.3.4	Peran Perguruan Tinggi.....
4.3.3.5	Kebutuhan Pengembangan Model Usaha.....

BAB 5.	PENUTUP.....
5.1	Kesimpulan.....
5.2	Rekomendasi.....

DAFTAR REFERENSI.....

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Penyerapan Tenaga Kerja Per Sektor.....
Tabel 2.1	: Rancangan dan Metode Rumusan Model.....
Tabel 4.1	: Karakteristik Peran Dinas Koperasi.....
Tabel 4.2	: Karakteristik Peran Dinas Pariwisata.....
Tabel 4.3	: Karakteristik Peran Lembaga Perbankan.....
Tabel 4.4	: Karakteristik Peran Perguruan Tinggi.....
Tabel 4.5	: <i>Mapping Peran</i> Dinas Koperasi.....
Tabel 4.6	: <i>Mapping Peran</i> Dinas Pariwisata.....
Tabel 4.7	: <i>Mapping Peran</i> Lembaga Perbankan.....
Tabel 4.8	: <i>Mapping Peran</i> Perguruan Tinggi.....
Tabel 4.9	: Persepsi atas Model Optimalisasi Peran <i>Stakeholder</i>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Peran Dinas Koperasi Dalam Pengelolaan UMKM.....	
Gambar 4.2 : Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan UMKM.....	
Gambar 4.3 : Peran Dinas Lembaga Perbankan Dalam.....	
Gambar 4.4 : Peran Dinas Perguruan Tinggi Dalam Pengelolaan.....	
Gambar 4.5 : Model Optimalisasi Peran <i>Stakeholder</i> Dalam.....	
Gambar 4.6 : Persepsi Responden terhadap Rumusan Model.....	

5.5.3 Paten Sederhana

Paten sederhana (hak cipta) perekayasaan sosial: “Model Optimalisasi Peran *Stakeholder* Dalam Pengelolaan Sentra UMKM Kawasan Wisata Religi Di Jawa Timur” merupakan salah satu luaran wajib yang harus di sandingkan dengan luaran perekayasaan sosial pada tahun ini (ts). Hak cipta telah didaftarkan melalui Dirjen HKI pada tanggal 26 Oktober 2018. Proses HAKI telah selesai dengan Nomor bukti pengajuan: EC00201704412; Nomor Pencatatan; 000122271.

5.5.4 Proseding Nasional

Seminar nasional proseding sebagai pembicara merupakan luaran tambahan yang bertujuan untuk meningkatkan publikasi dan sosialisasi hasil penelitian melalui forum seminar nasional, agar hasil penelitiannya dapat dikenal masyarakat dan memiliki manfaat bagi pihak lain, baik untuk diimplementasikan maupun untuk pengembangan pengetahuan baru. Judul seminar nasional dalam bentuk Proseding adalah: “Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi Dalam Rangka Memperkuat Daya Saing UMKM Kawasan Wisata Religi Di Jawa Timur”. Seminar Nasional ini di selenggarakan oleh Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi - Universitas Negeri Surabaya (UNISA), yang diikuti oleh 86 pemakalah, 34 perguruan tinggi yang datang dari sepuluh propinsi, seminar telah digelar pada tanggal 5 Oktober 2018 dengan melakukan paparan dan diskusi secara terbuka.

5.5.5 Publikasi Jurnal Ilmiah

Jurnal ilmiah merupakan luaran tambahan yang bertujuan untuk publikasi karya ilmiah peneliti di kancah internasional, oleh karena itu pada tahun pertama (t_s) peneliti menargetkan dapat menyelesaikan draft jurnal dan dipublikasikan pada

tahun depan (t_1). Adapun judul jurnal ilmiah adalah: “Strategi Perguruan Tinggi Dalam Membangun Kualitas dan Daya Saing UMKM Kawasan Wisata Religi Di Jawa Timur”. Draft jurnal telah selesai disusun, namun masih harus melalui tahapan berikut: 1) monev tim publikasi karya ilmiah, 2) klinik penulisan karya ilmiah serta 3) *translate* bahasa asing dan pengiriman naskah jurnal pada pengelola jurnal yang direncanakan melalui:

- Journal of Innovation Management in Small and Medium Enterprises
- Journal International of Services Economic and Management

5.5.6 Buku Ajar

Buku ajar merupakan luaran tambahan yang bertujuan untuk meningkatkan pengayaan materi mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM berbasis riset, sehingga dapat menggambarkan kondisi riil terkait implementasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM sekaligus membantu pengembangan manajemen bagi pelaku UMKM, sehingga pengelolaan usaha dapat berjalan dengan baik, adapun judul buku ini adalah MANAJEMEN UMKM: Orientasi Peran *Stakeholder* Dalam Membangun Daya Saing UMKM (ISBN: 978-602-1187-52-4). Anatomi buku ini terdiri dari tujuh bab yang meliputi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM, telah memperoleh ISBN dan proses penyelesaian direncanakan akhir bulan Maret 2019 sudah selesai dicetak, adapun gambaran secara menyeluruh tentang isi buku ini dapat ditampilkan melalui daftar isis sebagai berikut.

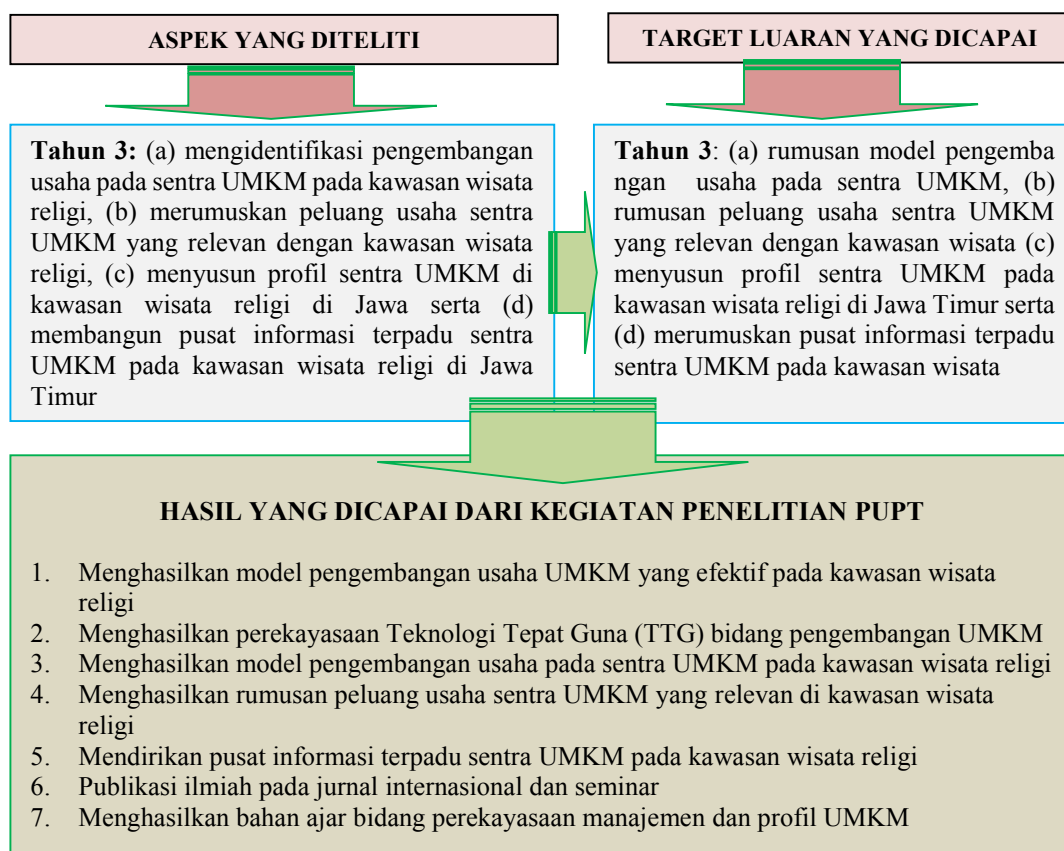
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB 1. MANAJEMEN UMKM	
1.5 Peran Manajemen UMKM.....	
1.6 Perubahan manajemen.....	
1.7 Pengembangan Manajemen UMKM.....	
1.8 Kendala Pengembangan Manajemen UMKM.....	
1.9 Redesain Pengembangan Manajemen.....	
BAB 2. KARAKTERISTIK MANAJEMEN UMKM	
2.9 Kualitas Sumber Daya Manusia.....	
2.10 Pengolahan Produk.....	

2.11 Pola Pemasaran.....
2.12 Pengelolaan Sumber Daya.....
2.13 Kemitraan Usaha.....
2.14 Pemanfaatan Teknologi Informasi.....
BAB 3. STAKEHOLDER UMKM.....
3.3 Birokrasi Sebagai Agen Regulasi.....
3.4 Pelaku Bisnis.....
3.5 Lembaga Pembiayaan.....
3.6 Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.....
3.7 Pemberdayaan Masyarakat.....
BAB 4. OPTIMALISASI PERAN STAKEHOLDER.....
4.4 Nilai Sumber Daya.....
4.5 Pemanfaatan Sumber Daya.....
4.6 Memilih Sumber Daya.....
4.7 Optimalisasi Sumber Daya.....
4.8 Peran <i>Stakeholder</i> Dalam Mengelola Sumber Daya.....
4.9 Nilai Tambah Sumber Daya.....
BAB 5. SINKRONISASI PERAN STAKEHOLDER.....
5.3 <i>Stakeholder</i> Sebagai Sumber Daya.....
5.4 Mengoptimalkan Sumber Daya.....
5.5 Melestarikan Sumber Daya.....
5.6 <i>Stakeholder</i> Sebagai Pengungkit Perubahan.....
5.7 Harmonisasi Peran <i>Stakeholder</i>
BAB 6. PERAN STAKEHOLDER DAN MANAJERIAL UMKM.....
6.1 Klinik Manajemen UMKM.....
6.2 Pelatihan Manajemen UMKM.....
6.3 Pendampingan UMKM.....
6.4 Bina Mitra dan Pengembangan UMKM.....
6.5 Pendampingan Pengelolaan Kredit.....
6.6 Mengenalkan UMKM.....
BAB 7. DAYA SAING UMKM.....
7.1 Karakteristik Daya Saing.....
7.2 Mengembangkan Daya Saing.....
7.3 Manajemen Sebagai Pengungkit Daya Saing.....
7.4 Daya Saing Sebagai Pengungkit Pertumbuhan UMKM.....
7.5 Pertumbuhan UMKM sebagai Pengungkit Ekonomi warga.....
7.6 Perberdayaan Masyarakat sebagai Penggerak Ekonomi.....
DAFTAR PUSTAKA

BAB. 6 RENCANA TAHUN BERIKUT

6.1 Aspek Penelitian Tahun Berikut

Untuk mencapai hasil penelitian secara *ter-integrated*, maka penelitian ini harus dilakukan secara berkesinambungan dalam kurun waktu tiga tahun, oleh karena itu kegiatan penelitian tahun berikutnya dengan lokasi pada sentra UMKM kawasan wisata religi di empat kota/kabupaten di Jawa Timur dapat ditampilkan pada gambar 6.1 sebagai berikut:



Gambar 6.1 Diagram sistematika penelitian dalam kurun waktu satu tahun

6.2 Rancangan dan Metode Penelitian Tahun Ketiga

Rancangan dan metode penelitian tahun ketiga merupakan kelanjutan dari proses penelitian yang telah dilakukan pada tahun kedua, oleh karena tahapan rancangan dan metode penelitian ini tidak terpisahkan dengan rancangan dan metode pada tahun kedua, sehingga hasil luarannya menjadi bagian yang terus ter-

integrated selama kurun waktu tiga tahun agar memberi manfaat yang optimal, secara rinci pelaksanaan penelitian dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6.1: Rincian metode penelitian pada tahun ketiga (3)

Aspek Yang Diteliti	Rancangan Penelitian	Metode Penelitian	Indikator Capaian
a. Identifikasi pengembangan usaha di sentra UMKM pada kawasan wisata religi di Jawa Timur	Desain kuesioner untuk mengidentifikasi usaha di sentra UMKM pada kawasan wisata religi di Jawa Timur	Menentukan 50 responden secara acak pada pelaku usaha di lima lokasi sentra UMKM kawasan wisata religi	Dapat diidentifikasi aktivitas pelaku usaha di lima sentra UMKM pada kawasan wisata religi di Jawa Timur
b. Merumuskan peluang usaha sentra UMKM yang relevan dengan kawasan wisata religi	Merumuskan peluang usaha di lima sentra UMKM yang relevan di kawasan wisata religi di Jawa Timur	Menentukan skoring penilaian untuk menentukan peluang usaha yang relevan dengan kawasan wisata religi	Dapat dirumuskan peluang usaha yang relevan dengan karakteristik kawasan wisata religi di Jawa Timur
c. Menyusun profil sentra UMKM di kawasan wisata religi di Jawa	Menyusun profil sentra UMKM di kawasan wisata religi	Memetakan dan menyusun profil sentra UMKM di kawasan wisata religi	Dapat disusun profil sentra UMKM pada kawasan religi di Jawa Timur
d. Membangun pusat informasi terpadu sentra UMKM pada kawasan wisata religi	Merumuskan model pusat informasi terpadu sentra UMKM pada kawasan wisata di Jawa Timur	Memformulasikan model pusat layanan terpadu sentra UMKM di kawasan wisata religi melalui FGD	Dapat dirumuskan model pusat informasi terpadu sentra UMKM melalui <i>focus group discussion</i>

Sumber: Diolah oleh Peneliti

6.3 Detail Kegiatan Penelitian Tahun Ketiga

Kegiatan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi secara rinci dapat dijabarkan secara bertahap, dimana tahapan yang pertama selalu berkaitan dengan langkah pada tahapan selanjutnya dengan urutan sebagai berikut:

1. Identifikasi pengembangan usaha pada sentra UMKM

Tahapan ini dilakukan identifikasi terhadap kegiatan usaha sentra UMKM di kawasan wisata religi dengan cara mendesain kuesioner yang menekankan pada aspek pengembangan usahanya. Kuesioner ini akan disebar pada 50 responden/pelaku usaha di lima lokasi sentra UMKM secara acak sehingga dapat diidentifikasi tentang karakteristik usaha sentra UMKM yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tersebar pada kawasan wisata religi di Jawa Timur.

2. Merumuskan peluang usaha yang relevan

Tahapan ini mengkaji secara mendalam tentang karakteristik usaha di sentra UMKM yang dilakukan oleh 50 responden/pelaku usaha di lima lokasi sentra UMKM. Jawaban 50 responden tersebut dijadikan acuan untuk merumuskan peluang usaha dengan memberi bobot dan nilai skoring dari setiap indikator

yang terkait dengan peluang usaha, sehingga dapat dirumuskan peluang usaha yang relevan dengan karakteristik usaha sentra UMKM pada kawasan wisata religi di Jawa Timur dengan tetap mempertahankan nilai budaya serta kearifan lokal yang dimiliki oleh masing masing kawasan wisata religi tersebut.

3. Menyusun profil sentra UMKM

Tahap ini melakukan kajian secara mendalam tentang karakteristik usaha yang ada dan relevan untuk dikembangkan dikawasan wisata ini, selanjutnya di susun profil sentra UMKM yang dapat menggambarkan secara komprehensif tentang profil sentra UMKM yang tersebar pada lima kawasan religi di Jatim.

4. Membangun pusat informasi terpadu di sentra UMKM

Tahap ini dilakukan kajian secara mendalam dan komprehensif terhadap usaha dan peluang usaha yang relevan dengan kawasan wisata religi, sehingga dapat dirumuskan model pusat informasi terpadu yang terkait dengan sentra UMKM di kawasan ini agar memudahkan masyarakat yang ingin melakukan ziarah pada lima kawasan wisata religi di Jawa Timur.

BAB. 7 PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Mengacu pada hasil pembahasan model sebagaimana yang diuraikan pada bab lima, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM yang terjadi di kawasan wisata religi di Jawa Timur meliputi aspek: a) program klinik manajemen, b) program pelatihan, c) program pendampingan, d) program bina mitra pengembangan UMKM. Implementasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM masih belum berjalan optimal khususnya aspek program pendampingan hasil pelatihan.
2. Model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM meliputi tiga tahapan yaitu: a) redesain optimalisasi peran *stakeholder*, b) sinkronisasi peran *stakeholder* serta c) model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM, dimana tahapan ini harus dilakukan dengan mensinergikan program dari pemangku kepentingan yaitu: a) unsur *government*, b) unsur *business* serta c) unsur *academic* dengan menyusun program pengembangan ter-*integrated* dan berkelanjutan.
3. Redesain optimalisasi peran *stakeholder* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya pengelolaan manajemen UMKM yang efektif dan memadai dengan melibatkan tiga pelaku utamanya yaitu: a) kalangan birokrasi b) kalangan bisnis dan c) kalangan akademisi, dimana tiga pemangku kepentingan ini harus mampu bersinergi dalam merumuskan kebijakan pengembangan manajemen UMKM yang adaptif dan memadai.
4. Sinkronisasi peran *stakeholder* merupakan representatif dari kegiatan pemangku kepentingan yang diwujudkan melalui implementasi program ter-*integrated* dan dilakukan secara berkelanjutan yang meliputi implementasi: a) program klinik manajemen, b) program pelatihan manajemen, c) program pendampingan serta d) program bina mitra untuk pengembangan usaha UMKM
5. Model optimalisasi peran *stakeholder* merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan perannya mendukung pengembangan dan pengelolaan UMKM yang efektif. *Stakeholder* memiliki satu

- peluang tentang bagaimana mewujudkan implementasi pengelolaan UMKM yang memadai dengan mensinergikan peran stakeholder melalui kerjasama yang terdiri dari: a) peran dinas koperasi dan UMKM, b) peran dinas pariwisata dan kebudayaan, c) peran lembaga perbankan dan d) peran lembaga perguruan tinggi
6. Kebutuhan pengembangan model merupakan satu kebutuhan jangka panjang UMKM dan sektor usahanya yang selaras dengan implementasi manajemen yang semakin baik serta munculnya persaingan global. Pengembangan model merupakan wujud keberhasilan manajemen dalam mengantisipasi perubahan bisnis dan persaingan yang dinamis. Kebutuhan pengembangan model tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya terdiri dari: a) perubahan kebutuhan kelompok masyarakat, b) perubahan kebutuhan kompetensi, c) perkembangan mitra dalam bisnis, d) tersedianya program *corporate social responsibility* yang memadai, e) kebijakan yang didukung oleh legalitas yang kuat, f) optimalisasi nilai kearifan lokal dan nilai budaya yang semakin masif dan g) pemberdayaan masyarakat semakin kuat.

7.2 Rekomendasi

Mengacu pada tahapan rumusan model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM, maka dapat diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Implementasi manajemen untuk UMKM menjadi efektif, jika para *stakeholder* mampu memberikan dukungan riil melalui peran: a) dinas koperasi dan UMKM, b) dinas pariwisata, c) lembaga perbankan dan d) lembaga perguruan tinggi
2. Optimalisasi peran *stakeholder* dalam mendukung pengembangan pengelolaan UMKM harus dilakukan melalui rumusan berikut: a) redesain optimalisasi peran *stakeholder*, b) sinkronisasi peran *stakeholder*, c) perumusan model optimalisasi peran *stakeholder*. Rumusan model ini tentu memerlukan kearifan *stakeholder* untuk melepaskan ego sektoralnya, sehingga para pemangku kepentingan ini mampu menghasilkan rumusan model yang komprehensif sehingga memberi kontribusi riil untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan UMKM yang efektif.
3. Sinkronisasi peran *stakeholder* diperlukan untuk menghasilkan rumusan model optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan UMKM yang efektif, dengan

demikian keterlibatan para pemangku kepentingan diharapkan mampu memberi kontribusi yang riil dalam merumuskan program yang terkait dengan manajemen UMKM. Sinkronisasi program untuk menghasilkan kemanfaatan yang efektif untuk implementasi manajemen dalam pengelolaan UMKM yang terdiri aspek: a) program klinik manajemen, b) program pelatihan manajemen, c) program pendampingan hasil pelatihan dan d) program bina mitra untuk pengembangan usaha UMKM

4. Perlunya optimalisasi peran dari kalangan akademisi, pelaku bisnis dan birokrasi dalam rangka pengembangan pengelolaan UMKM, karena untuk melakukan program pelatihan, program pendampingan dan program pengembangan tidak dapat di lakukan secara individual oleh masing masing penggiat UMKM tetapi harus di lakukan secara terintegrasi dari ketiga elemen tersebut yang sering disebut *triple helix*. Melalui sinergi tiga elemen tersebut diharapkan mampu menghasilkan rumusan model pengelolaan sentra UMKM yang efektif, efisien dan aplikatif.
5. Perlunya pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi kepemilikan sumber daya setempat, guna mendukung pengembangan UMKM yang produktif, berintegritas dan mandiri. Sumberdaya masyarakat yang selama ini masih terabaikan harus dioptimalkan agar proses percepatan ekonomi dapat terwujud sesuai dengan jati diri ekonomi suatu bangsa, melalui pemberdayaan sumberdaya berupa nilai nilai kearifan dan budaya lokal, sikap optimis untuk maju dan bakat keterampilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bateman, Thomas S. dan Snell, Scott A. (2014). *Manajemen: Kepemimpinan dan Kerjasama dalam Dunia yang Kompetitif*. (Alih Bahasa: Ratno Purnomo, Willy Abdillah), Edisi 10, Buku 1. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit CV. Alfabeta

Artikel Jurnal:

- Chowdhury, Sayani Roy and Chowdhury, Sahana Roy. (2016). Policy Reforms and SME Performances: A Comparison of Two Major EMES. *Emerging Economy Studies*, Sage Publication, 2(2) 145-155
- Holten, Ann Louise and Crouch, Colin. (2014). Unions in Small-and Medium-Size Enterprises: A Family Factor Perspective. *European Journal of Industrial Relations*. Vol. 20 (3) 273-290
- Jarvis, Robin and Rigby, Mike. (2012). The Provision of Human Resources and Employment Advice to Small and Medium-Size Enterprises: The Role of Small and Medium-Size Practices of Accountants. *International Small Business Journal*, 30 (8) 944-956
- Jones, Paul., Beynon, Malcolm J., Pickernell, David and Packham, Gary. (2013). Evaluating the Impact of Different Training Methods on SME Business Performance. *Environment of Planning C: Government and Policy*. Volume 31, pages 56-81
- Kim, Young Saing and Marsick, Victoria. (2013). Using the DLOQ to Support Learning in Republic of Korea SMEs. *Advances in Developing Human Resources*. 15 (2) 207-221
- Lee, Cheng Sheng and Wong, Kuan Yew. (2015). Knowledge Management Performance Measurement in Micro-Small and Medium Size Enterprise: An Exploratory Study. *Business Information Review*, Vol. 32 (4) 204-211
- Love, James H and Roper, Stephen. (2015). SME Innovation, Exporting and Growth: A Review of Existing Evidence. *International Small Business Journal*. Vol. 33 (1) 28-48
- Manjon, Juan Vicente Garcia and Mompou, Rafael. (2016). Accelerating Innovation in Small and Medium Size Enterprises in the ICT Service Sector. *Sage Open*, July-September, 1-9
- Stoll, Emely E and Brookshire, Jung E.Ha. (2012). Motivations for Success: Case of U.S Textile and Apparel Small-and Medium Size Enterprises. *Clothing and Textiles Research Journal*. 30 (2) 149-163